

**REMITANSI BURUH
MIGRAN INDONESIA:
OPTIMALISASI POTENSI
SOSIAL EKONOMI**

**REMITANSI BURUH
MIGRAN INDONESIA:
OPTIMALISASI POTENSI
SOSIAL EKONOMI**

Gusnelly

Kurnia Novianti

Paulus Rudolf Yuniarto

Siswanto

**Pusat Penelitian Sumberdaya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia**

2011

© 2011 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Sumber Daya Regional

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Remitansi Buruh Migran Indonesia: Optimalisasi Potensi
Sosial Ekonomi Daerah/Paulus Rudolf Yuniarto,
Siswanto, Kurnia Novianti, dan Gusnelly. – Jakarta: LIPI
Press, 2011.

xviii hlm + 169 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-694-9

1. Migran
ekonomi

2. Sosial-

331

Editor : Gusnelly
Kopieditor : Setya Iswanti
Penata Letak : Gusnelly
Desain Sampul : Emil Hakim



LIPI

Diterbitkan oleh:

LIPI Press, anggota Ikapi

Jln. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta
10350

Telp. (021) 314 0228, 314 6942. Faks. (021)
314 4591

E-mail: bmrlipi@centrin.net.id

lipipress@centrin.net.id

press@mail.lipi.go.id

KATA PENGANTAR

Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia, termasuk di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tingkat pengangguran yang dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga beban kemiskinan masyarakat desa ikut mengalami peningkatan. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa ada keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menurut pemerintah merupakan solusi strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan ini. Mereka yang bekerja ke luar negeri mendatangkan devisa melalui kiriman uang ataupun barang (*remittances*) ke daerah asal. Remitansi sebagai salah aspek yang penting dalam kegiatan migrasi menyiratkan karakteristik sosial-ekonomi yang sangat kuat. Remitansi sebenarnya tidak hanya dilekatkan pada istilah pengiriman uang ataupun barang, namun di dalamnya mengandung implikasi sosial menyangkut gagasan/ide-ide mengenai nilai sosial budaya, norma dan inovasi yang kini menjadi salah satu instrumen penting dalam proses

pembangunan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dalam skala kecil, yaitu di tingkat keluarga, pengelolaan remitansi lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dengan kata lain hanya untuk kebutuhan konsumsi. Pengelolaan uang kiriman tersebut belum dapat dipergunakan oleh sebagian besar keluarga migran untuk membangun kewirausahaan ataupun kemandirian ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah baru mampu menjadi lembaga yang mempermudah masyarakatnya bekerja ke luar negeri, tetapi belum berhasil membuat mereka berdaya secara ekonomi dan berkelanjutan.

Studi pengelolaan remitansi yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian Sumberdaya Regional (PSDR)-LIPI telah dilakukan selama 2 tahun (tahun 2009–2010). Lokasi penelitian di Pulau Lombok, yaitu di Kabupaten Lombok Timur (tahun 2009) dan Kabupaten Lombok Barat (tahun 2010). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan pengelolaan remitansi agar bermanfaat secara ekonomi jangka panjang bagi keluarga migran atau mantan TKI. Sinergitas antara perusahaan pengirim dan

pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan dan perbankan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat UMKM, dan media massa sangat diperlukan untuk mewujudkan target dan sasaran kegiatan pengelolaan remitansi.

Tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung lancarnya penelitian, terutama kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Disnakertrans Kabupaten Lombok Timur, Disnakertrans Kabupaten Lombok Barat, dan Kepala BP3TKI Nusa Tenggara Barat. Terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Bank BNI 46 Nusa Tenggara Barat dan Kepala Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB. Tidak lupa ucapan terima kasih ditujukan kepada Roma Hidayat beserta staf ADBMI, Lembaga Koslata, teman-teman di Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram, Ibu Endang sebagai ketua LSM Panca Karsa, dan Bapak Dadang, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, tim peneliti berharap sumbangsih ini dapat disempurnakan melalui kritikan dan saran yang membangun bagi keberlanjutan studi tentang pengelolaan remitansi buruh migran di Nusa Tenggara Barat (Lombok) yang lebih komprehensif.

Jakarta, Maret 2011

Drs. Dundin Zaenuddin, M.A

Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I REMITANSI BURUH MIGRAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH: SEBUAH PEMIKIRAN PENDAHULUAN

Paulus Rudolf Yuniarto

- A. Pendahuluan
- B. Perspektif Mengenai Remitansi Buruh Migran
 - 1. Remitansi untuk Konsumsi dan Kebutuhan Sosial
 - 2. Remitansi Buruh Migran untuk Pembangunan
- C. Paradigma Tentang Remitansi Buruh Migran untuk Pembangunan?
- D. Penutup
Daftar Pustaka

BAB II KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN, BURUH MIGRAN, DAN PENGELOLAAN REMITANSI DI NUSA TENGGARA BARAT

Siswanto

- A. Pendahuluan
- B. Konvensi Internasional dan Kebijakan Nasional Tentang Buruh Migran
 - 1. Konvensi Buruh Migran Internasional
 - 2. Kebijakan Nasional Terkait Dengan Koordinasi Koordinasi Penempatan Buruh Migran
 - 3. Kebijakan Nasional untuk Mengatasi Permasalahan Buruh Migran
- C. Kebijakan Pemerintah Daerah NTB di Bidang Perlindungan dan Pelayanan Buruh Migran
- D. Kebijakan Pemerintah NTB di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Buruh Migran Purna (TKI Purna)
 - 1. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi TKI Bermasalah
 - 2. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Buruh Migran Purna Kerja

- E. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Barat
 - 1. Masyarakat Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah
 - 2. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumbawa
- F. Analisis terhadap Kebijakan Lembaga Pemerintahan Desa Terkait dengan Pengelolaan Remitansi
 - 1. Pengelolaan Remitansi Belum Tersentuh Dalam Peraturan Desa
 - 2. Peran Desa Baru Sebatas Pelayanan Administrasi dan Informasi
 - 3. Konsep Kepung Desa: Aparat Desa Terlibat dalam Pengelolaan Remitansi
- G. Penutup
Daftar Pustaka

BAB III REMITANSI DAN POTENSI DAERAH YANG BELUM TERGALI

Oleh Kurnia Novianti

- A. Pendahuluan
- B. Potensi Sosial Ekonomi Daerah dan Pengiriman TKI

- C. Migrasi vs Remitansi
 - D. Pemanfaatan Remitansi
 - E. Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Remitansi
 - F. Penutup
- Daftar Pustaka

BAB IV RUMAH TANGGA KELUARGA MIGRAN DAN PENGELOLAAN REMITANSI DI NUSA TENGARA BARAT

Oleh Paulus Rudolf Yuniarto

- A. Pendahuluan
 - B. Buruh Migran, Remitansi dan Usaha Kecil
 - C. Rasionalitas Fungsi Ekonomi Rumah Tangga Buruh Migran
 - D. Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Buruh Migran NTB
 - E. Bentuk Strategi Pengelolaan Remitansi
 - F. Membangun Ekonomi Keluarga melalui Jalur Usaha *Ketengan*
 - G. Penutup
- Daftar Pustaka

BAB V

RESPONS DAN PERAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN REMITANSI DALAM RANGKA MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DI NUSA TENGGARA BARAT

Gusnelly

- A. Pendahuluan
 - B. Sekilas tentang Remitansi vs
Pembangunan
 - C. Remitansi dan Pembangunan Daerah:
Membangun Usaha Kecil Menengah di
Tingkat Lokal
 - D. Respon Lembaga Swadaya Masyarakat
terhadap Pengelolaan Remitansi dan
Pemberdayaan
 - 1. Perekonomian Keluarga TKI
 - 2. Advokasi Buruh Migran Indonesia
 - 3. Koslata
 - 4. Kelompok Solidaritas Perempuan
Mataram
 - E. Analisis Peranan Pemda dan Kegiatan
Pengelolaan Remitansi di NTB
 - F. Penutup
- Daftar Pustaka

BAB VI **EVALUASI** **TERKAIT** **DENGAN**
REMITANSI **DAN** **PEMBERDAYAAN**
EKONOMI KELUARGA MIGRAN DI NUSA
TENGGARA BARAT

Gusnelly

- A. Pendahuluan
 - B. Persoalan Terkait dengan Perekonomian Daerah
 - C. Pengelolaan Remitansi untuk Membangun Ekonomi Kerakyatan
 - D. Penutup
- Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Proporsi Peruntukan Uang Kiriman
- Tabel 1.2** Rangkings Proporsi Peruntukan Uang Kiriman
- Tabel 1.3** Data Remitansi TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2001-2009
- Tabel 1.4** Remitansi TKI per Kabupaten di Provinsi NTB
Bulan Januari-April 2009
- Tabel 2.1** Unsur-Unsur Terkait Mekanisme
LTSP TKI NTB
- Tabel 2.2** Data Populasi Kasus Tindak Kekerasan dan
Pekerja Migran Bermasalah di NTB Tahun
2009
- Tabel 2.3** Perubahan Perda No.11 Tahun 2003
- Tabel 3.1** Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berumur
15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi NTB Tahun 2005-2007
- Tabel 3.2** Data remitansi TKI di Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2001-2009
- Tabel 5.1** Analisis Kekuatan dan Kelemahan UKM

Tabel 6.1 Penerimaan Remitansi TKI NTB berdasarkan negara tujuan

Tabel 6.2 Penerimaan Remitansi TKI NTB berdasarkan negara tujuan

DAFTAR GAMBAR

- Gambar: 2.1** Mekanisme LTSP ke Wilayah ASEAN
- Gambar 2.2** Mekanisme LTSP TKI ke Wilayah Timur Tengah
- Gambar 3.1** Pekerjaan di Daerah Asal Sebelum Menjadi TKI di Luar Negeri
- Gambar 3.2** Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Lombok Barat Tahun 2010
- Gambar 3.3** Motivasi Menjadi Buruh Migran di Luar Negeri
- Gambar 3.4** Rumah yang Dibangun dari Remitansi
- Gambar 4.1** Kegiatan usaha ketengan warga (pembuatan kerupuk)
- Gambar 5.1** Pemain *rudat* sedang latihan
- Gambar 5.2** Tahapan Pencapaian Output Kegiatan Pengelolaan Remitansi
- Gambar 5.3** Mekanisme Sosialisasi Pengelolaan Remitansi BMI

BAB I

REMITANSI BURUH MIGRAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH: SEBUAH PEMIKIRAN PENDAHULUAN

Paulus Rudolf Yuniarto

A. Pendahuluan

Sejak diterapkannya kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi tekanan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang terjadi telah berimplikasi luas dalam proses perkembangan pembangunan secara nasional maupun daerah. Dari praktik mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri ini, target terbesar dari pemerintah maupun tenaga kerja migran adalah mendatangkan devisa/pendapatan melalui kiriman uang ataupun barang (*remittances*) dari luar negeri ke daerah asal. Namun lebih jauh dari pandangan tersebut, devisa atau pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri diharapkan pula dapat turut membantu proses peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga migran, dapat menjadi modal untuk membuka usaha di daerah asal dan juga turut menjadi modal utama penggerak perekonomian serta pembangunan di daerah.

Sebagai satu kesatuan rangkaian sebab-akibat yang saling berkaitan—dalam kaitannya dengan masalah remitansi tenaga kerja migran dan pembangunan—terdapat beberapa persoalan yang perlu dipikirkan dan ditelaah lebih lanjut. Beberapa persoalan tersebut antara lain terkait dengan isu: (1) pemanfaatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama mengelola uang remitansi masyarakat pekerja migran dan keluarganya dalam ; (2) masalah potensi yang dimiliki oleh daerah setempat (termasuk di dalamnya potensi sumber daya sosial,

kultural, struktural ataupun potensi sumber daya alam) dan alternatif pengembangannya bagi perekonomian daerah; (3) dari potensi-potensi yang ada/dimiliki tersebut, lantas sejauh mana pengelolaan sistem tenaga kerja terpadu yang dibuat baik oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait dengan pemberdayaan tenaga kerja daerah setempat; (4) pembelajaran mengenai peluang (strategi) yang dimiliki/ digunakan oleh masyarakat (buruh migran dan NGO) maupun pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan remitansi dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

Bab pendahuluan pada buku ini akan mengetengahkan dua hal penting terkait persoalan di atas. Pertama, gambaran tekstual mengenai peruntukan remitansi buruh migran dan kaitannya dengan isu pembangunan di daerah. Kedua struktur berpikir tentang korelasi antara remitansi tenaga kerja migran memiliki keterkaitan erat bagi suatu pembangunan.

Dua hal tersebut merupakan pemikiran awal tentang seberapa besar pendapatan uang kiriman dari pekerja migran dan juga pemanfaatan uang remitansi memberikan pengaruh pada dinamika proses pembangunan di daerah asal. Hubungan antara dua variabel pengelolaan dan pemanfaatan tersebut secara sederhana dapat dilihat melalui bagaimana fungsi atau pemanfaatan remitansi itu bekerja.

Namun, dari sisi manfaat bagi pembangunan, pengelolaan remitansi yang selama ini diketahui dan dibedakan berdasarkan penggunaannya pada hal-hal yang bersifat konsumtif (pemenuhan kebutuhan mendasar keluarga), apakah memberi kontribusi bagi gerak pembangunan suatu daerah?

B. Perspektif Mengenai Remitansi Buruh Migran

1. Remitansi untuk Konsumsi dan Kebutuhan Sosial

Sebelum beranjak lebih jauh membahas mengenai isu remitansi, terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian secara umum mengenai remitansi, khususnya remitansi buruh migran. remitansi secara umum di pahami sebagai bentuk transfer, baik dalam bentuk *cash* atau sejenisnya dari seorang asing kepada sanak keluarga di negara asalnya (Addy, Wijkstrom & Thouez 2003: 5; World Bank, 2006: 3). Secara khusus, oleh World Bank *remittance* dikatakan sebagai suatu bentuk *transfer remittance* dan berlaku secara domestik maupun internasional. Remitansi (*remittance*) yang dimaksud dalam tulisan ini adalah dalam hal antarnegara, yaitu didefinisikan sebagai pembayaran lintas batas dari orang ke orang dengan besaran nilai yang relatif, yang dalam prakteknya, transfer uang kiriman tersebut dilakukan oleh para pekerja asing secara berulang kali. Misalnya, pengiriman uang setiap bulan kepada keluarga pekerja asing ke negara asal tempat pekerja asing tersebut berasal (World Bank 2006: 3).

Dalam pengertian yang diberikan oleh IMF, suatu bentuk remitansi dapat dimasukkan dalam tiga bentuk kategori, yaitu (1) remitansi pekerja atau transfer dalam bentuk tunai atau sejenisnya dari pekerja asing kepada keluarganya di kampung halaman (2) sebuah bentuk kompensasi terhadap pekerjaan atau pendapatan, gaji atau remunerasi dalam bentuk tunai atau sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang bekerja di negara lain secara resmi, dan (3) transfer uang seorang asing yang merujuk kepada transfer kapital dari aset keuangan yang dibuat orang asing tersebut selama perpindahannya dari satu negara ke lainnya dan tinggal lebih dari

satu tahun (Addy, Wijkstrom dan Thouez 2003:5)¹.

Berdasarkan bentuknya, Sorensen (2004:3-4) memilah remitansi menjadi dua.

- 1.) *Monetary remittances*, yaitu *remitansi* umumnya didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan buruh migran yang dikirim dari negara tujuan ke daerah asalnya. Walaupun remitansi dapat dalam bentuk barang, terminologi 'remitan' biasanya mengacu kepada transfer uang. Dalam banyak literatur, terminologi ini kemudian dipersempit mengacu pada remitansi berbentuk uang yang ditransfer ke keluarganya di kampung.
- 2.) *Social remittances*, lebih melihat kepada perubahan-perubahan yang terjadi karena proses migrasi yang tidak hanya berasal dari arus uang masuk, tetapi ada hal yang bersifat sosial seperti ide atau tingkah laku. Levit (1996:2) mendefinisikan *social remittance* sebagai ide, perbuatan, identitas dan *social capital* yang berasal dari negara tujuan. *Social remittance* dapat terjadi melalui transfer ilmu dari buruh migran, baik melalui surat atau bentuk komunikasi lain, termasuk telepon, faksimile, internet juga video. *Social remittance* ini dapat berpengaruh pada hubungan keluarga, peran gender, kelas, dan identitas kesukuan, politik, ekonomi, dan partisipasi keagamaan.

Dalam studi ini konsep remitansi yang akan digunakan lebih mengarah kepada uang yang dihasilkan oleh buruh migran, selama bekerja di luar negeri lebih dari satu tahun, baik yang dikirim melalui bank, pos, dititipkan kepada teman maupun yang dibawa langsung oleh buruh

1 Perlu diketengahkan dalam hal ini dampak strategis secara nasional dari suatu remitansi, yaitu 1) peningkatan devisa negara; 2) peningkatan keterampilan kerja; dan 3) pengurangan masalah pengangguran (Mantra, Kasnawi, dan Suhanmadi 1986; Mantra, dkk 1989: 82; Mantra 2000, dalam Nugroho 2006: 36).

migran ke kampungnya.

Remitansi buruh migran pada dasarnya mempunyai nilai paling tinggi pada sisi atau dimensi sosial ekonomi keluarga migran. Terutama sekali remitansi berupa uang kiriman yang di serahkan kepada keluarga untuk pemenuhan kebutuhan mendasar yang mereka perlukan. Ketika seorang buruh migran memutuskan bekerja di luar negeri, harapan terbesar adalah pendapatan yang diterima sebagian disisihkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Segala sesuatu dalam bentuk apapun kebutuhan itu, yang menjadi prioritas. Makna dari remitansi secara simbolis dalam hal ini dapat dianggap sebagai salah satu instrumen perubahan yang terkait dengan isu perbaikan tingkat ekonomi rumah tangga. Keluarga migran 'dalam banyak kasus' memiliki ketergantungan cukup besar terhadap remitansi. Artinya, ada semacam pengharapan yang cukup besar akan remitansi bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Buruh migran dan remitansi menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi rumah tangga migran. Bentuk-bentuk pembiayaan dalam rumah tangga, sangat mengandalkan bantuan dari anggota keluarga mereka yang bekerja di/ke luar negeri.

Fakta ini telah ditemukan dari hasil studi sebelumnya yang mulai dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2010. Fakta tersebut secara tidak langsung merupakan bukti empiris yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Di sejumlah desa di Kabupaten Lombok Timur, banyak ditemukan hasil pengiriman uang remitansi bagi rumah tangga keluarga migran dimanfaatkan untuk membangun rumah permanen, membeli alat-alat elektronik, dan biaya hidup sehari-hari.

Pembangunan rumah permanen adalah hasil nyata dari uang kiriman tenaga kerja di luar negeri. Perabotan yang ada di rumah mereka pun cukup lengkap, misalnya bufet, sofa, almari, tv, radio, telepon, kipas angin, antena parabola, kendaraan bermotor.

Banyak pula di antara mereka yang mempunyai kendaraan roda dua dan roda empat. Konon, pembangunan balai desa, jalan raya desa, gang, perbaikan got, dan perbaikan gedung pos kamling juga sering mendapat sumbangan dari orang-orang yang kebetulan sedang bekerja di luar negeri (PSDR, 2009).

Dari studi yang dilakukan, secara garis besar terdapat sebelas bentuk pengelolaan atau pemanfaatan uang kiriman remitansi yang dimanfaatkan oleh keluarga migran di Pulau Lombok, NTB, yaitu (1) membuat dan merenovasi rumah, (2) melunasi utang, (3) membiayai anak sekolah, (4) memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, (5) sebagai modal usaha, (6) membeli lahan pertanian, (7) membeli sepeda motor bagi yang memiliki kelebihan uang banyak, (8) bagi yang masih muda uang ditabung untuk biaya kawin, (9) membantu perekonomian keluarga, (10) modal *ngaro* atau menggarap sawah, dan (11) modal untuk menanam tembakau. Berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, sejumlah besar remitansi yang dikirim oleh migran berfungsi untuk menyokong kerabat/keluarga migran yang ada di daerah asal. Migran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengirimkan uang/barang untuk menyokong biaya hidup sehari-hari kerabat dan keluarganya, terutama untuk anak dan orang tua (PSDR 2009).

Menyimak model peruntukan remitansi yang dilakukan oleh migran menunjukkan bahwa sebagian besar remitansi TKI yang dikirim ke Indonesia ternyata digunakan untuk biaya konsumsi. Namun demikian, sebagian menyalurkan dana untuk membangun rumah, membayar biaya pendidikan dan lainnya. Beberapa kejadian di lapangan menunjukkan variasi yang berbeda-beda. Survei terhadap migran Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Sumbawa) yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu

di atas 2 tahun², remitansi TKI yang dikirim ke Indonesia sebagian besar digunakan pertama kali untuk membayar utang yang mereka gunakan untuk membiayai keberangkatannya mereka sebagai TKI. Namun, pada umumnya (84%) mayoritas para TKI menyebutkan peruntukan remitansi kemudian disisihkan untuk modal usaha, membeli lahan, membangun rumah, untuk tua dan lainnya.

Bila kita melakukan perbandingan dengan negara-negara yang juga melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, seperti Filipina, Malaysia dan Thailand, tampaknya tidak terlalu jauh berbeda. Sebagai gambaran umum, simulasi pemanfaatan remitansi yang berasal dari para pekerja migran asal Indonesia jika dibandingkan dengan pekerja Malaysia dan Filipina yang sama-sama bekerja di beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Proporsi Peruntukan Uang Kiriman

Negara Tempat Bekerja				
NEGARA ASAL	HONGKONG	JEPANG	MALAYSIA	SINGAPURA
INDONESIA	1. Tabungan (39%)	1. Pendidikan (43%)	1. Makanan (99%)	1. Makanan (87%)
	2. Pendidikan (36%)	2. Tabungan (40%)	2. Pakaian (98%)	2. Pakaian (66%)
	3. Bisnis (30%)	3. Makanan (34%)	3. Pendidikan (93%)	3. Pendidikan (47%)

² Dari 287 responden, 123 responden (42,85%) menjawab kurun waktu mereka bekerja sebagai BMI di luar negeri berada pada kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara yang menjawab rata-rata 1 hingga 2 tahun dan kurang dari 1 tahun masing-masing sebesar 71 responden (24,73%) dan 11 responden (3,8%). Lihat dalam (<http://www.bnptki.go.id/content/view/828/231/>).

MALAYSIA		1. Pendidikan (35%)		1. Makanan (90%)
		2. Makanan (30%)		2. Baju (66%)
		3. Tabungan (26%)		3. Rumah (49%)
FILIPINA	1. Makanan (78%)	1. Makanan (74%)	1. Makanan (92%)	1. Pendidikan (77%)
	2. Pendidikan (73%)	2. Pendidikan (57%)	2. Pendidikan (80%)	2. Makanan (75%)
	3. Pakaian (45%)	3. Pakaian (56%)	3. Pakaian (753%)	3. Rumah (50%)

Sumber: *Survei dari Kiriman Pekerja Asing*, Regional Technical Assistance No. 6212: Southeast Asia Workers Remittance Study, Asian Development Bank.

Tabel 1. 2 Rangking Proporsi Peruntukan Uang Kiriman

Urutan/ Negara	INDONESIA	MALAYSIA	FILIPINA
1	Makanan (72%)	Tabungan (81%)	Makanan (60%)
2	Rumah (55%)	Pendidikan (63%)	Pendidikan (57%)
3	Pendidikan (53%)	Makanan (62%)	Tabungan (49%)

Sumber: *Survei dari Kiriman Pekerja Asing*, Regional Technical Assistance No. 6212: Southeast Asia Workers Remittance Study, Asian Development Bank

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa potensi aliran remitansi yang masuk cenderung masih dimanfaatkan secara konsumtif sedangkan pemanfaatan dalam bentuk investasi yang memberikan tambahan pendapatan porsinya masih relatif rendah. Dampak remitansi terhadap pembangunan daerah cenderung terjadi pada skala kecil yang terakumulasi dalam rumah tangga

pekerja. Dampak dari remitansi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan peluang usaha dan alternatif pekerjaan serta peningkatan peluang kerja baru masih relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat diberdayakan baik oleh rumah tangga maupun pemerintah daerah. Aliran remitansi dapat memberikan peran yang nyata dalam pembentukan aset (akumulasi aset) dan menggerakkan pengembangan perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan potensi lokal dan mempertimbangkan remitansi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di desa asal migran.

Sebagian contoh di atas adalah bentuk pengharapan/ketergantungan keluarga migran yang diletakkan pada uang remitansi. Namun tidak hanya remitansi yang memiliki nilai ketergantungan. Secara antropologis, suatu remitansi buruh migran dapat pula dipandang sebagai bentuk upaya si pekerja dalam menjaga kelangsungan ikatan sosial ekonomi antara migran dengan keluarga mereka di daerah asal, meskipun secara geografis mereka terpisah jauh. Selain itu, migran terkait dengan remitansi yang dimiliki, baik secara moral maupun sosial, berkaitan dengan rasa tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga (Brettell 2000: 129)³. Tak hanya bernilai

3 Pemahaman yang lebih luas lagi, dapat dilihat dari kajian yang dilakukan oleh Osaki (2003: 1-2) yang dalam analisisnya mengenai *Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm?* memberikan gambaran lebih lengkap. Pengiriman uang oleh migran kepada keluarganya merupakan kegiatan yang rutin dilakukan dan merupakan sifat masyarakat Thailand yang selalu mementingkan kepentingan keluarga (*family oriented*). Pengiriman uang ini memungkinkan para *out migrant* untuk memelihara hubungan personal dengan anggota keluarga mereka dalam jangka waktu yang lama. Namun, pada waktu yang bersamaan, migrasi internasional menjadi tujuan efektif rumah tangga yang berpendapatan rendah untuk menanggulangi kekurangan pendapatan secara cepat. Segala kebutuhan bagi para rumah tangga miskin sangat sulit diperoleh tanpa adanya pengiriman uang dari anggota keluarga mereka

ekonomis rasional bagi rumah tangga, remitansi pada dimensi sosial yang lebih luas sebenarnya mempunyai implikasi pada pola perubahan perilaku dan gaya hidup, termasuk berpengaruh pada perubahan orientasi hidup yang bercorak "materialistis"⁴.

Selain itu, remitansi juga digunakan untuk peringatan hari-hari besar. Seorang migran juga berusaha untuk dapat pulang ke daerah asal pada saat diadakan peringatan hari-hari besar keagamaan dan acara yang berhubungan dengan keluarga, misalnya kelahiran, perkawinan, dan kematian. Alur remitansi tidak hanya untuk individu keluarga tertentu saja, tetapi ada juga remitansi yang dipakai untuk menjalankan siklus reproduksi sosial-budaya, misalnya upacara yang berhubungan dengan siklus hidup (*life cycle*) manusia. Adapun yang terakhir walaupun masih kecil pemanfaatannya ada juga yang dilakukan untuk berinvestasi. Bentuk investasinya adalah perbaikan dan pembangunan perumahan, membeli tanah, mendirikan masjid, mendirikan usaha kecil, dan lain-lain. Kegiatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan budaya dalam menjaga kelangsungan hidup di daerah asal dan bersifat psikologis karena berkaitan erat dengan *prestise* seseorang.

yang melakukan *out migrant*. Dari perspektif makro, pengiriman uang memberikan kontribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan pada rumah tangga yang anggota keluarganya menjadi migran internasional. Selain itu, remitansi berdampak terhadap peningkatan devisa negara, peningkatan nilai tukar mata uang, dan peningkatan *balance of payment*.

⁴ Sebelum menjadi buruh migran, biasanya buruh masih hidup dengan nilai kesederhanaan. Setelah bermigrasi, buruh migran mengalami perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan baru tempat mereka tinggal. Pelaksanaan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepatuhan kepada adat istiadat mulai memudar. Mereka juga banyak berubah dalam penampilan seperti pola berpakaian, dialek berbahasa, mengenal dan menggunakan teknologi dan modernisme rumah. Dengan perubahan penampilan tersebut buruh migran menunjukkan citra diri mereka agar status sosial mereka meningkat. Perubahan yang dibawa buruh migran tersebut tidak selalu positif akan tetapi ada sisi negatif.

1. Remitansi Buruh Migran untuk Pembangunan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa remitansi merupakan salah satu sumber modal yang potensial untuk pembangunan tidak hanya pembangunan nasional akan tetapi juga di tingkat lokal. Jumlah remitansi yang dikirim oleh tenaga kerja migran cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 jumlah remitansi yang dikirim ke Provinsi NTB mencapai 316,5 miliar rupiah dan jumlah tersebut cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga pada tahun 2008 jumlah remitansi 533,1 miliar rupiah dan pada bulan Maret 2009 telah mencapai 104 miliar rupiah. Sebagian besar remitansi tersebut berasal dari Malaysia dan Saudi Arabia di mana sebagian besar TKI dari Kabupaten Lombok bermigrasi ke negara tersebut. Kedua negara memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja tak terdidik yang sesuai dengan pendidikan TKI asal Kabupaten Lombok. Tidak banyak TKI dari Lombok Timur yang bermigrasi ke negara-negara maju karena mensyaratkan tingkat pendidikan yang cukup tinggi biasanya setara SLTA (PSDR 2009)⁵.

5 Rekapitulasi remitansi berdasarkan daerah tujuan remitansi baru dilakukan oleh Bank Indonesia Mataram pada tahun 2009. Data remitansi sebelumnya disajikan berdasarkan negara asal pengiriman. Rekapitulasi data berdasarkan remitansi yang dikirim ke bank di kabupaten setempat. Dari Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa jumlah remitansi terbesar ditujukan ke Kota Mataram/Kab Lombok Barat karena sebagian besar remitansi dikirim melalui beberapa bank yang berkantor cabang di kota tersebut sehingga data tersebut belum dapat mewakili jumlah remitansi yang sesungguhnya dikirim ke suatu daerah. Beberapa keluarga migran memiliki rekening bank di daerah lain, terutama di Kota Mataram meskipun domisilinya di kabupaten lainnya. Data remitansi yang ditujukan ke Kabupaten Lombok Timur hanya sebesar 1,6 miliar rupiah, padahal Lombok Timur paling banyak mengirimkan TKI ke luar negeri (PSDR, 2009).

Tabel 1.3 Data Remitansi TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001–2009

Tahun	Penempatan TKI di LN	Remitan
2001	32.089	316.513.743.917
2002	39.454	329.432.686.505
2003	31.591	479.129.938.380
2004	23.954	457.961.647.177
2005	42.067	400.311.152.083
2006	43.936	435.508.313.407
2007	42.134	683.961.767.545
2008	32.832	533.115.857.930
2009 (Maret)	12.818	104056.367.689
2010 (Mei)	39.661	229.654.811927

Sumber: Bank Indonesia Mataram, Mei 2009

Tabel 1.4 Remitansi TKI per Kabupaten di Provinsi NTB Bulan Januari–April 2009

Kabupaten/Kota	Total
Kota Mataram / Kab Lombok Barat	138.006.944.27351
Kab Lombok Tengah	3.576.229.598.15
Kab Lombok Timur	1.566.239.521.00
Kab Sumbawa	56611.447.574.30
Kab Bima	18.716.289.630.00
Kab Dompu	809.478.751.55
TOTAL	219.286.629.348.51

Sumber: Disnaker NTB

Carling (2004: 10) dalam pengantar bukunya *Policy Options for Increasing the Benefits of Remittances* menganalisis landasan kebijakan yang berhubungan dengan remitansi untuk membentuk model sederhana dari hubungan remitansi dengan pembangunan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara remitansi dengan pembangunan. Jika remitansi digunakan untuk konsumsi sekarang, maka untuk konsumsi yang akan datang menggunakan remitansi pada masa yang akan datang. Jika sebagian remitansi ditabung pada lembaga keuangan formal maka remitansi tersebut dapat digunakan sebagai pinjaman bagi investor untuk investasi. Kesimpulannya, kondisi ini akan berdampak positif terhadap pembangunan.

Sementara itu Curson (1981: 66) mengungkapkan bahwa dampak remitansi terhadap keluarga serta masyarakat penerimanya menunjukkan sifatnya yang kompleks. Secara garis besar ada tiga dampak remitansi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat penerimanya. *Pertama*, ketergantungan ekonomi. Alur remitansi tidak hanya untuk individu keluarga tertentu saja, tetapi dalam banyak kasus pengiriman remitansi diperuntukkan menjalankan siklus reproduksi sosial-budaya, misalnya kegiatan upacara (kelahiran, perkawinan dan kematian) ataupun pengembangan sarana dan prasarana suatu daerah. Pada saat itulah jumlah remitansi yang dikirim lebih besar daripada untuk pengiriman kebutuhan biasanya. *Kedua*, terjadi perubahan sosial. Ada anggapan bahwa remitansi adalah suatu kekuatan positif yang mampu membuat perubahan di daerah perdesaan, seperti meningkatkan pendapatan per kapita, merupakan investasi, dan mampu meningkatkan mobilitas sosial masyarakat setempat. *Ketiga*, memberi dampak sosial lain seperti perubahan perilaku dan gaya hidup, perubahan orientasi hidup yang lebih "materialistis", dan lain-lain

Persoalan remitansi dan pembangunan yang terjadi di Pulau Lombok tampaknya menunjukkan signifikansi karakter yang hampir sama dengan uraian konsep di atas. Sebagai contoh, remitansi atau kiriman uang dari buruh migran asal NTB yang bekerja di sejumlah negara selama tahun 2008 diperkirakan mencapai jumlah Rp800 miliar, jauh melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah ini yang hanya sebesar Rp325 miliar (<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/828/231/>). Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) kota Mataram Nusa Tenggara Barat menilai bahwa program penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini merupakan salah satu solusi alternatif yang cepat dan tepat untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di NTB yang hingga tahun 2008 mencapai angka 1,08 juta orang. Penilaian tersebut berasal dari angka remitansi yang secara signifikan dianggap mampu mengatasi persoalan kemiskinan di desa-desa miskin NTB.

Secara umum, gambaran remitansi dapat pula disimak dari sejumlah kiriman uang para BMI asal NTB kepada keluarganya melalui tiga bank, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, dan BCA hingga bulan Mei selama tahun 2010 yang mencapai Rp229.654.811.927,87, sedangkan sisanya dikirim melalui PT Pos Indonesia dan perusahaan jasa lain yang khusus menangani pengiriman uang serta yang dititip melalui teman BMI yang kembali ke tanah air. Berdasar perhitungan kasar, jika rata-rata satu orang BMI mengirim uang Rp20 juta pertahun, jumlah remitansi bisa mencapai Rp1 triliun per tahun. Kiriman uang ini merupakan devisa terbesar yang masuk ke NTB dan langsung dinikmati masyarakat. BP3TKI NTB menyebutkan pendapatan kumulatif tersebut didapat jika kiriman berjalan normal dari jumlah BMI NTB yang bekerja di luar negeri hingga Mei selama tahun 2010 yang telah mencapai 39.661 orang. Dari jumlah tenaga kerja tersebut terbanyak bekerja di perusahaan perkebunan kelapa

sawit di Malaysia dan menjadi penata laksana rumah tangga (PLRT) atau pembantu rumah tangga (PRT) di Arab Saudi. Selain itu, ada pula yang bekerja di pabrik-pabrik kawasan Asia Pasifik.

Survei terhadap migran Nusa Tenggara Barat (Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa) yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu di atas 2 tahun⁶ menunjukkan bahwa remitansi yang dikirim ke Indonesia sebagian besar digunakan pertama kali untuk membayar utang. Transaksi peminjaman uang yang kemudian menjadi utang kerap kali terjadi ketika calon BMI akan berangkat ke luar negeri. Segala prosedur penempatan yang dijalani membutuhkan biaya yang belum tentu dimiliki oleh calon BMI. Solusinya adalah mencari pinjaman dan dibayar setelah mereka bekerja, kemudian uang gaji dikirimkan untuk membayarnya. Adakalanya peruntukan uang kiriman tahap pertama memang untuk melunasi utang semata. Dengan demikian ketika kiriman berikutnya terlambat datang, keluarga yang ditinggalkan dapat meminjam uang lagi untuk biaya hidup sehari-hari atau terlibat utang dengan toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Aktifitas ini menyebabkan keluarga migran terus terjerat utang, dan peruntukan remitansi menjadi tidak produktif. Bagi keluarga migran yang lainnya adapula yang mampu menyisihkan uang kiriman tersebut untuk modal usaha, membeli lahan, membangun rumah, untuk orang tua dan sebagainya (<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/828/231/>).

6 Dari hasil survei BNP2TKI menunjukkan bahwa dari 287 responden, diketahui sekitar 84% keluarga BMI telah memikirkan uang kiriman untuk modal usaha, membeli lahan, kemudian sekitar 42,85% uang buat modal usaha baru disisihkan ketika masa kerja berlangsung dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara ini yang menjawab rata-rata 1 hingga 2 tahun dan kurang dari 1 tahun masing-masing sebesar 71 responden (24,73%) dan 11 responden (3,8%) (<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/828/231/>).

Selama ini berbagai penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa remitansi pekerja migran sebagian besar dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumsi seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membangun rumah, membeli barang elektronik serta membayar utang. Sangat sedikit remitansi yang digunakan sebagai modal usaha. Dalam hal ini faktor sosial budaya juga berpengaruh dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Lombok Timur 'seolah-olah' tidak berbakat sebagai wirausaha. Bahkan memuat informan ada stereotipe bahwa uang dari Malaysia ataupun dari Saudi Arabia tidak akan berkembang jika digunakan untuk usaha dan hanya dapat berhasil jika diinvestasikan di sektor pertanian. Stereotipe ini muncul sebagai akibat dari kegagalan mantan TKI dalam merintis usaha. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk memberdayakan TKI dan keluarganya agar mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia serta tidak lagi tergantung pada negara lain (PSDR 2009).

Pada kenyataannya, penanganan atau pembinaan terhadap mantan TKI untuk dapat memiliki usaha mandiri telah gagal dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB. Hal senada dipertegas oleh Bapak Komang, Ketua BP3TKI Mataram, bahwa penanganan mantan TKI dan keluarganya dalam arti pemberdayaan ekonomi selama ini kenyataannya belum dilakukan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih terfokus pada kebijakan dan strategi pengiriman TKI ke luar negeri sebagai solusi utama kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja. Padahal strategi tersebut sebenarnya tidak efektif sebagai strategi pembangunan jangka panjang, dan justru akan menciptakan adanya ketergantungan pembangunan daerah terhadap sektor luar negeri seperti yang dikemukakan oleh 'kaum

pesimis⁷. Ketidakmampuan pemerintah dalam pembinaan mantan pekerja migran bersama dengan keluarganya dalam pengelolaan remitansi yang diperoleh hanya akan mendorong terjadinya migrasi TKI terus menerus.

Penelitian yang dilakukan oleh The Foundation for Development Cooperation (2007) tentang potensi pemanfaatan remitansi di beberapa negara termasuk Indonesia memberikan kesimpulan bahwa remitansi dapat digunakan sebagai modal pendirian lembaga keuangan mikro. remitansi dapat secara langsung berdampak pada berkembangnya UMKM dengan memanfaatkan uang remitansi sebagai sumber modal melalui lembaga keuangan mikro yang telah dibentuk. Beberapa penelitian yang telah dilakukan di luar negeri, remitansi yang dikirimkan oleh pekerja migran ke daerah asal memberikan dampak positif terhadap pembangunan. remitansi para migran Meksiko di Amerika Serikat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Pengelolaan dilakukan secara profesional di mana ada organisasi yang menjembatani antara migran Meksiko dan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidenborg (2007), remitansi yang dikirim oleh pekerja migran El Savador yang sebagian besar bekerja di negara Costa Rica, Mexico, Belize, dan US. remitansi tersebut berpotensi besar sebagai modal dalam pendirian lembaga keuangan mikro yang bergerak dibidang pembiayaan perumahan. Permintaan akan rumah di daerah asal diharapkan dapat dipenuhi oleh adanya lembaga keuangan mikro yang modalnya berasal dari remitansi tersebut. Model pemanfaatan remitansi tersebut memberikan

7 Dalam pandangan kaum pesimis, *return migrant* dapat dianggap sebagai agen perubahan, investor maupun inovator. Baik *remittance*, keterampilan maupun pengetahuan yang diperoleh oleh migran ketika bekerja di luar negeri diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah asalnya (Haas, 2007:3)

keuntungan bagi pekerja migran maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan kredit perumahan (PSDR 2009).

C. Paradigma Tentang Remitansi Buruh Migran untuk Pembangunan?

Pada tahun 1950-an dan 1960-an (pada saat era pembangunan dunia) negara-negara di daerah miskin dan berkembang memanfaatkan momentum industrialisasi motor pembangunan di negara-negara maju dengan mendorong emigrasi tenaga kerja sebagai alat dari pembangunan. Di sini, para *developmentalist* berpikir bahwa migrasi menyebabkan terjadinya transfer modal investasi dan memengaruhi terjadinya masyarakat tradisional lebih liberal, berpikir rasional, dan demokratis serta mempunyai pengetahuan modern dan meningkatkan pendidikan. Dalam pandangan para *developmentalist*, *return migrant* kemudian di anggap sebagai agen perubahan, investor, maupun inovator. *Remittance*, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh oleh migran di harapkan dapat berkontribusi pada pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah asalnya (Haas 2007:3).

Di sisi yang lain, kaum neoklasik melihat migrasi tenaga kerja disebabkan terjadinya perbedaan suplai tenaga kerja sehingga terjadi migrasi tenaga kerja dari daerah yang surplus tenaga kerja ke daerah yang kurang tenaga kerja. Perpindahan tenaga kerja tersebut akan menyebabkan terjadinya persamaan upah di antara kedua daerah tersebut. Pandangan semacam ini di ketengahkan oleh Todaro (1969) yang melihat proses migrasi tenaga kerja dari perdesaan (daerah pertanian) ke perkotaan (daerah industri) sebagai prasyarat terjadinya pertumbuhan ekonomi dan hal tersebut merupakan bagian integral dari proses pembangunan (Haas 2007:3). Pandangan

lain, Massey *et. al* (1993) melihat migrasi tenaga kerja sebagai upaya rumah tangga untuk meningkatkan pendapatannya secara absolut secara relatif dibandingkan dengan kelompoknya (Brettel 2000: 10). Dilihat dari prespektif makro, remitansi berdampak pada meningkatnya nilai tukar mata uang negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri. Ratha (2003) menyatakan bahwa remitansi merupakan *stable source of foreign exchange* di negara-negara berkembang pada tahun 1990an. Selain itu, remitansi pekerja migran berdampak positif terhadap neraca pembayaran di beberapa negara. Gedhesi dkk. (2003) di Albania, remitansi menjadi sumber utama untuk menutupi terjadinya defisit perdagangan luar negeri pada tahun 1998⁸.

Dalam kaitannya kontribusi migrasi internasional tenaga kerja dan remitansi dalam pembangunan dapat dilihat dari tiga prespektif yakni *Household level* (tingkat rumah tangga), *community level* (tingkat masyarakat) dan *macro level* (tingkat nasional) (Haas 2007; Capistrano dan Maria 2006). Di tingkat rumah tangga, dampak remitansi terhadap rumah tangga dapat diketahui secara jelas. Sebagian besar remitansi yang diperoleh oleh pekerja migran digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk sandang, pangan, dan papan. Setelah hal tersebut terpenuhi, remitansi dimanfaatkan untuk pendidikan anak serta untuk membeli barang-barang elektronik (Wirawan 2007; Firdausy 2005, dan Mantra dkk. 1999: 66). Meskipun secara langsung remitansi bermanfaat terhadap pekerja migran dan keluarganya, tetapi remitansi juga dapat memberikan keuntungan

8 Tidak jauh berbeda dengan para *developmentalist* yang berpendapat bahwa migrasi tenaga kerja ke luar negeri akan berdampak positif terhadap pembangunan. Pemerintah Indonesia melaksanakan pengiriman TKI ke LN sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran. Hal tersebut dikarenakan strategi pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum berhasil memperluas lapangan kerja khususnya di daerah perdesaan sehingga pengiriman TKI ke luar negeri merupakan solusi cepat untuk mengurangi tingkat pengangguran.

bagi keluarga nonmigran. Dalam hal ini, remitansi menimbulkan *multiplier* efek terhadap perekonomian masyarakat di sekitarnya. remitansi dapat dimanfaatkan untuk mendirikan usaha bagi keluarga maupun masyarakatnya serta dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, pusat kesehatan dan lain-lain. Woodruff dan Zenteno (2001) menemukan bahwa remitansi berdampak pada berkembangnya UMKM di 44 daerah perkotaan di Meksiko (Capistrano dan Maria 2006).

Dari beberapa pandangan di atas, muncul pertanyaan baru terkait dengan masalah remitansi buruh migran, yaitu apakah remitansi mempunyai kontribusi yang besar bagi pembangunan terutama pembangunan di daerah pengirim tenaga kerja? Hal ini terutama karena di daerah-daerah yang menjadi kantong pengiriman tenaga kerja nyatanya merupakan daerah yang relatif kurang terjadi proses pembangunan sosial dan ekonomi. Dasar pertanyaan tersebut yang menjadi kerangka berpikir dalam mengidentifikasi potensi remitansi yang berasal dari pekerja migran dan pemanfaatannya di daerah asal dengan memerhatikan karakteristik rumah tangganya. Pergerakan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja migran yang sifatnya temporer sudah terbukti memberikan pengaruh yang sangat terbesar terhadap perekonomian keluarga. Dampak tersebut secara nyata dapat dilihat dari adanya transfer kapital, yaitu dari pekerja migran ke keluarga dalam bentuk remitansi. Buruh migran dan anggota keluarga yang masih tinggal di desa merupakan satu kesatuan ekonomi karena itu fungsi remitansi sebagai bagian dari kehidupan ekonomi rumah tangga pedesaan sangat erat berkaitan.

Namun, di sisi yang lain paradigma pengelolaan remitansi ternyata masih bersifat pragmatis pula. Artinya jumlah remitansi yang besar peruntukannya masih banyak dipergunakan oleh masyarakat penerima remitansi untuk kepentingan konsumsi dan kebutuhan

mendasar lainnya (subsisten). Lantas bagaimana dampaknya bagi pembangunan?

Dampak penggunaan remitansi untuk pembangunan ini menjadi satu isu yang dapat diperdebatkan dalam konteks kebijakan pembangunan. Bahkan, keterkaitan antara migrasi dan remitansi ini dianggap sebagai bentuk penyesuaian ekonomi yang sebenarnya terhadap kelompok miskin dalam sebuah negara. Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa remitansi yang diperoleh para pekerja migran, umumnya dikirimkan ke desa asal, diharapkan dapat menjadi penghasilan yang bisa diinvestasikan dan digunakan ketika mereka kembali, sehingga mampu meningkatkan status mereka di dalam masyarakatnya (Mukbar 2010: 9).

Remitan memiliki dampak positif di tataran ekonomi lokal (meningkatkan konsumsi, membawa peningkatan permintaan barang dan jenis pekerjaan lainnya). Lopez-Cordoba dan Olmedo (2006:18-19 dalam Mukbar 2010: 9) berargumentasi bahwa "Remitan membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan, menurunkan angka kematian, dan meningkatkan pencapaian tingkat pendidikan. Remitansi dapat digunakan sebagai bentuk investasi dalam proses produksi yang menguntungkan. Hal itu pun membuktikan mengenai hubungan positif antara remitansi dan bentuk investasi. Rumah tangga menerima remitansi, sebagian kecil digunakan untuk konsumsi, dan sebagian besar lagi diinvestasikan, khususnya untuk investasi sosial, seperti pendidikan dan perumahan (Mukbar 2010: 9). Manfaat positif remitansi dipergunakan antara lain untuk memenuhi biaya sekolah, membiayai fasilitas pendidikan, kesehatan, konsumsi, dan yang paling penting uang kiriman dapat membantu mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Dampak negatifnya dari remitansi itu sendiri yaitu munculnya sifat konsumerisme yang berlebihan dan tekanan inflasi (*inflationary pressure*).

Pengaruh positif juga ditemukan antara penghasilan migran dan remitansi (Wiyono1994). Semakin besar penghasilan migran maka akan semakin besar remitansi yang dikirimkan ke daerah asal. Besarnya remitansi juga tergantung pada hubungan migran dengan keluarga penerima remitansi di daerah asal. Keluarga di daerah asal dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu keluarga inti (batih) yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak, serta keluarga di luar keluarga inti. Dalam konteks ini, Mantra (1994) mengemukakan bahwa remitansi akan lebih besar jika keluarga penerima remitansi di daerah asal adalah keluarga inti. Sebaliknya, remitansi akan lebih kecil jika keluarga penerima remitansi di daerah asal bukan keluarga inti.

Di sisi yang lain, terutama pada masyarakat desa dampak remitansi ternyata sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena remitansi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan mereka karena sebagian besar keluarga yang tinggal di desa sangat menggantungkan kehidupan dari remitansi.

Dampak itu terlihat antara lain dalam perubahan ekonomi keluarga dan desa, perubahan gaya hidup, pola pengasuhan anak, serta tenaga kerja yang ada di desa. Motif ekonomi merupakan alasan utama penduduk dalam melakukan pengiriman remitansi. Para migran melakukan hal ini karena pada dasarnya walaupun mereka berusaha di kota atau di luar negeri tetapi keluarga di desa tetap merupakan satu kesatuan ekonomi. Pengiriman remitansi selain untuk keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan kesehatan, juga digunakan untuk pembangunan rumah, membeli perabotan, alat elektronik, dan investasi di desa.

Dilihat melalui perspektif ekonomi, di desa-desa migran telah terjadi peningkatan dan kemajuan. Hal itu terlihat dengan terjaminnya

kehidupan ekonomi mereka dan secara fisik terlihat dari kondisi rumah beserta perabotan yang ada di dalamnya. Bentuk rumah semakin bagus, dilihat dari bentuk dan bahan yang dipergunakan serta pengecatannya. Perabotan yang ada di rumah juga cukup lengkap, misalnya bufet, sofa, almari, tv, radio, telepon, kipas angin, antena parabola, bahkan kendaraan bermotor. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah mempunyai kendaraan roda empat.

Meningkatnya remitansi untuk kemajuan ekonomi keluarga juga berdampak pada kemajuan desa karena pada kenyataannya mereka juga menyumbangkan untuk keperluan pembangunan desa. Besarnya remitansi untuk pembangunan desa memang sulit diukur secara statistik tetapi tampak nyata pada pembangunan sarana fisik di desa. Pembangunan balai desa, jalan raya desa, gang, perbaikan got, dan perbaikan gedung pos kamling adalah bentuk sumbangan yang telah diberikan oleh para migran. Dalam hal pembayaran pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan, serta pajak yang lainnya dapat dilunasi penduduk secara baik dan teratur. Penarikannya tergolong lancar asalkan pada saat penarikan mereka sedang berada di rumah. Peningkatan perekonomian penduduk berpengaruh juga terhadap perilaku sosial masyarakat.

D. Penutup

Kebijakan pengiriman TKI sebagai solusi sementara dalam mengatasi keterbatasan lapangan kerja di daerah, pada kenyataannya tidak dibarengi dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan keluarganya. Pemerintah daerah lebih mementingkan strategi perekrutan dan penempatan TKI ke negara tertentu, termasuk upaya perlindungan dan pencegahan pengiriman TKI ilegal. Akan tetapi, penanganan TKI yang telah kembali beserta keluarganya

belum dilakukan secara serius. Padahal uang kiriman (remitansi) kepada keluarga dapat dikelola sebagian untuk investasi usaha.

Fungsi remitansi dalam kehidupan masyarakat setempat ternyata dapat bermacam-macam tergantung pada paradigma pemanfaatan remitansi yang berpijak pada pengumpulan materi atau lebih memerhatikan orientasi ke masa depan. Dalam perspektif perubahan sosial terkait dengan pemanfaatan *remittance*, remitansi seharusnya dipandang sebagai suatu instrumen yang dapat memperbaiki keseimbangan pembayaran (konsumsi), dan merangsang tabungan dan investasi di daerah asal. Oleh karenanya, dapat dikemukakan bahwa remitansi menjadi komponen penting dalam mengaitkan mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di daerah asal. Artinya, pola pengelolaan remitansi bergerak tidak hanya pada sisi konsumsi, tetapi juga pada wilayah reproduksi pembangunan sosial ke masyarakat.

Banyaknya remitansi yang mengalir ke desa ternyata membawa dampak tersendiri baik secara positif maupun negatif. Agar fungsi remitansi dalam kehidupan masyarakat setempat dapat bermanfaat secara maksimal perlu dilakukan suatu penelitian yang melihat pemerintah dan masyarakat melakukan pengelolaan remitansi tidak hanya berpijak pada pengumpulan materi saja tetapi lebih memerhatikan orientasi ke masa depan. Peningkatan ekonomi sebaiknya juga disertai dengan kesadaran akan pentingnya masa depan hidup. Pemerintah dan masyarakat setempat perlu menciptakan suatu usaha (padat karya) agar remitansi tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Pemerintah dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk mampu menjadi *entrepreneurship* dalam skala kecil. Pembangunan UMKM untuk kasus masyarakat NTB memang membutuhkan penanganan yang serius dan koordinasi antarinstansi terkait. Bagaimanapun UMKM telah membuktikan mampu menjadi

tiang bagi kekuatan perekonomian negara ketika krisis ekonomi terjadi. Pasang surut atas aktivitas usaha memang tidak dapat dihindari, namun kebertahanan atas usaha tersebut masih mungkin untuk diwujudkan. Masyarakat NTB yang kurang berani menghadapi kegagalan membutuhkan dukungan untuk menjalankan usahanya. Dengan demikian, diharapkan minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri akan berkurang.

Daftar Pustaka

- Addy, D.N., Wijkstrom, B. dan C. Thouez. 2003. "Migrant Remittances-Country of Origin Experiences: Developmental Impact and Future Prospect." International Conference on Migrant Remittance, London, 9-10 Oktober 2003.
- Asian Development Bank. 2006. Regional Technical Assistance No. 6212: South East Asia Workers Remittance Study, Workers' Remittance Flows in Southeast Asia, Asian Development Bank Report 2006, Publication No. 011806.
- BNP2TKI. 2009. "Remittance TKI NTB Capai Rp 800 Miliar." (<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/828/231/>), diakses tanggal 9 Januari 2009).
- Brettell, Caroline. B. 2000. "Theorizing Migration in Anthropology. The Social Construction of Network, Identities, Communities and Globalscapes". in Brettel & Holified. *Migration Theory. Talking Across Discipline*. Routledge NY&London
- Carling, J. 2004. "Policy Options for Increasing the Benefits of Remittances". (<http://www.gdrc.org>).
- Connell, J. 1983. "Migration, employment and development in the South Pacific". Commission, Noumea, Tonga.
- Curson. 1983. *Mobilitas Penduduk dan Remitansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Dikutip oleh Junaidi (<http://researchengines.com/0107junaidi3.html>).
- Curson, Peter. 1981. "Population Geography". *A Journal of Association of Population Geographer of India*, Volume 3.
- Effendi, Tadjuddin Noer dan Helmut Weber. (ed). 1993. *Industrialisasi di Pedesaan Jawa*. Jakarta, Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta dengan Friedrich Ebert Stiftung, Goethe Institute. Hasil Survei Nasional Pola remitansi TKI di Nusa Tenggara Barat. www.bi.go.id/NR/rdonlyres/72CC7D6F-3C6C-47F7-9958-489C662FDDF1/14029/Boks1SurveiTKI.pdf
- Hugo, Graeme J. 1978. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Lee, E. S. 1987. *Suatu Teori Migrasi*. Terjemahan. Yogyakarta PPK-Universitas Gajah Mada.
- Loveband, Anne. 2003 "Positioning he Product: Indonesian Migrant Women Workers in ContemporaryTaiwan." SEARC Working Paper Series, No. 43 April 2003, http://www.cityu.edu.hk/searc/WP43_03_Loveband.pdf
- Lucas, Robert E. B. dan Oded Stark. 1985. "Motivations to Remit: Evidence from Botswana." *Journal of Political Economy*, 93 (October): 90–18.
- Mantra, IB. 1994. "Mobilitas Sirkuler dan Pembangunan Daerah Asal" *Warta Demografi*, FE UI.
- Mukbar, Deni. 2010. "Perdesaan, Migrasi dn Perubahan Penghidupan1: Sebuah Kajian Literatur". *Working Paper*. Bandung: Akatiga.
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumberdaya Manusia: dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Osaki, K. 2003. "Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm?" *Journal of Population Research*, 20 (2): 203–204.
- Ratha, D., Mahopatra, S. , K.M Vijayalaksmi, dan Zhimer X. 2007. "Remittance Trends 2007." Migration and Development Brief 3, Development Prospects Group, Migration and Remittances Team, Wold Bank Report, 29/11/2007.
- Rempel, Henry, dan Richard A. Lobdell. 1978. "The Role of Urban-to-Rural Remittances in Rural Development." *Journal of Development Studies*, 14 (April): 324–41.
- Sukamdi, Satriawan dan Harris. 2005. "Impact of Remittances on Indonesia Economy". Dalam Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin (Ed.). *International Migration in Southeast Asia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Syahrani, C. 2007. Country Report on Migrant Woment Workers in Indonesian. (<http://www.migrationinformation.org>).
- T.F Committee on Payment Settlement Systems, General Principles

for International Remittance Services. 2006. The World Bank Consultative Report, March 2006.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2008. "*Buruh migran, Pemuda dan Gerakan Sosial Kritis di Perkotaan: Advokasi Buruh Migran di Mataram Lombok dan Transnasional Advocay Network*". Makalah seminar hasil akhir penelitian PMB-LIPI. Tidak diterbitkan.

Wiyono, Nur Hadi. 1994. "Mobilitas Penduduk dan Revolusi Tranportasi", *Warta Demografi*, No. 3, Jakarta.

BAB II
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN, BURUH MIGRAN,
DAN PENGELOLAAN REMITANSI DI NUSA TENGGARA
BARAT

Siswanto

A. Pendahuluan

Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan lapangan kerja bagi warganya, tetapi belum mampu menyediakan kesempatan kerja tersebut. Angka pengangguran di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Di lain pihak, pasar tenaga kerja di luar negeri memberi peluang besar kepada masyarakat Indonesia yang ingin mengadu untung menjadi buruh migran di negara-negara kawasan Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Bagi Pemerintah Indonesia, hal ini sesuatu yang menguntungkan karena telah mengurangi beban yang berat, yaitu menyediakan lapangan kerja.

Kebijakan penempatan TKI di luar negeri mempunyai landasan konstitusional dan yuridis. Landasan Konstitusional itu merujuk pada Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945. Isi pasal tersebut menyatakan bahwa negara menjamin hak dasar warga negara yang salah satunya adalah hak memperoleh pekerjaan. Negara juga memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut. Ketika belum mampu menyiapkan lapangan pekerjaan di dalam negeri, pemerintah untuk sementara menetapkan kebijakan, yaitu membuka kesempatan bagi warganya untuk bekerja di luar negeri. Selanjutnya, secara yuridis hal itu merujuk pada Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juga menyatakan bahwa warga negara berhak memilih pekerjaan yang disukai. Pemerintah harus mempertimbangkan hak dasar

warga negara untuk memilih pekerjaan yang disukai. Hal ini meliputi aspek jenis pekerjaan ataupun lokasi pekerjaan yang diminatinya. Ketika warganya memilih bekerja di luar negeri, pemerintah harus memenuhinya karena merupakan hak azasinya yang dijamin oleh undang-undang. Lebih dari itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu dan melindungi warganya yang akan, sedang, dan setelah bekerja di luar negeri sebagai buruh migran.

Kebijakan penempatan TKI di luar negeri dimulai pada era Orde Baru. Pada tahun 1969 Departemen Perburuhan mengatur soal penempatan TKI di luar negeri. Hal ini disusul oleh, PP No. 4 Tahun 1970 yang substansinya mengatur soal Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN). Sejak kebijakan ini, swasta mulai dilibatkan dalam program penempatan tenaga kerja di luar negeri. Keberadaan TKI dipandang sebagai komoditas yang perlu digali potensinya. Sebagai komoditi tentu saja memiliki potensi ekonomi yang dapat memberi sumbangsih kepada program pembangunan. Tenaga kerja yang membludak semula dilihat sebagai beban, namun dengan perspektif AKAN dipandang sebagai komodias yang menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan memberangkatkan mereka ke luar negeri dan menerima kepulangan mereka dengan devisa.

Orde Baru menempuh kebijakan liberalisasi sektor ketenagakerjaan. Pemerintah ingin mengurangi beban atau tanggung awabnyadengancaraberbagittanggungjawabtersebutdengankalangan swasta. Di lain pihak, para pengusaha melihat pemberangkatan TKI ke luar negeri atau membuka jasa pemberangkatan buruh migran merupakan peluang usaha yang menguntungkan. Sejak saat itu, lahir (Perusahaan Pengerah TKI) PJTKI yang berfungsi mengelola keberangkatan para TKI atau buruh migran yang ingin mengadu nasib di luar negeri. Bahkan, dalam perkembangannya peran PJTKI

lebih dominan jika dibanding pemerintah. Fungsi lain yang diemban oleh PJTKI adalah fungsi pendidikan. PJTKI dan pemerintah melatih keterampilan para calon TKI. Pemerintah mendirikan balai latihan kerja dan PJTKI melengkapi penampungan TKI dengan sarana latihan keterampilan. Walaupun demikian, kenyataannya banyak PJTKI ilegal dan tidak memiliki fungsi pendidikan. PJTKI ilegal ini adalah kumpulan calo yang memeras para calon TKI atau buruh migran.

Di era Reformasi juga ditetapkan kebijakan untuk melayani dan melindungi TKI di luar negeri atau buruh migran itu. Tahun 1999 ditetapkan Keppres No. 29 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja *Indonesia* (BKPTKI). Badan ini bersifat lintas sektoral dan terkait dengan sembilan instansi yang berhubungan dengan TKI atau buruh migran. Keppres ini sebagai respons pemerintah atas semakin banyaknya masalah yang dihadapi oleh TKI atau buruh migran saat bekerja di luar negeri.

Adapun, di daerah khususnya di tingkat provinsi dibentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI). Hal ini merupakan pelayanan agar proses pengurusan dokumen bagi calon buruh migran lebih mudah, murah, dan cepat. Di samping itu, badan ini juga memberi perlindungan bagi calon TKI dan TKI yang kembali ke Indonesia.

Selanjutnya, keberadaan TKI atau buruh migran membuahakan remitansi. remitansi adalah pengiriman uang oleh para TKI atau buruh migran di luar negeri kepada keluarganya di negara asal mereka. Pengiriman uang ini dapat dilakukan secara tradisional, yaitu uang dikirimkan kepada rekannya yang mendapat giliran pulang ke kampung halamannya. Tentu saja di antara mereka ada saling percaya sehingga uang itu dijamin sampai kepada keluarganya. Biasanya mereka ada hubungan saudara atau teman sekampung yang

sudah sangat dikenal. Namun demikian, pengiriman uang juga dapat dilakukan melalui cara modern, yaitu ditransfer dari suatu bank di negara tempat bekerja kepada bank di negara asal atau di kampung halamannya. Upaya ini dapat dilakukan sejauh infrastruktur dan kerja sama yang mendukung ke arah pengiriman uang dengan cara modern ini sudah tersedia baik di daerah asal maupun negara termpatnya bekerja. Cara pengiriman uang ke kampung yang dipilih tergantung pada tingkat pengalaman dan pendidikan para buruh migran tersebut.

Permasalahannya, pengelolaan remitansi yang dilakukan oleh keluarganya dapat secara konsumtif atau produktif. Pengelolaan secara konsumtif terjadi ketika remitansi hanya digunakan untuk membayar hutang, walaupun memang utang wajib dibayar. Selanjutnya, remitan hanya dipakai untuk belanja kebutuhan sekunder atau tersier, yaitu suatu barang atau jasa yang tidak terlalu dibutuhkan oleh keluarga tersebut baik dari segi strata sosial maupun profesi. Misalnya, buruh migran yang berasal dari keluarga petani penggarap atau buruh tani dipandang telah membelanjakan barang dan jasa bersifat sekunder jika remitennya dibelanjakan untuk membeli pakaian mahal, barang-barang elektronik yang belum dibutuhkan (AC, mesin cuci, televisi dengan spesifikasi tinggi), dan rekreasi yang membutuhkan biaya mahal. Bahkan, di Lombok terjadi remiten dari TKW digunakan untuk berfoya-foya oleh suaminya di kampung, sementara itu istrinya membanting tulang sebagai buruh migran. Hal ini suatu gambaran penggunaan remiten yang tidak saja keliru, tetapi juga bersifat ironis.

Namun demikian, pengelolaan remitansi juga dapat dilakukan secara produktif. Misalnya, pengalaman seorang buruh migran asal Lombok yang sudah tiga kali kontrak kerja di luar negeri yang berhasil membeli sejumlah sapi dan membuat kios. Jika satu kali kontrak kerja durasinya selama dua tahun maka tiga kali kontrak berarti dia sudah bekerja selama enam tahun. Setelah enam tahun bekerja sebagai

buruh migran dan remitennya dikelola dengan baik, akhirnya dia berkarier sebagai petani dan pedagang. Profesinya sebagai buruh migran hanya sebatas untuk mencari modal guna membeli sapi dan menyiapkan sebuah kios. Contoh lain, seorang TKW asal Sumbawa setelah pulang dari luar negeri remitansinya terkumpul dan ditambah dengan uang yang dibawa langsung saat pulang, dijadikan modal usaha untuk menjadi pedagang pakaian. Selanjutnya, sisa remitennya digunakan untuk ikut kursus keterampilan yang berhubungan dengan administrasi. Akhirnya, dia menjadi staf administrasi di sebuah sekolah di Sumbawa sambil menjadi pedagang pakaian pada waktu luangnya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, tulisan ini akan mengidentifikasi dan mengkaji fakta beserta dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat terkait dengan munculnya banyak kalangan di tingkat lokal. Apakah upaya tersebut sebuah keseriusan atau hanya berupa wacana semata? Benarkah upaya tersebut dapat membantu keluarga migran berhasil keluar dari kemiskinan dan dapat menyejahterakan diri dan keluarganya? Tulisan ini akan mencoba menguraikannya dengan menggunakan beberapa data yang ditemukan di lapangan dan dinalisis.

B. Konvensi Internasional dan Kebijakan Nasional Tentang Buruh Migran

1. Konvensi Buruh Migran Internasional

Konvensi buruh migran internasional memberi definisi tentang buruh migran. Dalam konvensi ini dikatakan bahwa “Buruh migran mengacu pada seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warga negara.” (www.migrantcare.net/pdf/UN). Buruh migran adalah orang yang sedang mengais rezeki di negeri

orang dan kembalinya biasanya ketika habis kontrak, yaitu antara 1 atau 2 tahun. Mereka jarang bertemu dengan sanak keluarganya. Namun demikian, mereka biasanya selalu mengirim uang untuk keluarganya di kampung halaman yaitu yang disebut remiten. Remiten ini digunakan untuk biaya hidup keluarga buruh migran di kampung halamannya. Disamping itu, remitansi diharapkan dapat menjadi modal hidup dikemudian hari ketika sudah tidak menjadi buruh migran lagi.

Konvensi ini juga memberi hak-hak buruh migran dalam soal remiten. Pasal 47 konvensi ini menyatakan bahwa " Buruh migran berhak untuk melakukan transfer atas pendapatan dan tabungan mereka, khusus dana-dana yang diperlukan untuk membiayai keluarga mereka, dari negara tempatnya bekerja ke negara asal atau negara lain." Merujuk pada konvensi ini, negara tempatnya bekerja tidak berhak melarang pengiriman remiten. Hal ini sudah menjadi hak dan kewajiban mereka memberi biaya hidup keluarganya dan setidaknya ini diatur dalam konvensi buruh migran internasional.

Indonesia berkepentingan untuk meratifikasi konvensi ini. Konvensi ini memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja migran. Apalagi, selama ini banyak buruh migran yang dirugikan oleh para pihak di luar negeri, antara lain dalam hal pembayaran atau gaji yang tidak dibayar penuh karena dipotong oleh agen di luar negeri. Di samping itu, sering terjadi buruh migran wanita dianiaya oleh majikannya. Pertimbangan lainnya adalah penyebaran buruh migran Indonesia yang meluas di berbagai kawasan di dunia. Buruh migran Indonesia bekerja di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Jordania, Qatar, Kuwait, Yaman, Uni Emirat Arab, dan sejumlah negara Arab lainnya. Di samping itu, mereka juga bekerja di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, sedangkan di Asia Tenggara mereka bekerja di Singapura dan Malaysia.

Kesadaran akan saling memerlukan perlu diperjuangkan kepada negara penerima buruh migran. Penegakan konvensi ini bukan perkara mudah. Pihak negara penerima kemungkinan lebih memilih untuk tidak meratifikasinya karena terkait dengan keberadaan pemangku kepentingan di negaranya. Jika suatu negara meratifikasi konvensi ini, hak dan kewajiban buruh migran harus dipenuhi. Seandainya terjadi pelanggaran, para pemangku kepentingan akan terancam hukum atau aturan yang diatur dalam konvensi ini. Untuk mencari aman, negara penerima buruh migran cenderung tidak tertarik meratifikasi konvensi ini. Di samping itu, penegakan konvensi ini harus dilakukan secara paralel. Kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan negara penerima buruh migran terlebih dahulu meratifikasi konvensi tersebut dapat diberlakukan sehingga. Jika hanya Indonesia yang meratifikasi, negara penerima buruh migran tidak melakukan hal yang sama maka konvensi tidak berlaku

2. Kebijakan Nasional Terkait dengan Koordinasi Penempatan Buruh Migran

Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie persoalan buruh migran mulai diperhatikan. Pemerintahan Habibie mencoba mengkoordinasikan soal penanganan buruh migran dengan menerbitkan Keppres No. 29/1999 pada 14 April 1999. Hal ini sebagai upaya untuk menata ulang penempatan buruh migran/TKI ke luar negeri. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai upaya Habibie mengambil hati rakyat di awal kariernya sebagai presiden di era Reformasi. Di samping itu ada sebetulnya keinginan pemerintah untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan di Indonesia khususnya para pencari kerja ke luar negeri atau buruh migran.

Pemerintah menciptakan BKPTKI yang bertugas membantu presiden dalam soal ketenagakerjaan yang meliputi:

1. memperluas pasar buruh migran atau TKI di luar negeri,
2. meningkatkan kualitas dan kuantitas buruh migran, dan
3. meningkatkan kesejahteraan buruh migran.

Sebagai salah seorang penentu kebijakan kala itu, Presiden Habibie ingin memperlihatkan empati dan respons positifnya atas nasib kelompok buruh migran, serta ingin memperbaiki kesejahteraan mereka. Pada satu sisi presiden menunjukkan sikap mulianya, namun padasisilainkebijakanyangdikeluarkan telah menempatkan kelompok buruh migran sebagai sebuah komoditas yang menguntungkan negara jika dilakukan dengan sistem pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab. Namun, keinginan untuk melaksanakan hal tersebut belum terwujud karena pada kenyataannya keppres tidak terimplementasi dengan baik dan maksimal, meskipun sudah berjalan satu dekade.

Soal pasar buruh migran atau TKI tanpa dibantu oleh pemerintah mungkin tidak ada masalah. Sejumlah negara memang membutuhkannya. Peran serta pemerintah menjadi sangat penting ketika negara penerima migran meminta untuk mengirimkan migran yang berkualitas. Hal ini masih sulit dipenuhi karena memang selama ini pemerintah lebih memikirkan kuantitas daripada kualitas. Sementara itu memang masih banyak daerah penyedia buruh yang tersebar di Indonesia, namun penyedia buruh migran yang berkualitas yang sulit dipenuhi. Oleh karena itu, kerja sama antara pemda, PJTKI, dan buruh migran sangat diperlukan. Hal lain yang juga masih sulit terpenuhi adalah peningkatan kesejahteraan buruh migran. Hal ini menyangkut sikap dan gaya hidup buruh migran itu sendiri.

Kemunculan BKPTKI sebagai fenomena lemahnya kinerja Kemenakertrans dalam mengelola buruh migran atau TKI. Jika dilihat

dari namanya yaitu badan koordinasi, kelemahan utama yang ingin diatasi adalah soal koordinasi. Koordinasi antarinstansi di Indonesia sangat kurang khususnya terhadap permasalahan yang bersifat lintas sektoral, seperti soal buruh migran ini. Oleh karena itu, pemerintahan Habibie mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. Bertindak sebagai ketua adalah Menteri Tenaga Kerja dengan pelaksana harian adalah Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja. Adapun susunan keanggotaan BKPTKI terdiri atas:

1. Menteri Tenaga Kerja ketua merangkap anggota
2. Menteri Luar Negeri
3. Menteri Kehakiman
4. Menteri Penerangan
5. Menteri Agama
6. Menteri Peranan Wanita
7. Kepala Kepolisian
8. Gubernur Bank Indonesia

Jika merujuk kepada keppres tersebut, BKPTKI secara hakiki merupakan badan yang melekat pada Departemen Tenaga Kerja walaupun secara struktur organisasi terpisah. Hal ini dilihat dari segi susunan personalia dan anggaran BKPTKI. Di samping itu, anggaran kegiatan juga dibebankan kepada Kemenakertrans. Akibatnya, unsur Kemenakertrans memiliki hak dan kewajibannya yang lebih besar dalam pengelolaan BKPTKI. Kementerian Tenaga Kerja berkewajiban mendanai kegiatan operasional BKPTKI. Salah satu kegiatan operasionalnya adalah melakukan rapat koordinasi minimal tiga bulan sekali. Hal ini tentu saja dilakukan untuk membahas permasalahan terkait nasib buruh migran.

Namun, dalam perkembangannya koordinasi yang diperkuat dengan keppres tersebut masih belum mampu mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penempatan TKI ke luar negeri. Pengalaman dalam berbagai persoalan dan kasus yang terkait TKI menunjukkan ketidakmampuan dan kekurangberhasilan pemerintah (Kemenakertrans) dalam memainkan peranannya sebagai lembaga yang harus melindungi calon TKI dan TKI di luar negeri. Beban kerja yang cukup besar untuk melaksanakan proses penempatan TKI ke luar negeri, seperti pelayanan informasi, pemasyarakatan program pelayanan administrasi keberangkatan dan kepulangan, serta perlindungan TKI. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan Perpres No. 61 Tahun 2006. BNP2TKI ini sekaligus secara yuridis adalah melaksanakan perintah UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur merespons kebijakan Perpres No. 61 Tahun 2006 dengan mengeluarkan Perda No. 12 Tahun 2006 (Gusnelly 2009).

3. Kebijakan Nasional untuk Mengatasi Permasalahan Buruh Migran

Menakertrans, Erman Suparno, pada tahun 2008 telah menyatakan tiga strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi buruh migran. Hal ini meliputi aspek regulasi, pembenahan kelembagaan, dan tindakan nyata. Aspek regulasi terkait dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Menakertrans dari Kabinet Indonesia Bersatu tahap pertama ini

dipandang sudah mengambil langkah-langkah strategis terkait dengan nasib TKI/buruh migran.

Seiring berakhirnya masa bakti kabinet Indonesia Bersatu pada tahun 2009, Menakertrans diganti oleh Yahya Muhaimin yang diharapkan juga punya kepedulian terhadap nasib TKI di luar negeri. Dengan kata lain, dia diharapkan meneruskan kebijakan-kebijakan positif yang sudah diambil oleh pendahulunya terkait dengan TKI. Namun demikian, setahun waktu berjalan Menteri Tenaga Kerja yang baru belum menunjukkan program-program yang nyata menggambarkan perbaikan atau penyempurnaan dari yang sebelumnya. Malahan, berita-berita di media massa menginformasikan adanya sejumlah TKI yang mendapat hukuman cambuk di Malaysia.

Pada akhirnya Pemerintah melakukan langkah-langkah penyempurnaan lembaga-lembaga yang menangani buruh migran. Hal ini dilakukan dengan pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam pengelolaan buruh migran. Di pusat penanganan buruh migran dilakukan oleh BNP2TKI, sedangkan di daerah dilakukan oleh BP3TKI dan SP3TKI. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah. Jadi Dinas Nakertrans dan pemda perlu diberi peran nyata dalam menata pelayanan TKI/buruh migran. Di samping itu, sejumlah daerah diberi kewenangan untuk menjadi Sentra Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (SP3TKI), yaitu Serang, Denpasar, Riau, dan Kuala Tungkal. Para TKI/buruh migran yang akan berangkat diharapkan berhubungan dengan sentra pelayanan terdekat dengan domisilinya.

Selanjutnya, beberapa langkah yang dilakukan oleh Kemenakertrans adalah melaksanakan Inpres No. 06/2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri dengan cara menyederhanakan birokrasi pelayanan penempatan TKI seperti penyederhanaan prosedur. Penyederhanaan

prosedur ini telah mengubah simpul pelayanan dari 24 simpul menjadi hanya 14 simpul pelayanan. Dari segi jumlah simpul pelayanan, upaya ini perlu dihargai dan direspon secara positif. Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan langkah-langkah debirokratisasi di sektor pelayan TKI/buruh migran. Secara teori pemangkasan simpul birokrasi yang mencapai 50% ini dapat menekan biaya dan waktu pengurusan dokumen para TKI/buruh migran tersebut. Jika langkah-langkah ini pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan harapan maka boleh dikatakan kebijakan ini bersifat prorakyat.

Langkah perbaikan lainnya adalah pemangkasan biaya pengurusan dokumen bagi calon TKI. Sejumlah biaya dihapuskan, yaitu biaya fiskal, biaya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Selain itu pemerintah Indonesia juga tidak menaikan biaya pengurusan paspor. Pemangkasan beberapa biaya yang dikeluarkan oleh calon TKI ini bertujuan untuk meringankan beban mereka saat hendak bekerja ke luar negeri. Walaupun pemangkasan ini masih belum sepenuhnya meringankan beban keuangan mereka, hal ini setidaknya telah ada upaya untuk meringankan beban keuangan bagi para calon TKI. Jadi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, pemerintah mencoba untuk mempermudah calon TKI yang akan berangkat keluar negeri.

Langkah lain yang juga penting adalah peningkatan keterampilan calon TKI atau buruh migran. Dalam hal ini, mereka dibekali kemampuan/ keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan digelutinya di luar negeri. Selanjutnya, mereka juga dibekali dengan kemampuan bahasa asing. Bahasa ibu tempat mereka akan bekerja dan bahasa Inggris menjadi bekal penting bagi mereka. Kendala bahasa menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan bagi TKI yang berangkat ke luar negeri. Hal ini terkait

dengan komunikasi dan kelancaran mereka dalam bekerja. Bahkan, hal ini juga penting bagi pembelaan hak-hak mereka di luar negeri khususnya terkait dengan kasus hukum.

Di samping itu, suatu langkah penting lain adalah keberadaan sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi yang ditunjuk oleh Kemenakertrans. Calon TKI/buruh migran yang berangkat ke luar negeri harus memiliki sertifikat dimaksud. Hal ini sebagai bukti bahwa mereka sudah memiliki keterampilan sehingga layak untuk bekerja di luar negeri. Sejauh semua aturan dan norma-norma yang terkait dengan TKI itu sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya maka hal ini sesuatu yang baik. Pada kenyataannya meskipun aturan hukum dibuat sebaik mungkin, namun masih banyak oknum yang menyalahgunakannya, dan calo TKI yang berusaha melanggar aturan-aturan tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting dari sekedar membuat peraturan adalah pengawasan yang ketat terhadap penegakan aturan-aturan tersebut. Hal ini penting untuk belajar menegakkan aturan secara adil dan objektif. Oknum pelanggarnya tidak hanya diberi sanksi administrasi, tetapi harus diberi sanksi pidana.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah NTB Di bidang Perlindungan dan Pelayanan Buruh Migran

Pemerintah Daerah NTB mengeluarkan Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Penempatan dan Perlindungan Puruh TKI. Peraturan ini arahnya lebih fokus kepada upaya mengatur masalah penempatan dan perlindungan terhadap TKI atau buruh migran. Kebijakan ini sebagai langkah Pemerintah Daerah Lombok untuk membantu para TKI dalam hal penempatan mereka bekerja di luar negeri. Lebih jauh lagi, peraturan ini juga sebagai upaya untuk melindungi mereka pada

saat pemberangkatan, saat bekerja di luar negeri, dan ketika mereka kembali ke tanah air (Gusnelly 2009).

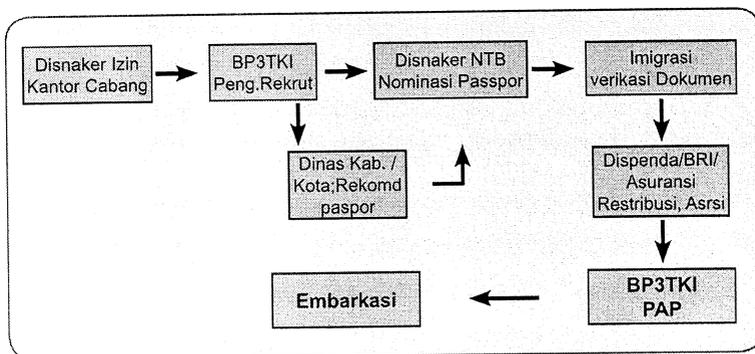
Dengan demikian, kebijakan pemda ini adalah sebagai upaya memberi kepastian hukum kepada para TKI. Kepastian hukum ini diperlukan sebagai upaya preventif agar mereka tidak dirugikan oleh para pihak yang ingin mengeksploitasi TKI. Di samping itu, kepastian hukum juga memudahkan identifikasi TKI di luar negeri karena keberadaan mereka terdaftar pada institusi yang tugasnya terkait dengan keberadaan TKI. Para TKI terdaftar pada Disnaker, Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri sejauh mereka pergi menggunakan dokumen resmi atau status mereka adalah TKI legal. Seandainya terjadi sesuatu, kecelakaan atau meninggal, mereka lebih mudah untuk ditangani karena keberadaannya terdaftar resmi di instansi terkait.

Pemda NTB juga mengeluarkan kebijakan lain yaitu Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya memberi pelayanan prima kepada masyarakat atau calon TKI. Berbagai pihak terkait dengan TKI dikumpulkan dalam satu atap. Layanan terpadu satu pintu disebut LTSP TKI-NTB. Selama ini para calon TKI cukup repot jika mengurus dokumen keberangkatannya karena berbagai instansi terkait berada di tempat yang berbeda. Mereka harus ke sana-kemari mendatangi instansi atau dinas terkait. Kondisi semacam ini memberi peluang kepada para calon atau oknum petugas untuk membantu mengurus dokumen tersebut. Hal ini akhirnya memberatkan para calon TKI karena harus mengeluarkan anggaran khusus untuk jasa pengurusan tersebut. Di samping itu, keberadaan LTSP TKI-NTB ini diharapkan akan menghemat biaya dan

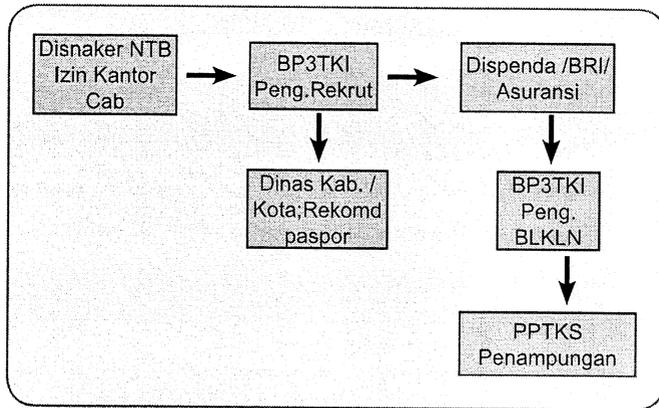
waktu bagi calon TKI. Biaya transportasi dapat ditekan karena instansi yang terkait dengan keberangkatannya berada pada satu atap. Lebih lanjut, mereka tidak kehilangan waktu yang banyak karena perjalanan ke sana-kemari sehingga pengurusan dokumen menjadi sebentar dan sedikit berkurang rasa lelahnya.

Tabel 2.1 Unsur-Unsur Terkait Mekanisme LTSP TKI NTB

No.	Instansi
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB
2	Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI)
3	Kantor Imigrasi Mataram
4	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
5	Bank BRI dan bank lainnya peserta programnya
6	Konsorsium Asuransi
7	Dinas Pendapatan Daerah
8	Kantor Pelayanan Pajak Mataram
9	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB
10	Maskapai dan sarana transportasi lainnya



Gambar: 2.1 Mekanisme LTSP ke Wilayah ASEAN



Gambar 2.2 Mekanisme LTSP TKI ke Wilayah Timur Tengah

LTSP TKI-NTB juga bertugas memberi layanan informasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, LTSP TKI-NTB memberikan informasi soal pasar tenaga kerja di luar negeri atau lowongan kerja di luar negeri. Lembaga ini menjadi pusat segala informasi yang terkait dengan ketenagakerjaan di NTB. Umumnya buruh migran yang berasal dari Lombok mengisi pasar kerja di Malaysia, sedangkan yang berasal dari Sumbawa mengisi pasar kerja di Timur Tengah. Pasar kerja di Malaysia adalah di sektor perkebunan, Timur Tengah di sektor rumah tangga, Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan di sektor industri.

D. Kebijakan Pemerintah NTB di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Buruh Migran Purna (TKI Purna)

1. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi TKI Bermasalah

Media massa sering memberitakan kejadian yang merugikan buruh migran atau TKI di luar negeri. Hal ini khususnya menimpa para TKW yang bekerja di sektor rumah tangga. Fenomena seperti

disinggung pada bagian sebelumnya bahwa para pekerja migran di sektor ini lebih rentan ancaman atau permasalahan yang menimpa dirinya. Buruh migran yang bermasalah menurut catatan Dinsos NTB terkait dengan rentenir, pemalsuan dokumen, penipuan, perlakuan tidak manusiawi, *trafficking*, tidak bisa menyesuaikan diri dengan tempat baru, kangen, dan istri/suami yang ditinggalkan termasuk orang tuanya, tidak bisa mengelola hasil dengan baik.

Bagi buruh migran yang bermasalah penanganannya dilakukan oleh Dinas sosial NTB. Walaupun keberangkatan buruh migran tidak terkait dengan Dinsos, kepulangan mereka karena suatu permasalahan sehingga harus melibatkan Dinsos. Ketika mereka sukses sebagai buruh migran tidak akan bersentuhan dengan lembaga ini, namun jika gagal dan bermasalah lalu pulang ke tanah air, misalnya saja menjadi korban penganiayaan maka rehabilitasinya menjadi tanggung jawab Dinsos.

Tabel 2.2 Data Populasi Kasus Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah di NTB Tahun 2009

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Mataram	220	607	827
2	Lombok Barat	287	661	948
3	Lombok Utara	Gabung dg Lombok barat		
4	Lombok Tengah	38	374	336
5	Lombok Timur	183	457	640
6	Sumbawa Barat	139	346	485
7	Sumbawa	162	377	539
8	Dompu	198	469	567
9	Bima	229	595	824
10	Kota Bima	217	529	745
	Jumlah	1.795	4.415	6.210

Sumber: Mastrum Wihayah, Dinsos NTB

Berdasarkan Tabel 2.2 korban KTK tetinggi menimpa para TKI asal kota Lombok Barat. Tingginya angka korban KTK dapat terjadi karena memang kenyataannya banyak TKI asal daerah ini yang bermasalah. Kemungkinan lain, tingginya angka ini disebabkan masih digabungkannya data Lombok Utara dengan Lombok Barat. Akibatnya, angka sesungguhnya dari angka KTK TKI asal Lombok belum diketahui. Namun demikian, secara umum angka KTK TKI asal Lombok Barat tampaknya memang cukup tinggi.

Selanjutnya, korban KTK terkecil terjadi pada pekerja migran asal Lombok Tengah. Hal ini juga masih sulit untuk memastikan penyebab rendahnya angka ini. Apakah karena memang jumlah pekerja migrannya lebih sedikit dibanding wilayah lain sehingga peluang terjadinya KTK juga lebih sedikit atau memang mereka lebih mampu untuk beradaptasi dengan pasar kerja luar negeri?

Dinsos melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi bagi TKI bermasalah.⁹ Langkah-langkah itu Identifikasi, pendampingan dan, bimbingan TKI bermasalah atau dalam istilah para pekerja sosial biasa disebut TKI B. Langkah-langkah ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Dinsos NTB terhadap TKI B yang tergolong tinggi di NTB karena pengiriman buruh migran juga tinggi. Dengan demikian, risiko munculnya TKI B berbanding lurus dengan jumlah pengiriman buruh migran.

Tahap pertama rehabilitasi TKI B adalah identifikasi. Tahap ini pada dasarnya merupakan pendataan terhadap TKI B. Dinsos harus mengetahui data TKI B ini, misalnya daerah asal, negara tempatnya bekerja, dan kasus yang menimpa TKI B. Data-data ini diperlukan sebagai persyaratan administrasi dan untuk memastikan

⁹ Wawancara dengan Hilyun, nara sumber Dinas Kop & UKM, NTB, pada 9 Oktober 2010 di Mataram.

bahwa buruh migran tersebut masuk kategori TKI B dan layak untuk dilakukan pembinaan secara mental dan ekonomi.

Tahap kedua rehabilitasi adalah pendampingan. Dalam tahap pendampingan ini TKI lebih banyak mendapat bimbingan atau pembinaan mental. Mereka di berikan motivasi agar kembali bangkit semangat hidupnya. Para TKI B mengalami trauma setelah mengalami permasalahan di tempatnya bekerja. Karena mungkin mereka mengalami penyiksaan fisik atau pemerkosaan. Kondisi mental mereka dalam keadaan labil sehingga perlu mendapatkan dorongan semangat dari para petugas pendamping atau para kader pekerja sosial di tingkat kecamatan yang sebelumnya telah memperoleh pelatihan.

Di samping itu, para TKI B ini juga diberikan suatu pengertian bahwa mereka bukan gagal, hanya saat ini belum berhasil menggapai cita-cita. Mereka dianjurkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di daerah asalnya sendiri dengan mengembangkan wirausaha. Tanpa anjuran ini, mereka umumnya sebenarnya juga enggan untuk kembali bekerja di luar negeri karena kapok dengan pengalaman buruk yang menimpa dirinya. Berdasarkan wawancara dengan petugas Dinsos NTB, mereka umumnya sudah tidak tertarik lagi bekerja di luar negeri karena takut terulang kembali peristiwa yang menyengsarakan dirinya.

Tahap ketiga dari rehabilitasi ini adalah bimbingan TKI B. Pada tahap ini para TKI B sudah mendapat rehabilitasi mental, lalu langkah selanjutnya adalah pembinaan wirausaha. Beberapa bimbingan terkait dengan persiapan memasuki dunia usaha diajarkan kepada mereka. Hal ini penting dilakukan agar mereka ketika memasuki dunia usaha sudah memiliki bekal pengetahuan yang memadai tentang dunia usaha. Dengan kesiapan yang cukup untuk menjadi seorang

interpreneur maka para TKI B ini diharapkan berhasil mengubah nasibnya dan memasuki dunia baru yaitu dunia usaha.

pada pendampingan ini TKI B memperoleh sejumlah pembekalan pengetahuan, meliputi motivasi berusaha, dunia perbankan, seluk-beluk dunia usaha, dan jenis usaha yang tepat untuk dikembangkan. Informasi perbankan diperlukan karena jika mereka berhasil menjadi seorang *interpreneur* mau tidak mau akan berurusan dengan bank. Mereka akan memperluas usahanya dengan mendapat suntikan modal usaha dari bank. Selain itu, jenis usaha yang akan dikembangkan juga penting untuk dipertimbangkan secara saksama. Biasanya pendamping atau para kader pekerja sosial akan mengarahkan para TKI B ini kepada jenis usaha yang paling potensial di lingkungannya. Lebih jauh, Dinsos NTB mencatat sejumlah usaha hasil dampungannya meliputi; kelompok usaha ternak itik, pedagang sembako, dan pengrajin tenun. Setelah berhasil bergabung dalam kelompok usaha, para buruh migran bermasalah atau TKI B dikemudian hari diharapkan menjadi wirausahawan yang berhasil.

Fakta-fakta di atas diperkuat oleh seorang aktivis dari LSM Panca Karsa.¹⁰ Aktivis ini menjelaskan bahwa Dinas Sosial melakukan pembinaan kepada TKI B dan memberikan dana stimulus untuk membuka usaha sebesar Rp2000.000 sampai Rp4000.000. Mereka diarahkan untuk bergabung dalam sebuah kelompok usaha yang setiap kelompok usaha terdiri dari sekitar 10 sampai 15 orang. Jenis usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi daerahnya dan keterampilan para mantan TKI B tersebut, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Kedepan Dinas Sosial perlu berkoordinasi dengan Dinas

10 Wawancara dengan Endang, nara sumber dari LSM Panca Karsa, Mataram, pada 9 Oktober 2010

Perindag. Sebagai langkah awal Dinas Sosial sudah tepat dengan mendampingi para TKI B. Namun demikian, saat usaha mereka mulai berkembang Dinas Perindag lebih relevan untuk mengambil alih tugas itu. Hal ini terkait dengan tupoksi dan kompetensi dari instansi tersebut. Dinas Perindag yang memiliki kemampuan teknis pembinaan dari segi penjaminan dan peningkatan kualitas atau mutu. Selanjutnya, dinas terkait juga perlu membina aspek pemasarannya. Agar para pengrajin tidak hanya memproduksi terus-menerus, namun juga memiliki kepastian dari segi pemasaran dan pemenuhan bahan baku. Misalnya, kelompok pengrajin tenun tradisional perlu mendapat pembinaan dari segi pengembangan kreativitas terutama kreativitas dalam mengembangkan motif atau corak tenun agar produknya tetap disukai konsumen. Selanjutnya, perlu dibina dari segi pemasaran. Dinas terkait perlu membantu mencari jaringan antara pengrajin dan pedagang kerajinan tenun baik ditingkat lokal, nasional, bahkan internasional sehingga para pengrajin memiliki pasar yang cukup untuk menjual hasil kreativitasnya.

Para pengrajin tenun NTB dapat memasuki pasar luar negeri. Masyarakat negara tetangga yang berbusana Melayu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura adalah pasar potensial untuk produk tenun NTB. Pakaian resmi masyarakat Melayu biasanya memakai kain tenun, sedangkan di negara-negara ini nampaknya kerajinan tenun sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Mereka sudah memasuki bidang usaha lain yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, kebutuhan kerajinan tenun di negara ini dapat menjadi peluang pasar yang memiliki prospek bagi pengrajin tenun NTB. Apalagi, jika para pengrajin tenun dari NTB dapat menggali dan mengembangkan motif-motif tradisional yang menjadi ciri khas wilayah NTB. Desain dan corak yang khas NTB merupakan nilai tambah bagi kain tenun dari NTB.

2. Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Buruh Migran Purna

Kebijakan pemberdayaan ekonomi buruh migran purna/TKI purna belum banyak dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya di NTB. Jika dilihat secara umum, kebijakan Pemerintah Daerah NTB masih diprioritaskan kepada perlindungan TKI atau buruh migran. Aspek perlindungan ini memang mudah menjadi isu yang hangat dan diperbincangkan publik. Hal ini terkait dengan maraknya pemberitaan yang menyedihkan tentang para buruh migran. Berbagai peristiwa yang menimpa para TKI atau buruh migran khususnya yang menyangkut dimensi kemanusiaan akan mengundang empati di dalam negeri. Oleh karena itu, wajar pemerintah pusat maupun pemda masih terfokus pada aspek perlindungan para TKI.

Dengan kata lain, peran pemda dan dinas di NTB saat ini dalam pemberdayaan ekonomi TKI purna masih minim. Misalnya, Kemenakertrans NTB baru sebatas memberi arahan kepada para TKI atau buruh migran yang akan berangkat ke luar negeri.¹¹ Hal ini disampaikan pada saat pembekalan akhir pemberangkatan (PAP). Para buruh migran ini dihimbau untuk sekali saja pergi ke luar negeri. Artinya, mereka pergi ke luar negeri menjadi buruh migran bukan tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Para buruh migran ini diharapkan setelah punya modal dapat terjun ke dunia usaha. Walaupun tidak semua berbakat menjadi pengusaha, hal ini dapat dipelajari setahap demi setahap dan pihak terkait akan memberi bimbingan seperti yang dilakukan Dinsos NTB terhadap para TKI B.

Instansi lain yang juga terkait dengan TKI purna adalah Dinas Koperasi & UKM. Dinas ini belum memiliki program khusus bagi TKI

11 Wawancara dengan Kepala BP3TKI NTB, Mataram, pada 6 Oktober 2010 di Mataram

purna, tetapi cenderung memberikan binaan kepada para pengusaha kecil dan menengah di NTB secara umum. Namun demikian, dinas ini menginformasikan bahwa instansinya kemungkinan akan memberikan binaan kepada TKI purna pada tahun 2011.¹² Artinya, upaya ke arah pemberdayaan ekonomi kepada para TKI purna saat ini baru pada tahap perencanaan. Namun, hal ini perlu mendapat dukungan semua pihak agar hal itu menjadi kenyataan. Para TKI purna tidak perlu berangkat lagi ke luar negeri, tetapi dapat terjun ke dunia usaha dengan mendapat binaan dari Dinas Koperasi & UKM. Jika memungkinkan, mereka bisa mendapat dana stimulus sebagai dorongan untuk terjun ke dunia usaha.

E. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pelaksanaannya dalam Kehidupan Masyarakat Nusa Tenggara Barat

1. Masyarakat Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah

Dengan ditetapkannya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian melahirkan Perpres No. 61 Tahun 2006 maka semua peraturan ditingkat lokal otomatis memiliki pedoman baru dalam pelaksanaan kegiatan penempatan TKI ke luar negeri. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur merespons kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Perda No. 12 Tahun 2006.

Dengan dikeluarkannya Perda No. 12 Tahun 2006 tentang penempatan dan perlindungan TKI membuat beberapa elemen masyarakat ikut tergerak untuk terlibat dalam implementasinya. Terlebih ketika kebijakan ini menekankan pada persoalan

¹² Wawancara dengan Hilyun, nara sumber Dinas Koperasi & UKM, NTB, pada 9 Oktober 2010 di Mataram

perlindungan terhadap TKI sebelum mereka diberangkatkan sampai pada saat penempatan. Segala hal yang terkait dengan keamanan dan perlindungan bagi calon TKI disusun oleh lembaga masyarakat bersama dengan aparat desa setempat. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal ikut pula mengambil peran bersama dengan pemerintah desa menyusun berbagai macam peraturan sebagai upaya perlindungan bagi warganya yang akan bekerja ke luar negeri. Ada beberapa kelompok LSM yang sangat aktif memainkan peranannya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah. Di Lombok Timur dikenal ada Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), kemudian di Mataram oleh Kelompok Solidaritas Perempuan Mataram, dan di Sumbawa dilakukan oleh Lembaga Koslata.

Masyarakat Lombok Timur bersama dengan LSM ADBMI¹³ bergerak cepat mengimplementasikan Perda No. 12 tahun 2006. Lembaga ini berusaha menjadi kelompok yang memberikan advokasi kepada calon TKI dan keluarganya agar tidak terjerumus dalam jeratan hutang dengan rentenir. Biaya keberangkatan yang cukup besar pada kenyataannya telah menempatkan banyak calon TKI menjadi incaran praktik perbankan yang nakal. Oleh karena itu, ADBMI berusaha memberikan kredit lunak kepada calon TKI yang akan berangkat kerja ke luar negeri dengan cicilan yang ringan. Selain itu ADBMI juga berusaha untuk membantu lembaga desa untuk merumuskan kebijakan perekrutan calon TKI. Masyarakat Lombok Timur juga diberikan informasi tentang cara aman bekerja ke luar negeri yang disampaikan dalam bentuk kesenian daerah yaitu *Rudat*.

13 ADBMI sebuah lembaga swadaya masyarakat di Lombok Timur yang berkantor di Desa Labuhan Haji, Lombok Timur. Suatu kawasan yang jauh dari kota Mataram dan banyak warga yang menjadi buruh migran. Oleh karena itu, warga di sini dalam memenuhi kehidupannya banyak bergantung pada kiriman uang para buruh migran atau remitansi. Keberadaan remitansi sangat penting bagi keluarga buruh migran.

Jika ADBMI terkonsentrasi di wilayah Lombok Timur, maka ada pula LSM lokal lainnya yang memiliki perhatian atas nasib buruh migran di Lombok Tengah yaitu LSM Panca Karsa. Kelompok ini menaruh perhatian penuh atas nasib keluarga migran yang tidak mampu memanfaatkan uang kiriman untuk kegiatan usaha. Ketika kemandirian usaha muncul maka keinginan untuk bekerja ke luar negeri akan berkurang. Meskipun dalam beberapa kasus ada yang berhasil dibina, namun banyak juga yang mengalami kegagalan. Misalnya, yang diceritakan oleh seorang Kepala Dusun Banjar Malaysia tentang kegagalan warganya yang juga seorang mantan TKI dalam mengelola usaha *cidomo* di dusunnya.¹⁴ Jumlah warganya yang sedikit karena banyak yang bekerja ke Malaysia secara tidak langsung ikut memengaruhi kegagalan usaha ini. Minat warga dusun untuk naik *cidomo* juga kurang karena mereka lebih banyak tinggal di dalam rumah dan sekali-sekali ke ladang untuk mengurus tembakau.

Dilihat dari kenyataan yang ada, upaya mantan TKI yang ingin mengubah nasib perlu dihargai dan didukung. Ada keinginan dan memiliki tekad untuk memiliki usaha sendiri atau berupaya untuk terjun ke dunia usaha, namun pengetahuan tentang dunia usaha belum cukup maka dia gagal mewujudkan cita-citanya. Hal ini mungkin akan berbeda keadaannya jika dia memiliki pengetahuan yang cukup

14 Dusun ini disebut Banjar Malaysia karena sebagian besar lelaki disini pernah dan masih menjadi TKI di Malaysia. Desa yang disebut Banjar Malaysia ini memang jauh dari ibukota atau Mataram. Warganya berprofesi sebagai petani tembakau yang ketika musim hujan berkepanjangan menjadi rugi. Pernah ada mantan TKI yang ingin menjadi pengusaha *cidomo* (sejenis delman), dan mengalami kegagalan karena kurang banyak peminatnya. Kemudian *cidomo* itu dijual lagi sebagai modal untuk berangkat kerja ke Malaysia. Secara umum kawasan ini adalah daerah tertinggal dibanding wilayah lainnya sehingga sulit untuk mengembangkan usaha karena daya beli masyarakatnya rendah. Kondisi umum perekonomian ini ikut mempengaruhi kegagalan mantan buruh migran yang berusaha untuk menjadi pengusaha *cidomo*. Wawancara dengan mantan Kepala Desa Banjar Malaysia tanggal 3 Oktober 2010 di Lombok Tengah.

tentang dunia usaha yang akan ditekuninya. Pengetahuan ini akan dimiliki seandainya pemda setempat atau dinas terkait terjun ke desa-desa untuk mengidentifikasi para mantan TKI yang ingin terjun ke dunia usaha dan memberi bekal pengetahuan. Hal ini diperlukan agar para mantan TKI yang ingin terjun ke dunia usaha tidak salah memilih jenis usaha. Nampaknya, mereka sulit untuk diharapkan bersikap proaktif dalam mengembangkan pengetahuannya di bidang dunia usaha atau mendaftarkan dirinya ke kantor pemda atau dinas terkait, kecuali pihak Pemda atau Dinas yang menjemput bola mengantarkan mantan TKI yang ingin menekuni dunia usaha. Hal ini akan terwujud jika ada kebijakan Pemda atau Dinas yang memfasilitasi para mantan TKI atau keluarga TKI dalam mengelola remitansi.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat di Lombok Timur, masyarakat di Lombok Barat bersama dengan LSM Solidaritas Perempuan lebih fokus pada persoalan perlindungan TKI terutama bagi mereka yang menjadi korban kekerasan di tempat kerja. Kegiatan pemberdayaan mantan TKI ataupun keluarganya, saat ini masih belum terlalu banyak dilakukan karena persoalan perlindungan kerja calon TKI dan korban kekerasan belum terselesaikan hingga sekarang. Memang agak sulit memberdayakan keluarga TKI ataupun mantan TKI karena perilaku konsumtif begitu dekat dengan keseharian mereka. Minat untuk memiliki wirausaha masih sangat kecil bahkan nyaris tidak ada karena mereka terbiasa bergantung pada uang kiriman dari bekerja sebagai TKI. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang aktivis LSM Solidaritas Perempuan yang banyak melakukan kegiatan di Mataram dan Lombok Barat. Akibatnya, mereka lebih tertarik menjadi buruh migran ketimbang menjadi wirausahawan.¹⁵ Seorang wirausahawan memerlukan sikap ulet dan kerja keras atau pantang

15 Wawancara dengan Juni, nara sumber LSM Solidaritas Perempuan pada tanggal 2 Oktober 2010 di Lombok Tengah

menyerah. Di samping itu, sesuatu yang juga harus dipunyai adalah sikap hemat, sedangkan seorang buruh migran cepat mendapat uang. Mereka juga tidak perlu pusing berpikir untuk pengembangan usaha, permodalan, dan strategi pemasaran.

Intervensi pemda dalam pemberdayaan ekonomi buruh migran melalui kebijakan yang mampu mendorong munculnya minat untuk berwirausaha harus dilakukan. Itupun kalau memang pemerintah lokal merasa bahwa pengiriman TKI hanya sebagai upaya sementara mengatasi masalah ketenagakerjaan. Meskipun dalam jangka pendek upaya pengelolaan remitansi memang belum tentu menjamin kesejahteraan para buruh migran dan keluarganya, namun dalam jangka panjang hal itu akan memperlihatkan keberhasilan apabila semua pihak mengelola secara bersama-sama. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memperlihatkan keberhasilan beberapa mantan TKI dari daerah lainnya. Keberhasilan satu atau dua orang buruh migran menjadi wirausahawan atau menjalankan pola hidup produktif dari remitansinya diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat di lingkungannya.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumbawa

Pembinaan terhadap mantan buruh migran dan keluarga secara lebih nyata sudah oleh pemerintah yang digerakan oleh kelompok kecil masyarakat seperti NGO dan aparat desa setempat. Hal ini merupakan langkah maju dari Kabupaten Sumbawa daripada kabupaten lainnya di NTB. Pembinaan dan pemberdayaan juga didukung dengan dilakukannya revisi Perda No. 11 Tahun 2003, seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Perubahan Perda No.11 Tahun 2003

Perda No.11 tahun 2003	Revisi
<ul style="list-style-type: none">▪ Terdiri atas 9 Bab dan 54 Pasal▪ Belum ada UU tentang penempatan TKI ke luar negeri▪ Perlindungan berdasarkan metode perlindungan (1) prosedur, (2) asuransi, (3) pengaturan biaya, dan (4) pembelaan tenaga kerja▪ Tim Pembela Tenaga Kerja▪ Pembinaan dilakukan dalam lingkup yang luas	<ul style="list-style-type: none">▪ Terdiri atas 12 Bab dan 58 Pasal▪ Mengacu kepada UU No. 39/2004 dan Permen No. 19/2006▪ Perlindungan berdasarkan tahapan penempatan, yakni (1) prapenempatan, (2) penempatan, dan (3) purna penempatan▪ Komisi Perlindungan Tenaga Kerja▪ Pembinaan difokuskan kepada mantan TKI

Sumber: Khairiman

Dalam Perda No. 11 Tahun 2003 pembinaan bersifat umum, sedangkan pada perda revisi pembinaan sudah lebih fokus diarahkan kepada mantan TKI. Dengan demikian, kebijakan Pemda Sumbawa ke depan akan mengarah kepada pembinaan mantan TKI. Hal ini sudah menjadi amanat dari peraturan daerah sehingga harus dilaksanakan oleh pemda setempat dan dinas terkait. Revisi terhadap perda ini tentu saja menggembirakan para TKI atau mantan TKI karena ke depan kebijakan Pemda Sumbawa diharapkan akan lebih memberi perhatian kepada mereka.

Dalam rangka menjamin terlaksananya amanat perda tersebut, para pihak di Sumbawa membentuk Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI). Hal ini termuat dalam Pasal 43, Perda No. 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa untuk membantu melindungi TKI, pemerintah daerah harus membentuk komisi perlindungan yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur akademisi, LSM, pers, advokat, dan mantan TKI. Komisi ini diharapkan menjadi mitra pemda dan

dinas terkait dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI. Hanya, KPPTKI sayang belum memuat unsur pengusaha di daerah. Hal ini bisa dipahami karena penekanannya masih pada aspek perlindungan semata. Meskipun demikian, unsur pengusaha perlu dipertimbangkan menjadi salah satu komponen dalam KPPTKI jika memang ke depan pembinaan TKI dipandang sebagai suatu aspek yang teramat penting di samping aspek perlindungan.

Selanjutnya, LSM yang cukup berhasil meyakinkan pentingnya keterlibatan pemda dalam pengelolaan remitansi adalah Kelompok Studi Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Koslata). Koslata berhasil membina sejumlah kelompok usaha di Sumbawa. Menurut seorang aktivis Koslata, LSM ini tengah melakukan pembinaan kelompok usaha di sepuluh desa di Sumbawa.¹⁶ Hal ini merupakan suatu pekerjaan yang luar biasa besar dan patut mendapat penghargaan serta perhatian serius dari pemda. Langkah yang ditempuh oleh LSM ini adalah upaya membantu para buruh migran dan pemda setempat dalam pengelolaan remitansi.

F. Analisis terhadap Kebijakan Lembaga Pemerintahan Desa Terkait dengan Pengelolaan Remitansi

Semangat desentralisasi dalam rangka otonomi daerah memberikan kesempatan kepada perangkat sosial desa sebagai bagian yang ikut serta dalam pengelolaan dan penempatan TKI. Perangkat sosial desa yang dimaksud menyangkut nilai-nilai hukum adat, kebiasaan, maupun institusi sosial. Mayoritas buruh migran adalah warga masyarakat desa yang terbiasa mendapat akses informasi dari perangkat desa (Gusnelly, 2009). Ada beberapa hal yang ditekankan

¹⁶ Wawancara dengan Sholeh, nara sumber LSM Koslata, Mataram, pada 5 Oktober 2010

oleh pemerintah desa dalam kebijakannya, yaitu setiap calon tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri harus memenuhi syarat perekrutan yang telah ditetapkan. Calon tenaga kerja harus terdaftar secara sah di desa tempat dia tinggal yang dibuktikan dengan bukti yang legal (kartu identitas resmi). Tidak boleh melakukan perekrutan kepada mereka yang berada dibawah usia 18 tahun, perempuan hamil, dan harus ada izin tertulis dari suami atau istri bersangkutan. Sejah ini, pada umumnya peraturan desa masih terbatas pada perlindungan pada proses perekrutan dan penempatan semata. Ada beberapa hal yang luput dari perhatian pemerintah desa dalam membuat kebijakan, yaitu

- 1). Peraturan desa belum menjangkau tentang pengelolaan remitansi.
- 2). Peran desa baru sebatas pelayanan administrasi dan informasi

Jika dikaitkan dengan peraturan, yaitu PP No. 72 tentang Desa terlihat ada peran yang dapat dimainkan oleh pemerintah dalam menangani masalah migran. Aparat Desa memiliki peran strategis dalam keberangkatan buruh migran karena desa bersinggungan langsung dengan para calon buruh migran. Sebelum buruh migran berangkat ke luar negeri harus menyiapkan dokumen terlebih dahulu. Hal ini penting agar mereka menjadi buruh migran legal atau memiliki dokumen yang sah. Jika buruh migran berangkat tidak memiliki dokumen atau menjadi buruh migran ilegal, risikonya cukup berat karena mereka bisa dinyatakan pendatang haram dan berurusan dengan polisi di negara tujuan.

1. Pengelolaan Remitansi Belum Tersentuh Dalam Peraturan Desa

Peraturan desa belum memuat semangat pemberdayaan ekonomi TKI purna. Ketika tim peneliti LIPI melakukan penelitian ke Lombok Timur menjumpai sebuah rancangan Peraturan Desa (Perdes) Sentalangu No. 5 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia. Setelah membacanya sepintas, penulis berkesimpulan kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat desa dalam bentuk perdes tersebut belum menunjukkan semangat pemberdayaan ekonomi TKI purna, khususnya pengelolaan remitansisi. Kebijakan pada level desa sejalan dengan kebijakan di level daerah dan level nasional, yaitu masih memfokuskan pada aspek perlindungan kepada para buruh migran.

Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap para buruh migran memang sesuatu yang penting dilakukan. Perlindungan ini menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukannya dari level yang paling tinggi sampai level yang paling rendah. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah dengan mengharuskan mereka untuk menjadi buruh migran yang legal bukan yang illegal. Keberadaan buruh migran ilegal di luar negeri dianggap melanggar hukum. Oleh karena itu, rancangan peraturan desa yang berfokus kepada kedua aspek itu tidak bisa disalahkan. Bahkan, upaya ini perlu didukung dan diberi penghargaan sepantasnya oleh pemerintah daerah. Bagaimanapun, aparat desa telah berbuat dengan segala sarana dan sumberdaya yang ada untuk membantu pemerintah dalam mendukung kebijakan pemda dalam bidang ketenagakerjaan.

Namun demikian, rancangan perdes tersebut akan lebih baik jika dilengkapi dengan klausul yang mengatur soal pemberdayaan ekonomi TKI purna dan pengelolaan remitansisi. Hal ini penting

bagi para buruh migran dan keluarganya agar usaha mereka bekerja di luar negeri membawa hasil secara maksimal. Hal ini memang menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin negara memasuki ruang privat warga negaranya. Karena persoalan membelanjakan uang dari buruh migran dan keluarganya adalah urusan pribadi mereka. Tepatkah pemerintah mencampuri urusan penggunaan uang remitansi ini? Hal ini memang masih dapat diperdebatkan. Namun perlu diingat bahwa campur tangan pemerintah dalam penggunaan remitansi bersifat positif agar mereka menggunakan remitansi secara produktif ketimbang konsumtif. Selanjutnya, pemda atau desa hanya menjadi fasilitator dalam penggunaan remitansi secara produktif. Misalnya, membantu dalam pembentukan kelompok usaha atau koperasi dan mencari jaringan kerja sama dengan pihak terkait agar usahanya lebih berkembang. Dengan demikian, upaya ini dimaksudkan sebagai arahan untuk memberdayakan ekonomi buruh migran melalui pengelolaan remitansi secara benar sehingga mereka tidak selamanya menjadi buruh migran.

2. Peran Desa Baru Sebatas Pelayanan Administrasi dan Informasi

Pemerintah desa hanya salah satu dari beberapa lembaga yang bertanggung jawab terhadap buruh migran. Namun, demikian, pemerintahan desa memiliki peran cukup penting karena pihak pertama yang langsung berhadapan dengan calon buruh migran sebelum mereka berhadapan dengan instansi-instansi lain untuk mengurus dokumen keberangkatannya.

Aparat desa memiliki sejumlah peran terkait dengan buruh migran. pertama pelayanan informasi Aparat desa memberikan informasi kepada para calon buruh migran secara umum dan informasi

yang terinci akan diberikan oleh dinas terkait yang didatangkan oleh aparat desa, kedua pencegahan pemalsuan identitas, Aparat desa memeriksa dokumen atau kelengkapan dokumen buruh migran dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah asli dan tidak ada manipulasi data ketiga jembatan penyelesaian sengketa ketika terjadi sengketa di antara para pihak terkait dengan buruh migran.

3. Konsep Kepung Desa: Aparat Desa Terlibat dalam Pengelolaan Remitansi

Keseriusan masyarakat NTB terutama di daerah Sumbawa yang menjadi binaan dari kelompok LSM Koslata telah melahirkan sebuah konsep yang disebut 'konsep kepong desa'.¹⁷ Konsep kepong desa diperkenalkan sebagai lembaga pengelolaan remitansi di Kabupaten Sumbawa. Konsep ini pada dasarnya adalah suatu pemberdayaan ekonomi buruh migran dan keluarganya dengan mengelola kiriman remitansi. Hal ini dilakukan dengan membentuk sejumlah kelompok-kelompok usaha yang disesuaikan dengan potensi desa arau daerah yang bersangkutan. Setiap kelompok desa terdiri dari

¹⁷ Konsep ini diperkenalkan oleh Koslata ketika tim peneliti melakukan diskusi dengan salah seorang aktivis yang memang menjadi salah seorang motivator pemberdayaan TKI di Sumbawa. Nara sumber dari Koslata menjelaskan bahwa keterlibatan aparat desa penting dalam pengembangan kelompok usaha buruh migran. Hal ini untuk memberi bobot kepada keberadaan kelompok usaha tersebut. Dengan kata lain, keterlibatan ini diperlukan agar kelompok usaha yang akan dikembangkan tidak disepelekan oleh warga masyarakat khususnya para buruh migran dan keluarganya. Lebih lanjut, keterlibatan aparat desa di harapkan menjadi jaminan dihadapan masyarakat bahwa kelompok usaha ini merupakan suatu lembaga yang legal dan tidak melanggar hukum. Masyarakat desa umumnya masih menaruh hormat dan kepercayaan kepada aparat desa. Keterlibatan Aparat Desa mempengaruhi animo masyarakat untuk bergabung dengan kelompok usaha ini. Dengan demikian, keterlibatan Aparat Desa diperlukan dalam pengembangan kelompok usaha para buruh migran dan keluarganya.

sub kelompok informal yang menyebar di desa tersebut sehingga strukturnya seperti suatu sel yang terdiri sejumlah inti sel. Setiap gagasan, sebelum dibawa kepada kelompok usaha dibahas terlebih di dalam sub kelompok informal sehingga ketika gagasan tersebut dibawa kepada kelompok usaha sudah dalam keadaan matang baik konsep atau memprogramnya. Dalam hal ini, para pendamping atau kader-kader motivator kelompok berada pada tingkat kelompok, tidak berada pada tingkat sub kelompok.¹⁸

Keterlibatan aparat desa dalam kelompok usaha buruh migran ini sebatas pada evaluasi proposal dari masing-masing kelompok. Aparat Desa menentukan suatu proposal layak atau tidak untuk dibiayai oleh dana stimulus yang akan dikucurkan oleh Pemda Sumbawa Barat. Peran Aparat Desa cukup strategis dalam pengembangan program-program kelompok usaha. Aparat Desa ikut bertanggungjawab dalam pengembangan program-program kerja yang dikembangkan oleh kelompok usaha tersebut. Bahkan, Aparat Desa tidak hanya mengevaluasi, namun juga memberi masukan kepada proposal kelompok usaha. Walaupun setiap kelompok usaha didampingi seorang kader, proposal-proposal yang diajukan kepada Pemda bukan berarti semuanya sempurna atau tanpa cacat. Aparat Desa yang berpengetahuan luas diperlukan untuk mengkaji proposal-proposal tersebut. Bahkan, Aparat Desa memerlukan staf ahli yang membantu mengevaluasi proposal-proposal tersebut agar proposal yang menjadi pemenang dana stimulus merupakan proposal-proposal yang terbaik dan betul-betul layak didanai oleh Pemerintah.

18 Hal ini terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia pendamping dan juga untuk alasan efisiensi. Setiap kelompok usaha memiliki aturan main sendiri-sendiri yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lainnya. Aturan main ini dalam bahasa lokal disebut dengan *awig-awig*. Aturan main ini meliputi pembagian hasil usaha, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta pengembangan usaha.

Keterlibatan aparat desa ini memiliki efek positif maupun negatif. Adapun, efek positifnya adalah pemda dapat mengontrol pengembangan kelompok usaha di Sumbawa Barat. Hal ini khususnya dalam kelayakan usaha. Keterlibatan para aparat desa merupakan saringan dari pemda untuk menentukan kelompok usaha yang layak dibiayai dan yang tidak. Di samping itu, pemda melalui aparat desa juga mengawasi bahwa proposal yang diajukan memang sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok tersebut dan sejalan dengan potensi anggota dan daerahnya. Hal ini untuk memastikan bahwa pemberian dana stimulus tidak salah arah sehingga tidak membawa hasil yang diinginkan. Sebaliknya, pemberian dana stimulus kepada proposal kegiatan itu dimaksudkan sebagai pancingan kelompok usaha yang dirintis dapat memulai usahanya.

Selanjutnya, dana remitansi dimanfaatkan untuk pengembangan program-program lebih lanjut agar kelompok usaha dapat berkembang sesuai dengan harapan masyarakat dan Pemerintah. Data pada saat itu menunjukkan remitansi yang terkumpul sejak dicanangkan dimulainya pengiriman yaitu tiga bulan yang lalu, angka pengiriman mencapai lebih dari Rp50 juta rupiah untuk sepuluh kelompok usaha. Berarti setiap bulan angka pengiriman remitansi rata-rata mencapai Rp 15 juta. Setiap kelompok usaha desa menerima dana remitansi rata-rata Rp10 juta sebagai modal usaha yang siap untuk dikembangkan. Pengiriman remitansi itu bervariasi antara Rp100 ribu sampai dengan Rp1 juta dari masing-masing buruh migran setiap bulannya.

Adapun, efek negatif keterlibatan aparat desa terlihat ketika terjadi penyalahgunaan wewenang terutama ketika menilai proposal secara subjektif. Kekuasaan aparat desa yang strategis

dalam pengajuan proposal mendapatkan dana stimulus jika tidak dilaksanakan dengan amanah secara benar bisa menjadi bumerang bagi pemberdayaan ekonomi buruh migran. Modus operandi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bukan mustahil mewabah ke desa-desa tersebut. Oleh karena itu, antisipasi diperlukan untuk menangkal efek negatif itu. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan yang ketat terhadap aparat desa, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal meliputi pengawasan dari lembaga Pemerintah Desa sendiri maupun dari Pemda Sumbawa Barat.

Sementara itu pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini LSM, kelompok usaha buruh migran, dan media massa. Pendekatan kultur juga dapat digunakan untuk mendukung pengawasan tersebut. Dalam hal ini, nilai-nilai adat setempat dapat dipakai untuk membuat ikrar para aparat desa ketika pelantikan aparat desa atau saat dimulainya program pendanaan kelompok usaha buruh migran ini oleh Pemda Sumbawa Barat.¹⁹ Tetua adat memberikan sangsi sesuai dengan sistem nilai dalam adat ketika penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat desa terjadi. Di samping itu, oknum pelanggar hukum juga akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

19 Biasanya, masyarakat desa masih patuh kepada nilai-nilai adat yang berlaku di lingkungan desanya. Mereka akan berpikir dua kali jika melanggar sumpah adat ketimbang melanggar hukum positif atau peraturan yang tidak begitu dipahaminya. Oleh karena itu, tetua adat juga perlu terlibat mengawasi pelaksanaan usaha ini walaupun sebatas pengawasan saat evaluasi proposal. Hal ini bisa dilakukan dengan memerankan dirinya menjadi saksi saat penyerahan proposal secara simbolis dari kelompok usaha kepada Aparat Desa.

G. Penutup

Selama ini, kebijakan pemerintah di bidang ketengakerjaan khususnya yang terkait dengan TKI baik di tingkat nasional maupun lokal baru menyentuh segi pelayanan dan perlindungan. Hal ini memang penting bagi keberadaan TKI. Apalagi, keamanan dan keselamatan TKI sekarang menjadi sorotan berbagai pihak karena maraknya penganiayaan terhadap TKI atau berbagai peristiwa yang merugikan para TKI. Namun demikian, di masa mendatang kebijakan ketegakerjaan yang menekankan segi pemberdayaan ekonomi TKI purna dan keluarganya merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Perda tentang pemberdayaan ekonomi TKI perlu diwacanakan di lingkungan lembaga eksekutif maupun legislatif. Wadah untuk membantu pengelolaan remitansi diperlukan agar para TKI dan keluarganya dapat menggunakan remiten lebih produktif ketimbang konsumtif. Koperasi dan kelompok usaha TKI merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memberdayakan perekonomian mereka. Sosialisasi gaya hidup yang berpijak pada semangat wirausaha walaupun tidak harus menjadi seorang pengusaha harus ditanamkan pada TKI dan keluarganya. Kebiasaan menabung di kalangan TKI perlu selalu dianjurkan dengan menjelaskan berbagai keuntungannya.

Di samping itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi TKI dapat diperkuat dengan berdirinya Bank TKI-NTB. Hal ini mengingat jumlah TKI dari wilayah ini sangat besar. Mereka menjadi perkerja migran di Timur Tengah, Asia Timur, dan Asia Tenggara. remitansi yang dikelola juga cukup besar sehingga perlu lembaga keuangan khusus yang melayani mereka. Selama ini kegiatan pengiriman uang dilakukan oleh Bank-Bank tertentu dan lembaga keuangan non-bank. Kerja sama antara Bank TKI-NTB dan bank lain serta lembaga keuangan tertentu perlu dijalin di kemudian hari. Mereka dapat dijadikan mitra atau bahkan dimerger ke dalam Bank TKI-NTB karena

mereka sudah berpengalaman mengelola remitansi.

Bank TKI-NTB menjadi mitra pemda dan dengan hak khusus pengelolaan remitansinya menjadi kekuatan ekonomi yang handal di NTB. Bank TKI-NTB dapat menjadi kekuatan ekonomi untuk memberdayakan perekonomian para TKI khususnya dan masyarakat di NTB umumnya. Namun demikian, pihak TKI dan keluarganya perlu mendapat perhatian khusus atau prioritas mengingat mereka yang berjasa mendatangkan devisa, justru hidupnya secara umum belum sejahtera atau masih di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diharapkan akan berubah jika Bank TKI-NTB berdiri karena para TKI dan keluarganya akan mendapat mitra keuangan yang lebih memberi perhatian kepada mereka. Akhirnya, keberadaan Bank TKI-NTB dapat membantu pembangunan ekonomi Pemda NTB dan masyarakatnya

Lebih lanjut, kebijakan pemberdayaan ekonomi TKI di NTB perlu disertai dengan upaya perubahan sistem nilai masyarakat NTB. Persepsi masyarakat NTB saat ini mengidolakan profesi buruh migran. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat NTB memiliki kebanggaan tersendiri jika berhasil menjadi buruh migran. Misalnya, seorang warga masyarakat NTB mengaku bahwa walaupun sudah merantau ke luar NTB, namun jika belum pergi ke Malaysia belum merantau namanya. Hal ini menggambarkan betapa menjadi buruh migran bagi seorang pemuda merupakan suatu tantangan yang harus dijawab. Lelaki di NTB umumnya pernah menjadi buruh migran khususnya ke Malaysia. Oleh karena itu, pandangan ini perlu diluruskan secara perlahan-lahan.

Sebaliknya, sosialisasi atas nilai-nilai *enterpreneurship* perlu digalakkan oleh Pemda NTB dan perlu peran serta masyarakat. Apalagi secara umum, masyarakat NTB tidak memiliki tradisi sebagai *enterpreneur* jika dibandingkan dengan etnis lain, seperti etnis

Minang, Jawa, Madura, Bali, dan Bugis. Padahal bangsa Indonesia secara nasional masih membutuhkan para *entrepreneur* untuk mendukung pembangunan nasional. Jadi, secara tidak langsung, program sosialisasi nilai-nilai *entrepreneurship* ini sejalan dengan program penguatan dunia usaha di Indonesia. Bangsa Indonesia ke depan perlu meningkatkan jumlah *entrepreneur* nya yang tangguh dan mandiri jika ingin membangun struktur ekonomi yang kuat dan menjadi negara maju. Jumlah pelaku dunia usaha yang banyak dan kuat merupakan salah satu indikator negara maju. Langkah-langkah meningkatkan kuantitas dunia usaha ini sudah dilakukan oleh Cina, Brazil, India, dan Taiwan sejak beberapa tahun yang lalu. Indonesia di era Soeharto pernah melakukan hal ini, namun para pelaku usaha saat itu tidak mandiri terutama para kroninya. Mereka terbiasa diproteksi oleh Pemerintahan Soeharto dan tidak kompetitif. Akibatnya, struktur ekonomi nasional lemah dan tidak tahan menghadapi guncangan ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Dishubkominfo. 2008. Layanan Terpadu Satu Pintu (LSTP) TKI NTB, Mataram, Provinsi NTB.
- Gusnelly, dkk. 2009. *Pengelolaan remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi remitansi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- Mastrum Wihayah. *Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah*. Mataram: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Mitsuda, Hiyayoshi. 2005 *Sustainable Lombok: The Rich Nature and Rich People in the 21 st Century, Mataram*, Mataram University Press.
- Pergulatan dari Kancanh: Kisah Advokasi Buruh Migran Nusa Tenggara, Mataram. Koslata. Tidak diterbitkan.
- Sulistiyono. 2008 *Memulai dari Kampung: Panduan Perlindungan TKI*. Mataram.
- Suparno, Erman. 2008. Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Wawancara dengan Hilyun, Narasumber Dinas Kop & UKM, NTB, pada 9 Oktober 2010 di Mataram.
- Wawancara dengan Kepala BP3TKI NTB, pada 6 Oktober 2010 di Mataram.
- Wawancara dengan Juni, Narasumber LSM Solidaritas Perempuan pada tanggal 2 Oktober 2010 di Lombok Tengah.
- Wawancara dengan Endang, nara sumber dari LSM Panca karsa , Mataram, pada 9 Oktober 2010.
- “TKI Sumbang Devisa Terbesar Kedua Setelah Migas”.
(<http://www.migrantcare.net>, diakses 17 Juni 2010).

BAB III

REMITANSI DAN POTENSI DAERAH YANG BELUM TERGALI

Kurnia Novianti

A. Pendahuluan

Pemanfaatan remitansi buruh migran berimplikasi pada munculnya pertanyaan mengenai bagaimana perannya dalam pembangunan negara atau daerah pengirim. Wahba (2005: 185) menyebutkan bahwa ada perdebatan yang cukup sengit mengenai dampak dari remitansi terhadap negara pengirim. Satu hal yang menarik adalah remitansi berpotensi memberikan efek yang tidak kalah besar dengan pajak minyak atau bantuan asing, namun yang membedakan adalah remitansi diterima oleh rumah tangga dan bukan pemerintah secara langsung. Konsekuensinya, proses transfer yang dilakukan bersifat privat, tidak seperti pajak lain yang diterima langsung oleh pemerintah sehingga pemerintah dapat memutuskan ke mana dan bagaimana penghasilan tersebut dimanfaatkan. Dengan demikian, dampaknya secara makro ekonomi dapat berbeda, di samping ia langsung bermanfaat bagi rumah tangga.

Sementara itu hasil penelitian Subianto (2006: 38–39) menunjukkan bahwa remitansi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga tetapi juga kehidupan ekonomi desa. Mengingat secara nominal, remitansi yang mengalir ke tanah air tidak kurang dari Rp82,4 triliun (tahun 2008) atau sekitar 6,1 miliar dolar AS (sekitar Rp61 triliun) per tahunnya²⁰ maka tidak heran apabila remitansi kemudian menjadi andalan sebagai sumber pemasukan negara. Namun, kenyataannya sebagian besar remitansi

langsung masuk ke daerah asal buruh migran (TKI) sehingga di beberapa kantong pengirim TKI, pemanfaatannya belum optimal bagi pengembangan daerah.

Tulisan ini mengangkat pertanyaan mengenai bagaimana remitansi dimanfaatkan oleh daerah dengan dukungan potensi-potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki? Dengan menggunakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tulisan ini sekaligus mempertanyakan mengapa provinsi sebagai salah satu pengirim TKI terbesar seperti NTB belum memiliki model dalam pengelolaan remitansi? Paparan dan analisis yang dilakukan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

B. Potensi Sosial Ekonomi Daerah dan Pengiriman TKI

Perhatian terhadap potensi yang dimiliki daerah menjadi salah satu hal penting dalam kajian ini. Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan potensi alam yang cukup melimpah. Sebuah *website* yang menyediakan informasi tentang potensi daerah²¹ mendeskripsikan bahwa provinsi ini tidak hanya menyimpan potensi alam berupa pertanian, tetapi juga perkebunan, perikanan, bahkan pertambangan, serta tidak kalah penting yaitu pariwisata yang mengandalkan keindahan alam yang luar biasa.

Potensi ekonomi ini tentu saja bernilai tinggi meskipun belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal. Khusus Kabupaten Lombok Barat -dalam pengamatan selama penelitian lapangan- lebih didominasi oleh potensi pertanian dan pariwisata. Kedua sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan sektor-sektor yang

21 Dapat diunduh secara online di http://potensidaerah.ugm.ac.id/?op=potensiprop&id_prop=26#. Diakses tanggal 16 November 2010.

lain. Meskipun demikian, pengelolaan potensi-potensi ini masih merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam mengembangkan potensi pariwisata, yang tidak hanya membutuhkan bangunan infrastruktur yang memadai, tetapi juga dukungan yang bersifat imateriel, seperti kebijakan pemerintah daerah, kerja sama yang saling menguntungkan dengan investor asing, dan dukungan masyarakat setempat.

Di sisi lain, sumber daya manusia yang merupakan potensi sosial yang dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi memiliki kualitas pendidikan di bawah rata-rata. Data berikut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian pendidikan masyarakat masih belum sesuai dengan harapan.

Tabel 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2005-2007

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2005 - 2007 (Tahun)

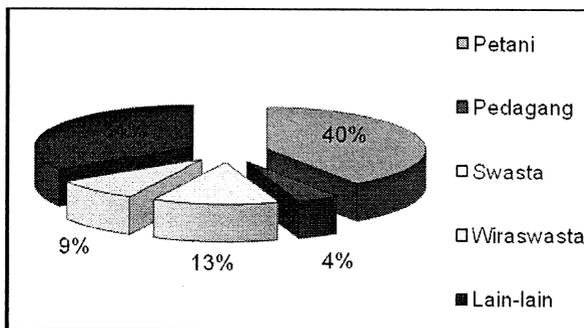
Kabupaten/Kota	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)
Lombok Barat	5.3	5.7	5.7
Lombok Tengah	5.3	5.3	5.4
Lombok Timur	6.1	6.1	6.3
Sumbawa	7.1	7.1	7.2
Dompu	7.0	7.0	7.1
Bima	7.2	7.2	7.2
Sumbawa Barat	6.9	6.9	7.0
Kota Mataram	8.4	8.4	9.1
Kota Bima	8.3	8.3	8.8
NTB	6,6	6,6	6,94

Sumber: BPS Provinsi NTB

Rendahnya tingkat pendidikan lebih lanjut berimplikasi pada minimnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak

sehingga masyarakat tidak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, proses ini memunculkan problem yang cukup pelik, yaitu kemiskinan. Namun tulisan ini tidak akan membahas secara rinci kondisi kemiskinan di NTB, tetapi kemiskinan menjadi alasan utama orang untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari hasil penelitian tahun lalu dapat menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak semua individu yang pergi ke luar negeri disebabkan oleh tidak adanya pekerjaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa sektor pertanian kurang dapat menjadi andalan individu untuk bertahan di daerahnya. Terlebih lagi, mereka yang hanya menjadi buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga harus mengandalkan panggilan yang bersifat sewaktu-waktu. Memang bukan pilihan yang mudah ketika secara sosial-ekonomi, seseorang dihadapkan pada banyaknya kebutuhan hidup yang mendesak sehingga ketika sumber pendapatannya tidak memadai, ia akan cenderung mencari alternatif yang lebih menjanjikan. Konteks NTB sebagai salah satu kantong TKI terbesar di Indonesia menunjukkan paradoks, yaitu di satu sisi daerahnya kaya akan potensi alam, namun di sisi lain, masyarakatnya miskin.



Sumber: Gusnelly dkk 2009

Gambar 3.1 Pekerjaan di Daerah Asal Sebelum Menjadi TKI di Luar Negeri

Hasil survei di atas menunjukkan hal yang menarik, yaitu sebagian besar orang yang pergi ke luar negeri adalah orang yang bekerja di sektor pertanian. Data ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengapa pertanian tidak dapat diandalkan sebagai mata pencaharian yang mencukupi? Ataukah ada faktor-faktor lain yang mendukung fenomena ini? Dari hasil wawancara (Oktober 2010) yang dilakukan kepada pihak pemerintah dan masyarakat terungkap bahwa keinginan untuk mencoba peruntungan di luar negeri tidak hanya karena tidak mencukupinya hasil bertani, tetapi juga karena ajakan teman atau tetangga dan hasil yang mereka bawa ke kampung halaman. Dengan demikian, ada aspek nilai yang juga memengaruhi orang memutuskan pergi ke luar negeri.

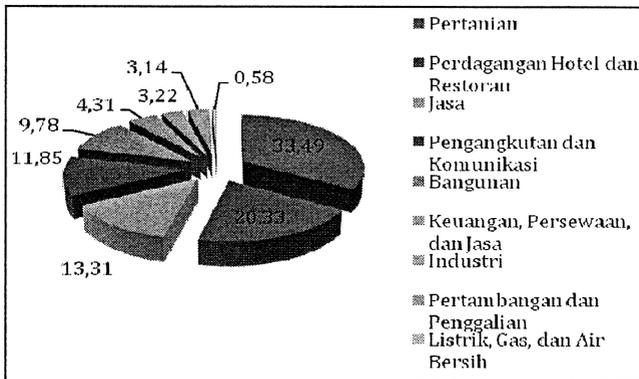
Sementara itu di daerah sendiri, pemda merasa telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan potensi pertanian, salah satunya dengan program-program unggulan. Mulai tahun ini (2010) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan revitalisasi berbagai potensi perekonomiannya melalui program-program unggulan yang diselaraskan dengan daya dukung yang ada. Seperti dilaporkan situs resmi milik Pemda NTB, revitalisasi yang kini gencar dilakukan adalah pada sektor pertanian dalam arti luas, yang mencakup tiga komoditas unggulan yakni sapi, jagung, dan rumput laut, atau dikenal dengan program “pijar”²².

Laporan lain yang disajikan dalam situs Pemerintah Daerah Lombok Barat²³ menunjukkan bahwa pertanian menjadi kontributor terbesar dalam PDRB provinsi ini pada tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut. sektor pertanian menyumbang sebesar 33,49%, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20,33%, sektor jasa 13,31%, sektor pengangkutan dan komunikasi 11,85%,

22 Dapat diunduh di <http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=128>.

23 Dapat diunduh di www.lombokbaratkab.go.id-ekon.html.

sektor bangunan 9,78%, sektor keuangan, persewahan, dan jasa sebesar 4,31%, sektor industri 3,22%, sektor pertambangan dan penggalian 3,14%, dan terakhir sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,58% (dalam gambar di bawah).



Sumber: Perekonomian Lombok Barat 2010 dalam www.lombokbaratkab.go.id/ekon.html, diakses tanggal 13 Januari 2011.

Gambar 3.2 Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Lombok Barat Tahun 2010

Dari data tersebut terlihat betapa sesungguhnya Lombok Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu memberikan kontribusi lebih dari 30% dari total pemasukan PDB tahun 2010. Melihat potensi yang besar ini, idealnya Lombok Barat dapat lebih memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Namun, hasil seperti wawancara yang dilakukan dengan anggota masyarakat (pada Oktober 2010) bahwa pertanian yang begitu besar ternyata tidak mampu memberikan kesempatan kerja yang memadai.

Tidak hanya pertanian, Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Barat menyimpan potensi sumber daya alam lain yang

juga melimpah. Sebut saja kehutanan, perikanan, perindustrian, pertambangan, bahkan pariwisata²⁴. Sungguh bukan hal sepele mengingat tidak semua daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang begitu beragam seperti kabupaten ini. Namun pertanyaannya kemudian mengapa potensi yang begitu besar ini tidak mampu memberikan harapan kepada masyarakatnya? Mengapa orang Lombok Barat memilih untuk pergi ke luar negeri sebagai buruh ketimbang menjadi petani di negerinya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab karena begitu banyak faktor yang mempengaruhi (baik sebagai pendorong maupun penarik) terjadinya mobilisasi orang bekerja sebagai TKI.

Sebelum mempermasalahkan hal-hal yang telah disebutkan, perlu untuk mengeksplorasi tentang potensi yang dimiliki oleh Lombok Barat itu bersifat materiel dan juga immaterial seperti *human capital*²⁵. Williams (2004: 31) mengatakan bahwa *human capital* adalah satu dari beberapa modal sosial yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seseorang yang ingin menjadi TKI, *human capital* yang dimilikinya dapat dikembangkan agar ia mampu bekerja di segala sektor, sekalipun berat dan sulit, seperti pekerjaan-pekerjaan di perkebunan atau rumah tangga. Meskipun sektor-sektor tersebut tergolong *unskilled jobs* atau tidak membutuhkan keterampilan khusus tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan TKI dan mantan TKI/TKW (bulan Oktober 2010) terungkap bahwa pekerjaan-

24 Dapat diunduh di <http://www.lombokbaratkab.go.id/ekon.html>.

25 Sapford (1993: 69–70) menyebutkan bahwa *human capital* merupakan investasi yang memiliki dimensi sosial dan pribadi/privat (individual). Aspek ini dapat dikembangkan melalui peningkatan pendidikan. Dalam analisisnya, Sapford mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan untuk meraih tingkat pendidikan lebih tinggi menjadi investasi yang bersifat jangka panjang dan hasilnya memberikan keuntungan bagi individu dalam meningkatkan posisinya di dalam pasar tenaga kerja/*labor market* sehingga idealnya, seorang individu yang berpendidikan tinggi akan menempati posisi yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan.

pekerjaan tersebut tidaklah ringan dan mudah untuk dilakukan.

Menyadari hal itu, TKI (atau calon TKI) harus berupaya untuk mengembangkan diri dengan cara mempelajari bahasa asing selain mengembangkan keterampilan bekerja melalui pelatihan-pelatihan. Menurut pihak BP3TKI Provinsi NTB, pemda telah memprogramkan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan potensi para calon TKI. Dengan demikian, apabila TKI dinilai tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan baik di negara penerima, pemerintah (baik daerah maupun pusat) harus bertanggung jawab karena proses penyiapan TKI tidak dilakukan dengan baik. Meskipun tidak boleh diabaikan pula bahwa kemampuan untuk mengembangkan potensi diantara para TKI bisa jadi sama atau berbeda satu sama lain²⁶.

Dengan demikian, pengembangan *human capital* bukanlah pekerjaan yang mudah. Upaya ini jelas membutuhkan keseriusan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga TKI dan PTKIS. Dalam laporan penelitian tim PSDR tahun 2009 digambarkan bahwa salah satu karakteristik positif yang cukup menonjol yang dimiliki oleh para TKI NTB adalah kinerja yang baik. TKI NTB dikenal sebagai pekerja keras dan tidak mudah menyerah sehingga dalam beberapa cerita yang dituturkan pada saat wawancara terungkap bahwa para majikan terutama di perkebunan lebih senang mempekerjakan buruh dari NTB dibandingkan buruh-buruh dari negara lain²⁷.

Namun kembali ke pertanyaan sebelumnya, mengapa pengiriman TKI ke luar negeri selalu meningkat dari tahun ke tahun? Dalam banyak kajian ilmu-ilmu sosial, migrasi internasional terjadi akibat ketimpangan antara pembangunan ekonomi di kawasan/negara maju dan negara berkembang (Sudjana 2009; Jannes 2005;

26 Novianti (2009) dalam Gusnelly (2009).

27 Ibid.

Mantra 1998; Munir 1988). Migrasi juga terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan terbukanya peluang kerja sehingga menyebabkan banyaknya angkatan kerja produktif yang tidak mempunyai pekerjaan (*unemployment*). Meningkatnya jumlah angkatan kerja di satu sisi dan menyempitnya peluang kerja di sisi lain secara bersamaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi. Dengan demikian, mengalirnya TKI melalui migrasi setiap tahunnya dilatarbelakangi (secara dominan) oleh faktor ekonomi (Mas'udah 2007).

Lebih lanjut, penjelasan paling sederhana dari fenomena migrasi adalah keinginan individu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Migrasi memberikan efek *convergence* yang terlihat apabila kita ingin membedakan antara dampak migrasi terhadap pembangunan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Migrasi berpengaruh terhadap tingkat upah di wilayah-wilayah emigrasi dan imigrasi (negara pengirim dan penerima) dalam jangka waktu yang singkat hingga menengah. Migran yang mengirimkan uang (*remittance*) ke negara asal akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian di negara asal. Ketersediaan tenaga kerja ini juga dapat mengubah struktur produksi dan mungkin berpengaruh terhadap aspek perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan (Schuerkens 2005: 535-537).

Oleh karena itu, dalam pandangan *optimistic* dapat dikatakan bahwa migrasi tetap memberikan dampak positif, terutama dalam kemampuannya untuk mengompensasi ketidaksempurnaan pasar dan memungkinkan keluarga-keluarga²⁸ (terutama di negara-

28 Keluarga/*household* bisa bersifat inti/*nuclear* atau gabungan/*joint* (orang tua dengan anak yang telah menikah hidup bersama). Dalam sebuah pernikahan (keluarga) dikenal istilah *conjugal money*, yaitu uang yang dimiliki pasangan menikah yang menjadi faktor terpenting dalam lingkup domestik. Batas-batas yang terlihat

negara berkembang) untuk berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Meskipun uang kiriman baru dimanfaatkan sebatas konsumsi langsung namun terjadi *multiplier effects* akibat meningkatnya permintaan akan barang dan jasa di daerah-daerah lokal. Dengan kata lain, remitansi berkontribusi untuk meningkatkan standar kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan formasi aset finansial dan manusia (tanah, ternak, pembangunan atau perbaikan rumah) (Piana 2007)²⁹.

Dalam studi lain dikatakan bahwa migrasi juga tidak memutus hubungan antara individu yang bermigrasi dengan anggota keluarga dan komunitasnya di daerah asal; sekaligus berhubungan dengan pihak-pihak yang mempekerjakannya di negara penerima. Ikatan ini melahirkan fenomena *chain migration*, sistem jarak jauh yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja dan organisasi yang mengelola uang kiriman di daerah asal. Pada tahap akhir, ikatan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam konsolidasi organisasi-organisasi transnasional yang mendorong migran untuk lebih menyuarakan aspirasinya di lembaga-lembaga daerah bahkan di tingkat negara (Guarnizo, Portes, and Haller 2003; Goldring 2002 dalam Portes 2007: 77).

Contoh nyata yang diamati selama penelitian tahun 2009 di Lombok Timur adalah uang yang dihasilkan oleh seseorang, baik yang telah menikah atau belum, akan dikirimkan kepada keluarga di kampung halamannya. Pemanfaatannya (*management*) juga diserahkan kepada anggota keluarga, yaitu istri atau orang tua.

ditunjukkan oleh tabungan bersama, dalam pernikahan, kepemilikan rumah bersama dan privasi keuangan. Aliran uang yang digunakan di luar oleh anak-anak yang telah dewasa dan orang tua dapat dibandingkan, kecuali untuk penggunaan-penggunaan yang tidak rutin/biasa (Singh 1997 dalam Singh 2006: 381).

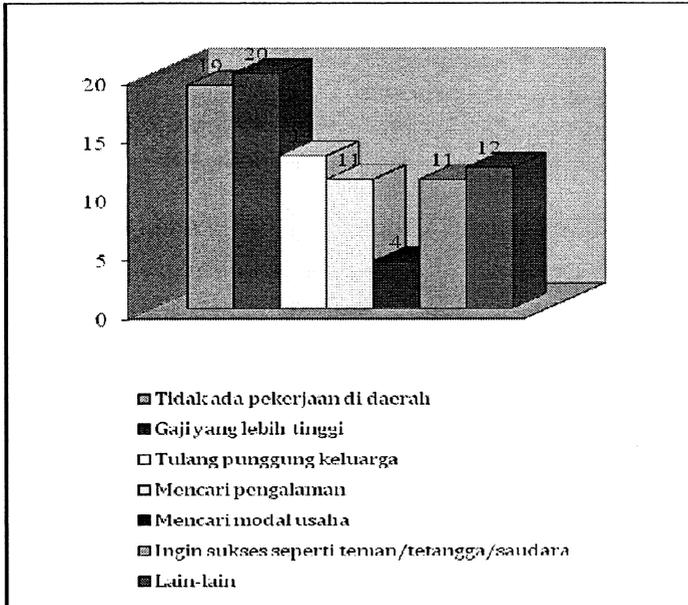
²⁹ Dapat diunduh di <http://economicswebinstitute.org/glossary/remittances.htm>. Diakses tanggal 17 Januari 2011.

Dalam bab dua tentang pemanfaatan remitansi, digambarkan pula bahwa uang kiriman masih lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari. Akan tetapi pada prinsipnya hubungan antara TKI dan keluarganya tetap terjaga melalui pengiriman remitansi.

Dengan demikian, pengiriman TKI ke luar negeri hingga hari ini masih dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi. Adanya keluarga yang harus dihidupi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi yang selama ini dihadapi menjadi faktor-faktor yang sangat mendominasi alasan seseorang untuk mengadu nasib ke negeri orang. Namun, selama penelitian lapangan yang dilakukan di Lombok Barat tahun 2010, juga diperoleh data yang menarik, yaitu pengakuan beberapa informan untuk tetap bertahan di desa apabila kondisinya mendukung. Artinya, mereka tidak akan mengambil langkah untuk menjadi TKI apabila di desa punya pekerjaan dan penghasilan tetap. Oleh karena itu, pergi menjadi TKI sering kali menjadi upaya untuk mengumpulkan uang sebagai modal usaha.

C. Migrasi versus Remitansi

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul beberapa asumsi bahwa ketika individu menghadapi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya maka mencari kerja ke tempat baru (migrasi) adalah salah satu solusi alternatif. Oleh karena itu, tidak salah jika tujuan sebagian besar dari mereka yang pergi meninggalkan desa kelahirannya untuk bekerja di luar negeri adalah ekonomi (lihat Grafik 3.3).



Sumber: Gusnelly dkk 2009

Gambar 3. 3 Motivasi Menjadi Buruh Migran di Luar Negeri

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar dan tidak adanya pekerjaan yang menjanjikan di daerah asal, menjadi alasan utama seseorang untuk mengadu nasib di negeri orang. Motivasi seperti ini sangatlah logis. Setiap manusia pasti menginginkan kondisi yang lebih baik sehingga semakin banyaknya orang yang ingin menjadi TKI bukanlah hal yang salah apabila dalam kenyataannya cara ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah cara ini patut dijadikan solusi atas ketidakmampuan daerah dalam memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya? Sekarang pertanyaan yang diajukan bukan lagi mengapa orang berlomba-lomba menjadi TKI, tetapi bagaimana

daerah melihat dan menyikapi masalah ini?

Makin meningkatnya minat individu untuk bekerja ke luar negeri pada akhirnya membuat pemerintah menjadikan hal ini sebagai sebuah program penting untuk mengatasi masalah pengangguran. Kesempatan dan peluang kerja yang diharapkan tersedia di negara-negara penerima migran, seperti Malaysia sering kali tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan dan dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Padahal kondisi ini kurang menguntungkan bagi Indonesia khususnya Pemerintah Daerah NTB karena akan berpengaruh pada minat masyarakat terhadap dunia pendidikan. Apabila mereka bekerja hanya mengandalkan ijazah SD atau SMP maka minat masyarakat memasuki sekolah menengah atas apalagi perguruan tinggi sangat kecil. Rendahnya tingkat pendidikan para TKI tersebut dengan latar belakang pendidikan SD, menyebabkan sebagian besar dipekerjakan pada sektor informal. Namun, hal ini tidak menjadi kendala bagi pengiriman TKI karena selama masih diterima di negara penerima, ada pekerjaan maka ada uang yang akan mengalir ke kas negara. Keluarga di kampung juga bisa makan dari uang kiriman sehingga pemerintah tidak menghadapi masalah terkait dengan busung lapar atau sebagainya (Gusnelly 2009).

Membicarakan migrasi atau TKI, pasti terkait dengan remitansi. Remitansi sendiri menurut Subianto (2006: 38-39) adalah kiriman (pengiriman) uang dalam bentuk cek atau wesel hasil dari upah kerja di negara lain dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi produksi yang dilakukan oleh pekerja migran dalam hubungannya dengan daerah asalnya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa TKI, mantan TKI, dan keluarganya, barang yang dikirimkan tidak selalu berupa uang tetapi dapat berbentuk barang elektronik, alat olah raga, atau yang lainnya. Meskipun demikian, tulisan ini akan lebih banyak membahas kiriman (remitansi) yang berbentuk uang.

NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi pengirim TKI terbanyak. Hal ini senada dengan laporan World Bank (2008: 14) yang menyebutkan bahwa buruh migran umumnya berasal dari sejumlah daerah tertentu di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Oleh karena itu, remitansi yang mengalir ke Indonesia juga cenderung terkonsentrasi di provinsi-provinsi tersebut. Jumlah remitansi yang masuk ke NTB selama tahun 2001–2009 yang tercatat di Bank Indonesia Mataram adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data remitansisi TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001–2009

Tahun	Penempatan TKI di LN	Remitansi
2001	32.089	316.513.743.917
2002	39.454	329.432.686.505
2003	31.591	479.129.938.380
2004	23.954	457.961.647.177
2005	42.067	400.311.152.083
2006	43.936	435.508.313.407
2007	42.134	683.961.767.545
2008	32.832	533.115.857.930
2009 (Maret)	12.818	104.056.367.689

Sumber: Bank Indonesia Mataram (2009) dalam Gusnelly dkk (2009)

Angka yang tertera pada tabel 3.2 menunjukkan fluktuasi pengiriman remitansi ke NTB dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dari wawancara yang dilakukan terhadap para mantan TKI dan keluarganya serta pihak pemerintah daerah, terungkap bahwa

tidak semua remitansi dikirimkan melalui bank sehingga data yang disajikan belum mencakup jumlah remitansi yang sesungguhnya dikirimkan ke daerah. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya pengiriman melalui media selain bank, seperti yang dijelaskan dalam laporan World Bank (2008: 22–23), sebagai berikut

- 1). Akses fisik. Kemudahan buruh migran untuk mengakses secara fisik penyedia jasa pengiriman remitansi di Malaysia. Hal ini dapat ditentukan oleh jarak dan kemampuan mereka untuk meninggalkan tempat kerja selama jam operasi (buka).
- 2). Akses kelembagaan. Kemudahan bagi buruh migran untuk mengurus persyaratan administrasi dan juga suasana yang bersahabat, atau mudahnya menjangkau penyedia jasa pengiriman remitansi.
- 3). Akses peraturan. Tingkat peraturan dan persyaratan yang dapat membatasi akses.
- 4). Biaya. Terdapat variasi yang besar dalam hal biaya pengiriman uang.
- 5). Persaingan. Adanya sumber-sumber lain yang menyediakan akses lebih mudah dengan biaya yang lebih murah.
- 6). “Melek” keuangan. Banyak penerima tidak mengetahui apakah biaya administrasi dipotong dari jumlah yang mereka terima melalui bank. Nilai tukar mata uang asing juga memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan jumlah uang yang diterima oleh keluarga TKI.

Dari data di lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa orang TKI yang telah kembali, mereka melakukan pengiriman melalui bank. Pengalaman di luar negeri telah memberikan pemahaman secara umum tentang mekanisme pengiriman uang, bahkan mereka juga mendapatkan pengetahuan terkait dengan keuangan, baik pengalaman pahit mereka sendiri maupun melalui pengalaman pahit orang lain. Bagaimanapun,

meningkatkan “kemelekan” TKI mengenai keuangan sebelum berangkat dapat mencegah mereka dari pengalaman pahit. Pada sisi lain, ada persoalan di tingkat lokal yang mereka hadapi yaitu keberadaan bank atau ATM yang jauh dari lokasi desa tempat tinggalnya. Biasanya mereka meminta tolong saudara atau teman mengambilkan uangnya dengan memberikan uang tip sebagai ongkos jalan. Ada sebagian TKI yang menitipkan uang kepada orang yang dipercaya. Namun, tidak sedikit pula dari mereka yang ditipu oleh orang yang dipercayainya tersebut sehingga mereka melakukan strategi lain, seperti menitipkan kepada kerabat atau teman dekat yang kebetulan pulang ke tanah air.

D. Pemanfaatan Remitansi

Skeptisme tentang pemanfaatan remitansi secara efektif bagi pengembangan usaha-usaha produktif telah banyak mewarnai literatur-literatur mengenai remitansi di berbagai belahan dunia. De Haas (2007: 14) mengungkapkan bahwa pandangan ini-yang juga dibentuk oleh landasan para strukturalis dan *dependency* yang menginspirasi pandangan-pandangan yang mengklaim bahwa migrasi dan remitansi tidak mendukung ke arah, atau bahkan menggerogoti pembangunan, kemudian bertahan terutama dalam beberapa literatur tentang kebijakan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan di beberapa negara berkembang –tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga kawasan-kawasan lainnya– membuktikan bahwa pandangan ini keliru. Di Indonesia, seperti dilaporkan Saefullah (1996: 3) dalam Subianto (2006: 38) bahwa lebih dari 83% responden menyatakan bahwa keluarga pelaku migran lebih kaya dibanding keluarga bukan pelaku migran. Sementara itu, para migran dari Sumatra Utara tidak hanya mengirimkan remitansi kepada keluarga mereka, tetapi juga membuat

asosiasi (paguyuban) di daerah-daerah tujuan untuk kemudian mengirimkan dana kepada desa-desa mereka untuk pembangunan desa setempat.

Dalam penelitian lain, Saefullah (1992a:14) juga menyebutkan bahwa lebih dari 96% responden pelaku migran yang diwawancarai pada saat musim lebaran di daerah Jawa Barat, menyatakan telah memberikan sumbangan terhadap pembangunan di desanya, baik berupa uang maupun barang (Subianto 2006: 38). Dengan kata lain, remitansi tidak hanya memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi -bahkan mungkin status sosial- keluarga, tetapi juga terhadap pembangunan daerah dalam berbagai bentuk.

Penelitian yang dilakukan di Bangladesh, seperti yang dilaporkan oleh Siddiqui dan R. Abrar (2003: 66-67) menunjukkan adanya kontribusi signifikan yang diberikan oleh remitansi terhadap pengembangan lembaga keuangan mikro (*micro-finance*). Sementara itu dampak remitansi yang lebih luas lagi diperlihatkan oleh Gedeshi dkk (2003) di Albania, Gammage (2006) di El Salvador, dan Kageyama (2008) di Sri Lanka yang menyimpulkan bahwa remitansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi masyarakat setempat, yang kemudian mampu mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut.

Dalam studi-studi tentang remitansi, pemanfaatan untuk jangka panjang biasanya baru dapat dilakukan setelah semua kebutuhan dasar terpenuhi. Ketika seseorang mengirimkan remitansi ke kampung halamannya, pengiriman pertama hingga ketiga atau keempat biasanya diperuntukkan bagi konsumsi sehari-hari keluarga, di samping biaya pendidikan anak atau anggota keluarga yang lain, biaya berobat, biaya sosial (perayaan keagamaan atau keluarga), dan membayar utang. Setelah itu, pengiriman kesekian kalinya

diperuntukkan bagi investasi yang disebut oleh de Hass (2007: 15) sebagai “*a room for investments*” di sektor pertanian, pembangunan rumah berukuran besar untuk disewakan, perdagangan, dan lain-lain. Bagaimanapun, ia menambahkan bahwa keberlangsungan investasi sangat tergantung pada kondisi-kondisi yang mempengaruhinya.

Realitas ini di temukan pula di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun lalu, mantan TKI dan keluarganya di Lombok Barat yang sempat diwawancarai juga mengemukakan bahwa mereka baru memikirkan tentang investasi apabila keluarga sudah terjamin kebutuhan pangan, sandang, dan papannya³⁰. Selain itu, anak-anaknya bisa bersekolah, mereka juga bisa membantu membangun masjid di desa, dan yang tak kalah penting adalah terbayarnya semua utang³¹, yang dipinjam sewaktu akan berangkat menjadi TKI. Setelah semua terpenuhi, TKI dan keluarganya akan menyisihkan uang kirimannya untuk membeli sawah atau kendaraan yang dapat digunakan untuk usaha, dan modal berjualan atau

30 Membangun rumah menjadi salah satu tujuan orang menjadi TKI. Oleh karena itu, remitansi yang dikirimkan di awal diutamakan juga untuk membeli bahan-bahan bangunan.

31 Bukan hal yang baru bahwa keberadaan tetangga, keluarga, atau bahkan rentenir secara tidak langsung melestarikan pengiriman TKI ke luar negeri.



Gambar 3.4 Rumah yang Dibangun dari Remitansi

membangun usaha kecil-kecilan. Usaha ini yang akan diteruskan oleh anggota keluarga di desa dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Temuan Tirtosudarmo (2009: 29–30) tentang pengelolaan remitansi cukup menarik bahwa ternyata secara *de facto* TKI yang bersangkutan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan uang yang dikirimkannya. Justru keluarga (dalam hal ini orang tua atau pasangannya) yang menjadi penentu atas pilihan untuk bekerja dan cara memanfaatkan remitansi. Selama yang bersangkutan bekerja di luar negeri, pemanfaatan remitansi sepenuhnya diatur oleh orang tua atau pasangannya di rumah. remitansi biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau urusan keluarga bahkan tidak ada pemisahan antara uang yang diperuntukkan bagi keluarga dan milik TKI yang bersangkutan-oleh karena itu ia menyarankan diberikannya pendidikan keuangan (*financial education*) tidak hanya bagi TKI, tetapi juga bagi keluarganya.

Pendidikan mengelola uang ini penting diberikan mengingat ada pula kecenderungan TKI memanfaatkannya dengan kurang bijak. Misalnya, pembelian alat-alat elektronik yang sebenarnya kurang dibutuhkan atau hanya demi gengsi/prestise. Realitas teramati selama penelitian lapangan dan wawancara dengan beberapa keluarga TKI. Ada kecenderungan ketika memiliki uang agak berlebih, TKI atau keluarganya membeli barang-barang yang sebenarnya kurang dibutuhkan. Selain itu, pembelian kendaraan bermotor roda dua juga cenderung meningkat ketika masa pengiriman remitansi.

Namun, akan berbeda apabila mereka membeli *cidomo*, yaitu kendaraan semacam delman yang dapat dimanfaatkan untuk mengantar orang pergi ke pasar atau mengangkut barang. Alat transportasi tradisional ini sangat bermanfaat terutama karena dapat mengangkut banyak barang sekaligus dan harganya yang terjangkau, meskipun kecepatannya tidak seperti mobil/angkot. *Cidomo* dapat dikatakan sebagai bentuk investasi meskipun hasilnya tidak sebesar usaha-usaha yang lain, tetapi cukup menghasilkan.

E. Peranan Pemerintah dalam Pengelolaan Remitansi

Sebagai salah satu negara pengirim TKI yang cukup besar, Indonesia tidak seharusnya berbangga dengan jumlah remitansi besar yang dihasilkan oleh para TKI. Apabila kita mau bijak dan membuka mata, kita harus belajar dari keberhasilan negara-negara lain yang telah mampu mengelola remitansinya secara optimal bagi kemajuan masyarakatnya. Salah satu negara yang dinilai berhasil mengembangkan model pengelolaan remitansi adalah Filipina.

Tulisan Orbeta Jr. (2008) menunjukkan bahwa selain dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, remitansi juga dimanfaatkan untuk investasi kemampuan manusia (*human capital*

investment) dalam bentuk pemberian pendidikan. Mengapa hal ini penting? Karena permasalahan terkait dengan TKI di luar negeri selalu ada hubungannya dengan tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak memiliki keterampilan yang memadai, atau ketidakmampuan dalam menguasai bahasa asing. Hal ini menunjukkan *human capital* buruh migran yang dikirimkan Indonesia masih di bawah standar.

Pengelolaan remitansi melalui institusi-institusi terkait tidak akan memberikan hasil yang optimal bagi TKI dan daerah apabila perspektif yang digunakan oleh aktor-aktor pelaku hanya berorientasi pada keuntungan materi. Sementara itu, TKI sendiri tidak diberdayakan secara berkelanjutan agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah menjadi kunci untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjadi TKI yang bekerja di sektor informal bukanlah jawaban atas permasalahan kemiskinan yang menjerat. Untuk itu, upaya memaksimalkan manfaat remitansi membutuhkan komunikasi yang intensif dan komprehensif antara para akademisi, pembuat kebijakan (pemerintah), dan masyarakat (OECD 2005: 293).

Perspektif yang menitikberatkan pada manfaat secara ekonomi dari remitansi (Portes 2007) agaknya kurang bijak ditempatkan dalam menganalisis masalah pengelolaan remitansi. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia (2006) merekomendasikan bahwa pemerintah harus tegas keluar dari perspektif yang merendahkan kemanusiaan buruh migran seperti perspektif mengoboyekkan atau memperdagangkan TKI. Pemerintah harus segera konsisten membuktikan komitmennya pada reformasi yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Dengan kata lain, pemerintah wajib membenahi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada TKI atau

secara implisit mendiskriminasi TKI.

Dalam konteks Kabupaten Lombok Barat, NTB, tim peneliti berhasil menemui dua lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan kegiatannya untuk memfasilitasi TKI. Namun sayang, program pengelolaan remitansi yang mulai dijalankan tidak difokuskan untuk masyarakat Lombok Barat, melainkan Sumbawa dan Lombok Timur. Namun dari hasil wawancara, ada perspektif *bottom up* yang dijalankan, artinya program melibatkan TKI secara langsung sehingga mereka paham bahwa pengelolaan remitansi adalah masalah yang juga sangat penting, selain perlindungan.

Program Kepung Desa yang diimplementasikan oleh Koslata misalnya, melibatkan para calon TKW di Sumbawa untuk bersama-sama memikirkan bagaimana pengelolaan remitansi yang efektif dan bermanfaat untuk jangka panjang. Pendidikan semacam ini sangat penting diberikan kepada mereka yang akan berangkat mengingat pengalaman para TKI/TKW yang keluar negeri tanpa bekal cenderung akan mengalami kesulitan atau ketidaktahuan dalam pengelolaan remitansi yang tepat, atau paling tidak mendekati ideal.

Sementara itu, di sisi lain pemerintah harus membuka mata dan menyadari bahwa beberapa program pengembangan masyarakat tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Inilah pentingnya komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat sehingga program yang dicanangkan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Melimpahnya potensi sumber daya alam seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan daerah sehingga tidak tergantung dengan remitansi yang datang dari TKI.

Kesiapan pemerintah daerah untuk mengelola (bukan hanya menerima) remitansi kemudian dipertanyakan. Pengalaman selama puluhan tahun mengirim TKI tidak menjadikan Pemda NTB mampu

mengelola remitansi bagi pembangunan daerahnya. Hasil penelitian selama dua tahun (2009–2010) menunjukkan bahwa pengelolaan remitansi lebih banyak dilakukan di level keluarga (rumah tangga) sehingga manfaatnya bagi pembangunan daerah belum maksimal. Hal lain yang juga mencolok adalah belum adanya program yang dicanangkan pemda khusus untuk mengelola remitansi. Perhatian masih lebih banyak pada masalah pengiriman dan perlindungan TKI.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan apabila jumlah TKI terus bertambah setiap tahunnya. Khusus di Kabupaten Lombok Barat, kecenderungan ini pun terjadi. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, hal itu tidak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan daerah dalam menyediakan peluang kerja atau untuk membuka usaha. Masalah struktural dan *good will* pemerintah dalam hal ini sangat berperan. Jika pemerintah beritikad baik untuk mengubah kondisi ini, pengelolaan remitansi dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengembangkan potensi daerah. Pada akhirnya, daerah akan mampu menyediakan lapangan kerja sebagai pilihan terbaik setiap individu, dan bukan pergi ke luar negeri menjadi TKI.

F. Penutup

Remitansi menjadi istilah penting dalam diskusi mengenai TKI. Tidak hanya bagi keluarga, remitansi juga berperan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan remitansi, orang mampu membangun rumah, membiayai anak dan anggota keluarga, membantu keluarga yang kesulitan, membangun sarana ibadah, dan masih banyak lagi. Namun remitansi kerap kali digunakan dengan tidak bijaksana bahkan pada akhirnya tidak memberikan manfaat bagi TKI yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkannya.

Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa NTB sebagai

salah satu kantong TKI belum memiliki pedoman untuk mengelola remitansi? Bahkan model pengelolaan remitansi baru diupayakan tahun lalu, itupun bukan atas inisiatif pemerintah daerah tetapi lembaga swadaya yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Dari dua tahun (2009 dan 2010) penelitian lapangan yang dilakukan di dua kabupaten di NTB, disimpulkan bahwa masalah remitansi tidak terlepas dari peran manusia sebagai aktor. Remitansi yang selama ini hanya dikelola dalam hal pengirimannya saja, ternyata belum memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

Remitansi seharusnya dapat dikelola untuk kemajuan daerah sehingga diharapkan di masa yang akan datang daerah dapat menjadi tempat yang menjanjikan untuk memperoleh pendapatan. Begitu seringnya orang kembali menjadi TKI disebabkan oleh ketidakmampuan daerah untuk memberikan pekerjaan dan pendapatan yang layak bagi masyarakat. Hal ini tentu saja kenyataan yang sangat memprihatinkan karena potensi yang begitu kaya dimiliki oleh daerah, ternyata belum mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun, yang terpenting adalah pengembangan potensi sosial atau *human capital* dalam memanfaatkan remitansi yang dihasilkan. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk melakukannya karena akan berhadapan dengan nilai-nilai dan persepsi-persepsi tertentu yang diyakini oleh masyarakat. Melalui program-program yang telah dimulai seperti yang dilakukan oleh Koslata dan ADBMI, masalah pengelolaan remitansi harus dimulai dengan membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan mampu berdiri sendiri. Kendala yang bersifat teknis seperti penyediaan sarana dan pra sarana seharusnya dapat didiskusikan lebih lanjut antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Antara Mataram.com. 2010. "NTB Revitalisasi Pertanian Melalui PIJAR". (<http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=128>, diakses 12 Januari 2011).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2008. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007*. Mataram, NTB: BPS Provinsi NTB.
- De Haas, Hein. 2007. "Remittances, Migration and Social Development: A Conceptual Review of the Literature". Social Policy and Development Programme Paper Number 34. Geneva, Switzerland: United Nations Research Institute for Social Development.
- Gammage, Sarah. 2006. "Exporting People and Recruiting Remittances: A Development Strategy for El Salvador?". *Latin American Perspectives*, 33 (6): 75-100. Los Angeles: Sage Publications.
- Gedeshi, Ilir, Hekuran Mara, dan Xhilda Preni. 2003. "The Encouragement of Social-Economic Development in Relation to The Growth of The Role of The Remittances". Research Report commissioned by UNDP and Soros Foundation. *Center for Economic and Social Studies (CESS)*.
- Gusnelly, dkk. 2009. *Pengelolaan remitansi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi remitansi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- Jannes, Eudes Wawa. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Jaringan Kerja Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kebijakan Buruh Migran Indonesia. 2006. "Reformasi Dibelenggu Birokrasi: Catatan Hasil Pemantauan Awal Terhadap INPRES No. 06 Tahun 2006".
- Junior, Aniceto C. Orbeta. 2008. "Economic Impact of International Migration and Remittances on Philippine Households: What

- We Thought We Knew, What We Need to Know". *Discussion Paper Series* No. 2008-32. Macati City, Filipina: Philippine Institute for Development Studies.
- Kageyama, Ayako. 2008. "Extent of Poverty Alleviation by Migrant Remittances in Sri Lanka". *South Asia Research*, 28 (1): 89-108. Los Angeles: Sage Publications.
- Kompas. 2009. "Buruh Migran TKI dan Keluarga Diberdayakan". (www.kompas.com, diakses tanggal 6 Mei).
- Mantra, Ida Bagoes. 1998. "*Indonesian Labor Mobility to Malaysia (A Case Study: East Flores, West Lombok, and The Island of Bawean)*". Makalah National Workshop on International Migration, The Population Studies Center, Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta. 9-11 Maret 1998.
- Siti. Mas'udah 2007. "*Migrasi Internasional dan Remittances: Studi tentang Pemanfaatan Remittance di Kalangan Keluarga Eks-TKI di Desa Tanjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung*". Surabaya: Master Tesis. Universitas Airlangga.
- Muins, H. Sutan Makmur. 2002. *Studi tentang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktur Jendral Pembinaan dan Pene,patan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- Organization for Economic Co-Operation and Development. 2005. *Migration, Remittances, and Development*. The Development Dimension. Paris, Perancis: The Secretary-General of the OECD.
- Piana, Valentino. 2007. *Remittances*. Economics Web Institute. (<http://economicswebinstitute.org/glossary/remittances.htm>, diakses 17 Januari 2011).
- Portes, Alejandro. 2007. "Migration, Development, and Segmented Assimilation: A Conceptual Review of the Evidence". *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 610: 73-97. Los Angeles: Sage Publications.
- Sapford, David. dan Zafiris Tzannatos. 1993. *The Economics of The*

- Labour Market*. Houndmills, UK: The Macmillan Press Ltd.
- Schuerkens, Ulrike. 2005. "Transnational Migrations and Social Transformations: A Theoretical Perspective". *Current Sociology*, (53): 535. London. UK: Sage Publications.
- Shaw, Judith. 2007. "'There is No Work in My Village': The Employment Decisions of Female Garment Workers in Sri Lanka's Export Processing Zones". *Journal of Developing Societies*, 23(1-2): 37-58. Los Angeles: SAGE Publications.
- Siddiqui, Tasneem dan Chowdhury R. Abrar. 2003. "Migrant Worker Remittances and Micro-Finance in Bangladesh". *Social Finance Programme*. Working paper No. 38. Social Finance Programme International Labour Office.
- Singh, Supriya. 2006. "Towards a Sociology of Money and Family in the Indian Diaspora". *Contributions to Indian Sociology*, (40): 375-398. London. UK. Sage Publications.
- Subianto, Anwar. 2006. *Pengaruh Pemanfaatan remitansi Buruh Migran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Cilacap: Studi Kasus di Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Nusawungu*. Tesis. Semarang, Jawa Tengah: Universitas Diponegoro.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2009. "Mobility and Human Development in Indonesia". Human Development Research Paper 2009/19. United Nations Development Programme Human Development Reports Research Paper.
- Wahba, Jackline. 2005. "What is the Macroeconomic Impact of International Remittances on the Home Country?" dalam *Migration, Remittances, and Development*. The Development Dimension. Paris, Perancis: The Secretary-General of the OECD.
- Williams, Allan M., Vladimir Baláž, and Claire Wallace. 2004. "International Labour Mobility and Uneven Regional Development in Europe: Human Capital, Knowledge and Entrepreneurship". *European Urban and Regional Studies*, (11): 27. London, UK: Sage Publications.

World Bank. 2008. "Koridor remitansi Malasia-Indonesia: Menjadikan Pengiriman Formal Pilihan Terbaik bagi Buruh Migran Perempuan dan Buruh Migran Tidak Berdokumen". Ringkasan Laporan. Jakarta Perwakilan Bank Dunia Jakarta.

-----, 2010. "Potensi Daerah.

(http://potensidaerah.ugm.ac.id/?op=potensiprop&id_prop=26#, diakses tanggal 16 November).

BAB IV

RUMAH TANGGA KELUARGA MIGRAN DAN PENGELOLAAN REMITANSI DI NUSA TENGGARA BARAT

Paulus Rudolf Yuniarto

A. Pendahuluan

Tulisan pada bab ini akan mendiskusikan tentang dinamika keluarga buruh migran dalam mengelola uang remitansi (remittance) yang dikirimkan oleh anggota keluarga mereka yang/telah bekerja di luar negeri. Selain itu, pada tulisan ini juga akan dibahas mengenai bentuk-bentuk strategi rumah tangga dan mekanismenya dalam pemenuhan kebutuhan/persoalan sehari-hari. Pada dua ide pembahasan tersebut sangat erat kaitannya dengan beberapa pemikiran antara lain, *pertama* dalam kehidupan sehari-hari suatu keluarga tentu dihadapkan pada berbagai persoalan yang dihadapi. Keluarga migran yang masih tinggal di desa merupakan satu kesatuan ekonomi dengan buruh migran yang sedang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, remitansi juga merupakan bagian dari pendapatan ekonomi rumah tangga di pedesaan. *Kedua*, di samping sebagai salah satu instrumen perubahan ekonomi, remitansi juga mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan sosial maupun budaya bagi keluarga migran. Dampak yang cukup kompleks itu karena pada dasarnya remitansi memiliki kaitan erat dengan harapan, kewajiban, dan tanggung jawab buruh migran terhadap keluarga di daerah asalnya.

B. Buruh Migran, Remitansi, dan Usaha Kecil

Diskusi mengenai *remittances* (remitansi) buruh migran telah banyak dilakukan dan beberapa kajian mengenai remitansi

sudah banyak yang dapat dijadikan bahan rujukan³². Dari beberapa literatur tersebut, remitansi memiliki beberapa konsep dan definisi (lihat keterangan bab 1 mengenai definisi remitansi). remitansi dapat dipandang sebagai bagian dari penghasilan seorang buruh migran yang disisihkan untuk dikirimkan ke daerah asal atau dapat diartikan pula sebagai pengiriman uang, barang, dan ide-ide pembangunan yang berasal dari luar (luar kota maupun luar negeri) ke wilayah pedesaan dan merupakan salah satu instrumen penting bagi perubahan sosial ekonomi pada kehidupan suatu masyarakat.

Dalam ilmu ekonomi, dapat dikemukakan bahwa semakin besar penghasilan seorang migran yang bekerja di luar negeri maka diharapkan akan semakin besar pula remitansi yang dikirimkan ke daerah asal.

Kaitannya dengan remitansi buruh migran, besarnya remitansi ini dapat sangat tergantung pada sejauh mana hubungan migran dengan keluarga penerima remitansi di daerah asal. Keluarga di daerah asal dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu keluarga inti (batih) yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak, serta keluarga di luar keluarga inti. Dalam konteks ini, Mantra (1994) mengemukakan bahwa remitansi akan lebih besar jika keluarga penerima remitansi di daerah asal adalah keluarga inti. Sebaliknya, remitansi akan lebih

32 Beberapa kajian mengenai remitansi dapat lebih lengkap dilihat dari beberapa karangan seperti: Addy, D.N., Wijkstrom, B. and Thouez, C. 2003, *"Migrant Remittances-Country of Origin Experiences: Developmental Impact and Future Prospect."* International Conference on Migrant Remittance: London, 9-10 October 2003; Brettell, Caroline. B. 2000, *"Theorizing Migration in Anthropology. The Social Construction of Network, Identities, Communities and Globalscapes"* dalam Brettell & Holifield, 2000: *"Migration Theory: Talking Across Discipline"*. NY&London, Routledge; Osaki, K. 2003. *"Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm?"* *Journal of Population Research*, 20 (2): 203-204; Carling, J. 2004. *"Policy Options for Increasing the Benefits of Remittances"*. <http://www.gdrc.org>; Curson, Peter. 1981. *"Population Geography"*, *A Journal Of Association Of Population Geographers Of India*, Volume 3

kecil jika keluarga penerima remitansi di daerah asal bukan keluarga inti.

Persoalan remitansi merupakan hal yang cukup penting tidak hanya bagi mereka yang melakukan tindakan migrasi ke luar negeri, namun bagi pemerintah daerah setempat sebagai sumber pendapatan. Perhatian terhadap masalah remitansi telah menimbulkan beberapa debat mengenai fungsi dan makna dari remitansi. Beberapa ahli migrasi dan organisasi masyarakat pemerhati masalah migran melihat bahwa peranan remitansi buruh migran telah dibesar-besarkan. Pihak-pihak seperti pemerintah, LSM, dan kelompok migran masih banyak yang melihat fungsi remitansi seolah-olah menjadi jawaban atas segala persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat. Padahal banyak yang mengkhawatirkan terhadap implikasi dari remitansi itu sendiri yaitu kecenderungan adanya ketergantungan yang dianggap sebagai pembenar untuk 'meningkatkan' ekspor/perdagangan manusia ini. Persoalan migrasi dari buruh migran untuk mengejar keuntungan ekonomi dari bekerja di luar negeri, antara lain telah berdampak pada ditinggalkannya usaha pertanian di pedesaan, dan kecenderungan pemda yang banyak punya TKI/TKW untuk menelantarkan sektor pertanian. Dalam jangka panjang penciptaan lapangan kerja di dalam negeri harus menjadi tujuan akhir. Kebijakan pengiriman TKI seharusnya menjadi kebijakan temporer.

Terlepas dari debat mengenai masalah remitansi ini, remitansi mempunyai nilai sosial ekonomi yang signifikan bagi keluarga yang menerimanya. Seperti yang telah di terangkan dalam bagian Bab 1, remitansi memiliki saling keterkaitan antara buruh migran dan keluarga. Keluarga migran yang masih tinggal di desa merupakan satu kesatuan ekonomi yang tak terpisahkan dengan buruh migran itu sendiri. Oleh karena itu, remitansi dapat di pandang sebagai bagian dari kehidupan ekonomi rumah tangga migran di pedesaan.

Di samping sebagai salah satu instrumen perubahan ekonomi, remitansi juga mempunyai dampak yang luas bagi kehidupan sosial maupun budaya bagi masyarakat dan daerah asalnya. Buruh migran khususnya di Nusa Tenggara barat, dalam konteks sosial budaya masih merupakan masyarakat tradisional, Bentuk-bentuk pembiayaan rumah tangga di kampung masih banyak dilakukan secara budaya dengan mengandalkan bantuan anggota keluarga mereka, atau dari masyarakat. Salah satu nilai sosial yang masih berlaku misalnya setiap generasi mempunyai tanggung jawab untuk memelihara orang tua di hari tua mereka, dan masyarakat diharapkan akan membantu tetangga mereka yang lemah.

Dari penjelasan di atas, buruh migran dan remitansi bagaikan dua sisi mata uang. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk keterikatan, baik secara sosial maupun ekonomi dan keterkaitan individu dengan keluarga yang melakukan mobilitas di luar daerah asalnya. Suatu remitansi dapat dipandang sebagai bentuk upaya migran dalam menjaga kelangsungan ikatan sosial ekonomi antara migran dan daerah asal, meskipun secara geografis mereka terpisah jauh. Selain itu, migran mengirim remitansi karena secara moral maupun sosial mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga (Brettell 2000: 129). Di sisi yang lain, remitansi juga mempunyai implikasi pada pola perubahan perilaku dan gaya hidup, perubahan orientasi hidup yang bercorak materialistis dan juga pada tenaga kerja di daerah asal. Fungsi remitansi dalam kehidupan masyarakat setempat ternyata dapat bermacam-macam tergantung pada paradigma pemanfaatan remitansi yang berpijak pada pengumpulan materi atau lebih memerhatikan orientasi ke masa depan. Dalam perspektif perubahan sosial terkait dengan pemanfaatan remitansi, remitansi seharusnya dipandang sebagai suatu instrumen yang dapat memperbaiki

keseimbangan pembayaran (konsumsi), dan merangsang tabungan dan investasi di daerah asal. Oleh karenanya, dapat dikemukakan bahwa remitansi menjadi komponen penting dalam mengkaitkan mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di daerah asal.

Terkait dengan gagasan pada paragraf di atas, terdapat sebuah pemikiran bahwa remitansi dapat dikaitkan dengan masalah pembentukan usaha kecil keluarga migran. Upaya pengembangan peluangkerjasektornonpertanianini menjadisorotan penting berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk menambah penciptaan alternatif pekerjaan bagi masyarakat perdesaan. Sebagian buruh migran yang kembali ke desa asalnya ternyata sulit terserap di sektor pertanian. Selain karena daya serap sudah jenuh, krisis juga menyebabkan rumah tangga petani cenderung menggunakan tenaga kerja keluarga daripada tenaga kerja upahan. Akibatnya, para tenaga kerja tersebut memasuki sektor-sektor pekerjaan non-pertanian yang bersifat informal, seperti jasa ojek, buruh serabutan, dagang kecil-kecilan, dan sopir tembak. Pilihan kerja di sektor informal perdesaan pun tidak semudah yang diperkirakan. Di sisi lain, mereka harus bersaing dengan tenaga kerja yang sebelumnya memang sudah memasuki arena kerja yang sama (Akatiga 1999: 10–13).

Banyak kalangan menganggap bahwa sektor usaha kecil ini cukup signifikan dalam menyokong perekonomian di daerah. Mulyanto (dalam Mukbar 2010: 12) menyatakan bahwa usaha kecil dan mikro merupakan jentik-jentik usaha yang selama ini berada di posisi paling akhir pembangunan yang ternyata memiliki harapan untuk memutar kembali roda-roda ekonomi di level nasional terutama pada masa krisis. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kegiatan usaha kecil dan mikro dapat menjadi salah satu sumber penghidupan alternatif di tengah menghilangnya penghasilan para pekerja migran. Munculnya kepercayaan terhadap kemampuan

usaha kecil untuk “lepas” dari krisis ekonomi ini didasari oleh fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan politisnya yang sangat strategis sehingga usaha kecil tercatat memiliki proporsi 99% dari seluruh unit usaha dan mempunyai daya serap sangat besar (Mukbar 2010: 12). Hal ini di dukung oleh hasil penelitian Mulyoutami dan Susilowati (2003 dalam Mukbar 2010: 12) yang memperlihatkan akumulasi kegiatan ekonomi dalam rumah tangga di perdesaan dapat terjadi dengan adanya sumber pendapatan lain dalam rumah tangganya, baik melalui diversifikasi usaha per individu maupun mata pencaharian lain dari setiap anggota rumah tangga. Adanya proses subsidi silang dari berbagai pendapatan dalam rumah tangga mendorong terjadinya investasi berupa perbaikan rumah, pendidikan dan kesehatan anak, dan lainnya.

C. Rasionalitas Fungsi Ekonomi Rumah Tangga Buruh Migran

Tema kedua yang menjadi perbincangan dalam bab ini adalah mengenai strategi atau siasat yang di jalankan oleh rumah tangga (dalam hal ini rumah tangga buruh migran) dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dijelaskan secara singkat konteks konseptual yang melandasi pemikiran mengenai strategi rumah tangga dan kegiatan usaha. Menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari apalagi terkait dengan persoalan kemiskinan³³, seorang individu, kelompok atau masyarakat tentunya

33 Definisi kemiskinan di sini dipandang sebagai suatu proses yang menitik beratkan pada bagaimana si orang miskin mengembangkan hubungan-hubungan sosial khusus dengan orang lain berdasarkan kompleks kepentingan mereka masing-masing, misalnya untuk mempertahankan hidup (ekonomi). Dengan cara pandang seperti ini, persoalan kemiskinan di dekati melalui pendekatan realita empiris bahwa orang miskin (baik individu maupun kelompok) diposisikan sebagai *subiek* yang berpikir dan bertindak; mereka memiliki cara mengembangkan strategi dan kiat-kiat khusus agar dapat bertahan hidup.

akan melakukan strategi dalam menanggapi atau menyasiasi kondisi kekurangan (ekonomi maupun sosial) dalam hidup mereka tersebut. Siasat tersebut dapat berkembang, baik secara individual maupun kolektif melalui mekanisme rumah tangga di komunitas.

Pertanyaan awal yang perlu diajukan menanggapi aspek kajian rumah tangga yang dianggap penting adalah mengapa rumah tangga menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji sebagai satuan analisis? Saifuddin (1999) menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena rumah tangga adalah wilayah yang memiliki nilai fungsional ekonomi di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam memenuhi kebutuhan hidup berlangsung. Dipahami secara sosiologis dan antropologis, rumah tangga mengandung aspek dinamis satuan sosial yang selalu berhadapan dengan perubahan di lingkungannya. Hampir semua orang hidup dalam keluarga atau rumah tangga, di mana keanggotannya yang biasanya di landasi oleh hubungan kekerabatan perkawinan dan keturunan, secara simultan merupakan kombinasi satuan tempat tinggal, tempat suatu satuan kerja sama ekonomi bekerja (Saifuddin 1999: 22).

Berbeda dengan konsep keluarga yang lebih menekankan aspek fungsi domestik (jaringan kekerabatan, lembaga sosial pencipta keturunan, sosialisasi nilai, dan lain-lain), kajian rumah tangga lebih rumit dan tidak terbatas pada aspek domestik, namun mulai merambah pada tataran fungsi publik. Persoalan ini dapat diterapkan dalam konteks perubahan yang terjadi pada kelompok buruh migran. Ketika masyarakat berubah dari tataran yang berbasis nilai (ideal) ke persoalan materi (kompleks), maka lingkup kajian mengenai keluarga juga akan turut berubah. Sistem yang bekerja pada perubahan ini akan lebih berkembang ke dalam sistem-sistem ekonomi atau bentuk-bentuk kebijakan pengorganisasian atau pengintegrasian masyarakat. Pada tahap ini, fokus perhatian mengenai keluarga/

rumah tangga sudah tidak berbicara mengenai masalah pranata dan sistem nilai yang bekerja pada keluarga, namun sudah mengarah pada proses reaktif rumah tangga terhadap perubahan di lingkungan sosial mereka (Saifuddin 2005; 311).

Dari penjelasan singkat tersebut, tampak bahwa fungsi rumah tangga dalam fungsi sosial-ekonomi menjadi masalah yang cukup penting dan layak dikaji sebagai satuan analisis perubahan. Salah satu aspek penting dari rumah tangga dalam fungsi sosial yang jauh lebih besar, antara lain, mengenai pengambilan keputusan yang muncul dari rumah tangga melalui proses negosiasi, ketidaksepakatan, konflik, dan tawar menawar. Misalnya, keputusan untuk kawin, membangun rumah, atau membawa sanak dalam keluarga adalah keputusan dari anggota keluarga. Dari aspek ekonomi, pengumpulan dan pemilikan bersama sumber daya, memproses makanan, memasak, makan, dan berteduh terjadi dalam rumah tangga, yang oleh karena itu dapat dijadikan standar analisis bagi tujuan ekonomi dan ekologi (Saifuddin 1999: 22).

Rumah tangga memang satuan analisis yang sangat signifikan terhadap bagaimana keluarga menghadapi persoalan hidup yang dihadapi sehari-hari. Dari sini akan timbul pertanyaan kritis, lantas bagaimana rumah tangga melakukan siasat menanggulangi persoalan (*coping strategies*) hidup sehari-hari akibat dari kondisi kesulitan yang mereka hadapi? *Coping strategies* dalam konteks rumah tangga dalam hal ini dipandang sebagai suatu proses yang menempatkan anggota rumah tangga sebagai pelaku yang berupaya mencapai tujuan-tujuannya atau kebutuhan-kebutuhannya, untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi yang berubah-ubah agar tetap bertahan (*survive*)³⁴.

34 Secara khusus menurut konsepsi Snel dan Sterling (dalam Setia 2005: 5), pemahaman mengenai *coping strategies* merupakan suatu rangkaian tindakan yang

Selain bersifat ekonomi, dalam konsepsi *coping strategies* juga tersirat model atau cara-cara individu dan rumah tangga mengatur dirinya untuk hidup bersama dengan individu dan rumah tangga lainnya (Bangura 1994 dalam Setia 2005: 6). Cara-cara tersebut sangat dipengaruhi oleh kebudayaan atau sistem nilai individu atau kelompok dalam struktur masyarakat, keyakinan yang dipegang oleh masyarakat, sistem kepercayaan, dan jaringan sosial yang dipilih, termasuk keahlian dalam memobilisasi sumber daya dalam keluarga; tingkat keterampilan, kepemilikan aset dan hubungan politik, jenis pekerjaan, status jender, dan motivasi pribadi. Di dalam kompleksitas masalah *coping strategies* ini dapat memengaruhi hubungan sosial yang terjadi. Hal penting yang dapat ditarik dari bentuk *coping strategies* suatu komunitas atau rumah tangga adalah adanya keterkaitan dengan perubahan kegiatan untuk bertahan hidup. Misalnya, kecenderungan pelaku atau rumah tangga untuk memiliki pemasukan dari berbagai sumber yang berbeda karena penghasilan yang ada tidak mencukupi untuk menyokong kebutuhan hidup (Setia 2005: 6-7). Kegiatan seperti migrasi, subsisten, kerja upahan, bekerja sendiri informal atau formal termasuk kegiatan atau strategi bertahan hidup. Upaya pengembangan peluang kerja sektor non-pertanian yang dilakukan oleh rumah tangga tampaknya dapat menambah penciptaan alternatif pekerjaan baru bagi masyarakat perdesaan. Harapan lebih jauh, pengembangan peluang kerja yang dijalankan oleh rumah tangga di sektor nonpertanian yang berorientasi pada perdesaan dapat mencegah semakin meningkatnya arus migrasi ke

dipilih secara sadar baik individu maupun rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Tindakan tersebut dilakukan untuk membatasi pengeluaran atau mendapat penghasilan tambahan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga agar kondisi sosial ekonomi individu atau rumah tangga miskin agar tidak jatuh lebih rendah dari standar kesejahteraan masyarakat lainnya.

perkotaan (Hardjono 1990 dalam Mukbar 2010: 12).

D. Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Buruh Migran NTB

Mengkaji masalah karakteristik sosial ekonomi rumah tangga buruh migran di NTB pada dasarnya dapat meliputi berbagai macam dimensi, dari yang terkait dengan dimensi proses bermigrasi buruh migran hingga gambaran situasi yang terdapat di lingkungan rumah tangga buruh itu sendiri. Pada dimensi mengenai proses migrasi, kegiatan migrasi meliputi beberapa mekanisme, antara lain proses keberangkatan migran, alasan bermigrasi, tujuan bermigrasi, lama bermigrasi, dan tempat tujuan. Proses keberangkatan migran ke daerah tujuan secara umum dari hasil diskusi yang dilakukan dengan anggota keluarga buruh migran, dinyatakan bahwa keberangkatan kerja ke luar negeri lebih di dasari oleh keinginan sendiri untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan mencari penghasilan bagi dirinya. Namun, di sisi lain ada juga jawaban yang diberikan karena diajak oleh kerabat atau teman yang telah terlebih dahulu bermigrasi.

Alasan migran bermigrasi umumnya sangatlah bermacam-macam, namun secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni alasan yang berorientasi ekonomis dan alasan yang berorientasi nonekonomis. Alasan yang berorientasi ekonomis, yakni karena keterbatasan ekonomi rumah tangga dan kekurangan lapangan pekerjaan di daerah asal, cenderung dimiliki oleh migran yang berusia lebih tua dan lebih berpengalaman bermigrasi. Mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih tinggi terhadap keadaan ekonomi dan kelangsungan hidup rumah tangganya. Sebaliknya alasan yang berorientasi nonekonomis, yakni ingin mencari pengalaman dan ingin mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, cenderung dimiliki oleh

migran yang berusia muda dan belum begitu lama bermigrasi. Secara umum dapat diketahui bahwa ada tiga tujuan migran melakukan migrasi, yaitu **(1)** untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga, **(2)** untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, dan **(3)** untuk mendapatkan pengalaman bekerja di luar negeri dan lainnya. Tujuan pertama dan kedua berkaitan dengan alasan bermigrasi yang berorientasi ekonomis, sedangkan tujuan ketiga berkaitan dengan alasan bermigrasi yang berorientasi nonekonomis.

Keadaan sosial ekonomi rumah tangga migran meliputi sejarah migrasi, keadaan infrastruktur, penguasaan lahan, dan pendapatan rumah tangga migran. Mengenai sejarah migrasi, sedikit diulas dalam tulisan ini, bahwa sejarah migrasi di NTB sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Secara umum, migrasi di Pulau Lombok telah berlangsung cukup lama (lihat Haris 2008; Mantra 1998; Munir 1988)³⁵. Secara historis, mobilitas orang Sasak, NTB khususnya dari Pulau Lombok ke luar negeri (Malaysia) mulai berkembang intensif tahun 1980-an. Dari penuturan Roma Hidayat, Ketua Advokasi Buruh Migran Indonesia, Lombok Timur NTB, latar belakang sosial ekonomi merupakan faktor yang mendorong warga di desa-desa Lombok Timur yang sebagian kekurangan air itu pergi mengadu nasib di Malaysia dan Timur Tengah. Alasan utama masyarakat untuk memperoleh penghasilan masih menggantungkan pada sektor pertanian dan

35 Untuk bacaan lebih lengkap mengenai sejarah migrasi di Pulau Lombok Nusa Tenggara barat, dapat di lihat misalnya dari karangan-karangan Mantra, Ida Bagoes. 1998. Indonesian Labor Mobility to Malaysia (A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island Of Bawean). Paper pada National Workshop on International Migration, 9-11 Maret 1998, The Population Studies Center, UGM. Yogyakarta. Indonesia.; Munir, Rozy. 1988. Mobilitas TKI ke Sabah. Puslit Pranata Pembangunan Lembaga Penelitian UI dan Kantor Menteri Negara Kependudukan&Lingkungan Hidup RI. Jakarta. Indonesia; Haris, Abdul Haris, 2002. Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia, Cetakan 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar

peternakan semata. Bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki lahan, menjadi buruh di daerah hanya memberi kecukupan makan sehari-hari saja, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan selain pangan, mereka tidak mampu untuk memikirkannya. Pekerjaan buruh tani, yaitu menyiangi tanaman dan membersihkan tanaman alias *ngome* hanya menghasilkan upah sekitar Rp5.000–Rp10.000 per hari. Di luar itu, terkadang mereka menjadi buruh bederep, buruh bangunan dengan upah sekitar Rp20.000–Rp30.000 sehari. Himpitan utang yang tidak akan mungkin terlunasi juga kerap menjadi masalah, apabila hanya mengandalkan upah dengan bekerja sebagai buruh di desa. Hal inilah yang turut memberi andil sebagai faktor untuk melakukan migrasi³⁶.

Bagi warga Lombok yang masih muda, pergi merantau ke luar negeri di samping untuk membantu orang tua di kampung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga merupakan bentuk perwujudan moral ekonomi kepada orang tua. Bermigrasi dilakukan sebagai bukti cinta dan bakti kepada orang tua atau kerabat. Sebagian besar pandangan muda mudi yang sudah dewasa meyakini bahwa mengandalkan bantuan (uluran tangan) dari orang tua sebisa mungkin tidak dilakukan. Selain itu, ada pula pandangan dari sebagian besar buruh migran yang pernah bekerja ke luar negeri, yakni bila ingin melihat anaknya menjadi orang yang berguna, jalan satu-satunya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak adalah dengan sekolah atau menuntut ilmu. Namun, sebagaimana diketahui bahwa biaya sekolah sangat mahal. Oleh karena itu, untuk memenuhi

36 Salah satu persoalan krusial yang kerap menghinggapinya masyarakat di desa-desa Lombok adalah tradisi berutang yang telah menjadi kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Di pedesaan Pulau Lombok seandainya masyarakat menghindari utang, mereka berpikiran nanti mau makan apa pada saat musim kemarau tiba, karena pekerjaan tidak ada, sedangkan kebutuhan keluarga harus tetap dipenuhi. Untuk menyasiasi hal tersebut mereka terpaksa berutang.

pembiayaan sekolah, para orangtua rata-rata hampir memutuskan pergi ke luar negeri untuk mencari biaya sekolah. Hal yang cukup menarik, faktor bermigrasinya orang Pulau Lombok ke Malaysia atau negara lain seperti Saudi Arabia disebabkan adanya konflik masalah keluarga yang tidak terselesaikan (perceraian, masalah sekolah anak, dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari) yang terjadi di rumah tangga. Fenomena konflik keluarga semacam ini sering kali muncul menjadi rasa frustrasi. Akibat masalah yang begitu berat, dengan keadaan terpaksa mereka memutuskan untuk pergi merantau menjadi buruh migran.

Infrastruktur rumah tangga migran meliputi status rumah, keadaan rumah, keadaan mandi, cuci dan kakus (MCK), alat penerangan, dan fasilitas komunikasi. Hampir seluruh rumah tangga yang di amati memiliki rumah sendiri sebagai hak milik dengan keadaan rumah yang permanen dan semi permanen. Adapun keadaan MCK agaknya kurang memadai karena sebagian besar rumah tangga tidak memiliki MCK secara lengkap.

Dalam hal kepemilikan lahan, keluarga migran ada yang memiliki lahan rumah tangga, yang terdiri atas tegalan dan pekarangan atau rumah tempat tinggal. Umumnya, pekarangan hanya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan tidak diusahakan untuk tanaman pertanian karena relatif sempit. Namun, secara kecil-kecilan dan cenderung tidak begitu intensif, ada pula yang mengusahakan ternak unggas seperti ayam, serta ternak kambing dan sapi. Hal ini merupakan keadaan umum yang dapat dijumpai pada rumahtangga migran. Berbeda dengan yang memiliki sawah atau tegalan, seluruh tegalan milik sendiri diusahakan oleh rumah tangga migran. Selain itu, ada banyak rumah tangga migran yang mengusahakan tegalan milik rumah tangga lain yang diperoleh dari hasil berdereb. Bila ada yang meyewa, rumah tangga migran mengusahakan beragam

jenis tanaman pertanian dan ternak besar, seperti sapi. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, jenis-jenis tanaman pertanian yang diusahakan meliputi tanaman semusim, seperti kacang-kacangan, ketela pohon, ketela rambat, dan jagung serta, tanaman tahunan di antaranya kelapa, jambu mete, lontar (yang cenderung tumbuh secara alami), dan mangga. Jenis-jenis tanaman itu tidak begitu optimal hasilnya karena keadaan geografinya yang relatif kering, terutama pada musim kemarau.

Dari sisi pendapatan rumah tangga migran dalam sebulan, diluar pendapatan hasil kiriman remitansi, diperkirakan antara Rp.400.000 hingga Rp.1.000.000 per bulan. Pendapatan itu, bersumber dari sektor pertanian dan dari luar pertanian. Pendapatan dari sektor pertanian relatif kecil karena penguasaan lahan tegalan rumah tangga migran relatif sempit, juga jenis tanaman pertanian yang diusahakan kurang produktif dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Keadaan lahan yang relatif kering tidak menguntungkan bagi pertumbuhan beragam tanaman pertanian secara optimal. Namun demikian, sektor pertanian tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan rumah tangga migran.

E. Bentuk Strategi Pengelolaan Remitansi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas delapan kabupaten dan dua kotamadya. Jumlah penduduk empat juta, konsentrasi terpadat sekitar satu juta jiwa di Lombok Timur. Di Lombok Timur banyak desa yang kepala desa, sekdes, kepala urusan, dan kepala dusunnya adalah mantan TKI. Desa-desa di Lombok Timur hampir semuanya adalah kantong TKI, yang membedakannya adalah negara tujuan dan jenis kelamin TKI yang dominan. Misalnya, Desa Suralaga Kecamatan Suralaga dominan ke Timur Tengah dan dominan

perempuan. Desa Pengkelak Mas Kecamatan Sakra Barat, dominan ke Malaysia dan jenis kelamin pria. Desa Terara Kecamatan Terara dominan korea dan Jepang. Kalau di Mataram karena merupakan ibu kota Provinsi jumlah TKI relatif kecil dibanding daerah lain. Hal yang menarik saat ini terkait remitansi di desa Ketangga Dusun Otak Dese muncul inisiatif dari warga dusun itu yang jadi TKI untuk urunan setiap bulan 5-10 RM. Hasil urunan ini dikirim ke desa dan dikelola oleh kelompok pemuda dusun berkoordinasi dengan kadus. Dana ini untuk menunjang kegiatan pemuda dusun, termasuk upaya ekomomi produktif.

Di sejumlah desa yang merupakan kantong tenaga kerja migran di NTB terlihat rumah-rumah permanen yang sebelumnya didominasi rumah tidak layak huni. Pembangunan rumah permanen adalah dampak nyata dari hasil buruh migran bekerja di luar negeri. Perabotan yang ada di rumah juga cukup lengkap, misalnya bufet, sofa, almari, tv, radio, telepon, kipas angin, antena parabola, dan kendaraan bermotor. Persoalan remitansi yang terjadi di Lombok pada dasarnya menunjukkan karakter konseptualitas dan signifikansi karakter pemanfaatan yang hampir sama dengan uraian yang tertera di Bab 1. Secara garis besar ada 11 hal pengelolaan kiriman remitansi yang dimanfaatkan oleh keluarga migran yang terjadi di Lombok Timur, yaitu (1) membuat dan merenovasi rumah, (2) melunasi utang, (3) membiayai anak sekolah, (4) memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, (5) sebagai modal usaha, (6) menggadai lahan pertanian, (7) membeli sepeda motor bagi yang memiliki kelebihan uang banyak, (8) bagi yang masih muda uang ditabung untuk biaya kawin, (9) membantu perekonomian keluarga, (10) modal *ngaro* atau menggarap sawah, dan (11) modal tanam tembakau. Berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, sejumlah besar remitansi yang dikirim oleh migran berfungsi untuk menyokong kerabat/keluarga migran yang

ada di daerah asal. Migran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengirimkan uang/barang untuk menyokong biaya hidup sehari-hari bagi kerabat dan keluarganya, terutama untuk anak-anak dan orang tuanya.

Sejumlah besar remitansi yang dikirim oleh migran pada dasarnya memiliki beberapa peruntukan. Peruntukan yang pertama, remitansi digunakan untuk menyokong kerabat/keluarga migran yang ada di daerah asal. Kiriman yang ditujukan untuk keluarga lebih bersifat ekonomi dan pengiriman dilakukan secara rutin karena dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan menunjang kehidupan orang tua “pengganti”, seperti “simbah-simbah” (nenek dan kakek) yang menggantikan peran sebagai orang tua. Selain dalam bentuk uang, para buruh migran juga mengirim barang-barang seperti pakaian, perabot rumah tangga, alat elektronik, dan juga menginvestasikan kiriman dengan membeli tanah serta membuka usaha baru di desanya yang dijalankan oleh anggota keluarganya yang masih tinggal di desa. Ada beberapa keluarga migran yang mampu membuka toko kelontong dan juga toko bahan bangunan di daerah asalnya dari hasil kerja di luar negeri.

Peruntukan yang kedua adalah untuk peringatan hari-hari besar. Seorang migran juga berusaha untuk dapat pulang ke daerah asal pada saat diadakan peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, misalnya kelahiran, perkawinan, dan kematian. Alur remitansi tidak hanya untuk individu keluarga tertentu saja, tetapi ada juga kasus remitansi dipakai untuk menjalankan siklus reproduksi sosial-budaya misalnya upacara yang berhubungan dengan siklus hidup (*life cycle*) manusia. remitansi yang dipergunakan untuk tujuan membantu anggota masyarakat yang sedang mempunyai hajat lebih dikenal dengan sebutan “sumbangan” Meningkatkan jumlah

“sumbangan” pada acara-acara tersebut sangat erat kaitannya dengan prinsip gotong royong. Pada saat acara pernikahan antarburuh migran biasanya akan memberikan sumbangan karena hal itu berkaitan dengan gengsi dan prestise mereka di mata masyarakat. Besarnya sumbangan yang mereka berikan berkaitan erat dengan pandangan terhadap kesuksesan mereka dalam usaha kerja di luar negeri. Mereka akan merasa dipandang sebagai buruh migran yang sukses dan berhasil manakala jumlah sumbangan yang diberikan cukup besar sehingga di antara mereka seolah berlomba dalam memberikan sumbangan.

Malinowski dalam penelitiannya pada masyarakat Trobiand melihat bahwa dalam masyarakat berlaku prinsip timbal balik atau *principle of reciprocity*. Sistem menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas merupakan suatu dasar, suatu prinsip yang mengaktifkan kehidupan dalam suatu masyarakat. Demikian juga halnya yang terjadi pada masyarakat di Lombok Timur, sumbangan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan timbal balik karena selain berfungsi untuk memperingan beban yang punya hajat juga suatu saat mereka bisa dibantu kalau mempunyai kesulitan atau memerlukan bantuan. Hal ini terungkap dari penuturan anggota LSM Advokasi Buruh Migran yang mengatakan: “Warga desa sini itu enak kalau mempunyai hajat karena tidak perlu modal yang banyak. Sumbangan bisa diperoleh dari kerabatnya baik berupa bahan makanan maupun uang. Dan sumbangan yang diberikan pun cukup banyak sehingga mereka tetap aman walaupun modalnya sedikit”.

Terakhir, peruntukan yang ketiga adalah investasi. Bentuk investasinya adalah perbaikan dan pembangunan perumahan, membeli tanah, mendirikan mesjid, mendirikan usaha kecil, dan lain-lainnya. Kegiatan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan budaya dalam menjaga kelangsungan hidup

di daerah asal, serta bersifat psikologis karena erat hubungannya dengan prestise seseorang. Hal ini berlaku juga saat pembangunan rumah, antarwarga saling menyumbang baik dari segi material bangunan maupun dalam hal finansial (uang) dan mereka terkesan benar-benar sangat memerhatikan prinsip timbal balik karena hal itu berkaitan erat dengan gengsi dan pamor mereka di masyarakat. Seorang informan mengungkapkan: "Saya sudah pernah membangun rumah dan saat saya membangun banyak kerabat yang memberikan sumbangan, jadi sekarang kalau ada diantara mereka yang akan membangun rumah saya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengembalikannya. Jumlahnya pun seimbang atau kalau bisa lebih karena malu kalau saya hanya sedikit menyumbangya".

Remitan yang dikirim untuk keperluan desa terwujud dalam pemberian sumbangan saat desa memerlukan dana, misalnya untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa. Pembangunan balai desa, jalan, got maupun saat desa menggelar acara "selamatan" desa atau acara rutin tahunan ulang tahun desa. Sumbangan yang mengalir dari hasil atau kiriman buruh migran ternyata lumayan banyak karena di samping memang keterikatan mereka dengan desa sangat tinggi juga karena proses pengumpulan sumbangan terkoordinasi dengan baik antara warga setempat dengan para aparat desa. Pengumpulan dana dilakukan dengan cara keliling. Sebagai contoh, ada beberapa aparat desa dan warga desa yang berkeliling di daerah migran di Malaysia mendatangi warga mereka yang sedang bekerja untuk mengumpulkan dana sumbangan sehingga para warga tidak perlu pulang untuk urusan tersebut. Hal itu sudah merupakan suatu kesepakatan bersama di antara mereka. Dalam hal sumbangan terhadap desa pun prinsip "gengsi" masih sangat berlaku, karena mereka akan merasa malu kalau hanya memberikan sumbangan sedikit dibandingkan warga yang lainnya. Berikut penjelasan dari salah satu sukarelawan LSM

Advokasi Buruh Migran yang mengatakan: “Mereka (buruh migran) kalau menyumbang pasti melihat juga kawan yang lainnya, kalau bisa lebih besar karena malu kalau slebih sedikit. Apalagi bagi mereka yang telah bekerja sebagai buruh migran cukup lama”. Pengakuan ini dibenarkan oleh salah seorang aparat yang malah menjadikan hal ini sebagai strategi untuk memperoleh sumbangan yang banyak dari warganya. Mereka sengaja dipancing dengan pedagang yang mampu menyumbang dana cukup besar. “Biasanya saat pengumpulan dana saya sengaja menempatkan data donatur tertinggi di halaman depan supaya bisa terlihat oleh warga yang lainnya sehingga mereka akan malu kalau hanya memberikan sumbangan sedikit. Karena memang itulah sifat dan karakter masyarakat di desa-desa Lombok ini. Banyak yang akhirnya memberi sumbangan di atasnya atau kadang-kadang seimbang”.

F. Membangun Ekonomi Keluarga melalui Jalur Usaha *Ketengan*

Tulisan berikut ini merupakan hasil penuturan Roma Hidayat, Direktur Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) yang bertempat tinggal di Desa Lepak, Lombok Timur NTB. Tulisan ini memberikan inspirasi mengenai bagaimana buruh migran membangun roda perekonomian keluarga mereka melalui kegiatan usaha yang mereka lakukan berdasarkan hasil pengamatan beliau selama menjalankan aksi advokasi pada kelompok dampingan mereka. Tulisan ini di inspirasi oleh dua hal. Pertama, datang dari pengalaman berdiskusi dengan Ibu Parhiah, 52 tahun, seorang ibu rumah tangga tidak tamat SD mampu mempertahankan jualan kue tradisional kerake. Kedua, pertanyaan bernada sindiran ke ADBMI, di mana lembaga yang dia pimpin melakukan advokasi ke soal usaha bakulan (rumahan).

Awalnya, didorong oleh kesadaran bahwa pendekatan kapasitas “advokasi” untuk orang desa yang selama ini dilakukan ternyata tidak cukup manjur menahan mereka menjadi TKI. Berdasarkan data dari salah satu desa dampingan ADBMI di Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur tahun 2009, jumlah penduduk Desa Gereneng sebanyak 9.662 jiwa dan jumlah TKI 811 orang (laki-laki 768 orang, dan perempuan 43 orang) atau 8,3 % dari total penduduk. Ketika dilakukan pembaruan data per September 2010, terdapat peningkatan jumlah TKI menjadi 1.104 jiwa (11%). Sementara itu, perbandingan antara TKI yang berdokumen dan tidak adalah 7,1 % (58 orang dari 811 total TKI) yang nonprosedural pada tahun 2009 dan 2010 terdapat 8,5 % (94 orang dari 1.104 TKI).

Adapun di Desa Gelanggang, tahun 2009, sebelum pemekaran, jumlah penduduknya 11.882 jiwa yang tersebar di 8 Dusun. Setelah pemekaran (4 dusun ikut desa pemekaran dan 4 dusun tetap menjadi wilayah induk). Tahun 2009, jumlah TKI 908 orang (laki 819 orang dan perempuan 89 orang). Dari jumlah tersebut yang pergi secara resmi atau berdokumen berjumlah 736 dan yang bermigrasi tanpa dokumen lengkap sebanyak 172 orang. Per September 2010, jumlah penduduk setelah pemekaran adalah 5.608 orang, dan jumlah TKI sebanyak 635 orang (11,3 %) terdiri atas laki-laki 576 orang dan perempuan 59 orang dan yang melalui jalur resmi sebanyak 559 orang dan yang tidak sesuai prosedur versi pemerintah sebanyak 86 orang. Gejala di dua desa ini sama, yaitu terjadi kenaikan jumlah TKI.

Meningkatnya jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri tampaknya tidak serta-merta telah meningkatkan keadaan ekonomi keluarga. Migrasi meningkatkan kerentanan dan menurunkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat lokal. Persoalan TKI di Lombok ini menurut pendapatnya telah menyebar seperti kanker yang menggerogoti seluruh dimensi kehidupan individu, keluarga

TKI, komunitas, dan bahkan berbangsa. Hal ini disebabkan oleh berubahnya cara pikir dan sikap para keluarga migran dalam menilai dan mengelola sumber daya yang mereka miliki. Hal yang paling kongkrit adalah berubahnya potret masyarakat agraris dan bahari yang dulu melekat pada masyarakat Lombok, terutama yang tinggal di perdesaan. Berdasar sensus 2010, 65% lebih masyarakat Lombok masih menjadikan pertanian sebagai penghidupan pokok, namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka masih mengakui dirinya sebagai petani, tetapi tidak menseriusi pertanian tersebut, dan banyak pula yang tidak memiliki lahan pertanian.

Dalam konteks membangun ekonomi masyarakat migran di Lombok, komunitas pekerja migran di Lombok harus didorong untuk melakukan mata pencaharian alternatif diluar kegiatan bermigrasi ke luar negeri dan tidak lantas menjadikan pekerja migran sebagai pekerjaan pokok. Sebagai contoh, tidak menginvestasikan seluruh hasil keringatnya untuk membeli sepeda motor agar dapat berprofesi sebagai pengojek, namun para komunitas migran ini harus didorong untuk menginvestasikan remitansi sosial mereka berupa keterampilan membuat roti cane, memanfaatkan kemampuan berbahasa Arab atau Mandarin, memanfaatkan keterampilan cara bercocok tanam, atau membuat masakan yang di jual di restoran luar negeri dan kegiatan ekonomi berupa menginventasikan uang yang mereka miliki ke jenis usaha yang produktif dan berkelanjutan. Keadaan ini nantinya diharapkan mampu membuat mereka para calon pekerja migran untuk tidak pergi (lagi) menjadi TKI untuk kesekian kalinya. Artinya, menumbuhkan jiwa kewirausahaan (*enterpreunership*) harus dimiliki oleh mereka. Dengan variasi jenis usaha, jika satu uaha gagal masih ada sandaran usaha lainnya tempat berharap.

Akan tetapi benarkah kewirausahaan dapat dipelajari? Persoalan mendorong usaha mikro ini memang tidak sederhana.

ADBMI telah mencoba untuk memulai dengan belajar kembali tentang usaha mikro ini. Tidak kepada profesor dengan ukuran kepelontosan sebagai ukuran keahlian, namun belajar kepada orang-orang biasa yang ada di sekitar kampung. Mereka yang telah memiliki, dan mengelola usaha mikro bahkan sangat mikro. Di antaranya Parhiah, Ismail, dan Pathur. Mereka ini adalah mantan BMI yang banting setir menjadi pengusaha kecil. ADBMI menyebut kegiatan yang mereka lakukan dengan metode *lebur anyong saling sedok* atau saling bantu dan saling angkat.

Awalnya, ketika jalan-jalan keliling desa, meskipun tidak di rencanakan, Roma bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan sesuatu, ada yang sedang menggarap sawah, menganyam bambu atau rotan dan sebagainya. Lalu ketika mereka ditanya “Lagi ngapain pak/bu?”, jawaban yang di terima sangat enteng; “Porok-porok timbang momot”. Terjemahan bebasnya adalah “Lagi iseng mengisi waktu ketimbang nganggur”. Bila dipahami secara lebih mendalam jawaban tersebut memiliki makna yang cukup dalam. Bahwa apa yang dilakukan itu sebaiknya diresapi sebagai hobi, sebuah kesenangan yang ketika melakukannya tidak merasa tertekan karena sedang bekerja, tetapi sedang menyalurkan hobi. Kondisi psikologi ini penting untuk dibangun dan dimiliki oleh semua orang untuk menghindari “terlalu cepat putus asa” ketika apa yang dilakukan belum sesuai dengan rencana. Kondisi kejiwaan yang tidak tertekan, relaks, dan senang juga sangat positif dalam memberikan ketahanan dan ketajaman berfikir menemukan solusi/langkah alternatif ketika ada hambatan yang selalu datang diluar rencana dan kehendak kita.

Keadaan ini memunculkan gagasan mengenai kewirausahaan. Beberapa contoh *entrepreneurship* yang dapat disebutkan dalam tulisan ini, antara lain, Sumiati, seorang mantan TKW dari Desa Bagik Payung Selatan Kecamatan Suralaga yang dapat membangun sebuah

usaha kecil-kecilan dari hasil remitansi. Cukup dua tahun saja di Malaysia sebagai pembantu rumah (2002–2004). Dengan pembagian peran yang baik antara suami dan isteri, ekonomi keluarga semakin mapan. Pada saat ini, suaminya memang masih bekerja di Malaysia, di perkebunan kelapa sawit. Setiap tahun, suaminya mengirimkan uang yang digunakan untuk membiayai usaha yang dijalankan saat ini serta untuk biaya pendidikan dua anak laki-lakinya (kelas 3 SMA jurusan kesehatan dan satunya SMP). Penghasilan tiap bulan usahanya adalah Rp20 juta. Bahkan bila hari ramai seperti pasar mingguan hari Sabtu, ia mendapatkan keuntungan Rp500 ribu/hari dan hari hari biasa Rp300 ribu. Usaha ini dibangun sejak tahun 2006. Kios ini menjual jajanan pasar dan menerima pesanan untuk acara-acara. Salah satu strategi pemasarannya adalah jika ada acara rapat atau lainnya di kantor desa, maka ia menawarkan katering dengan kompensasi boleh dibayar belakangan alias utang lebih dahulu.

Ismail merupakan conoh kedua, seorang mantan TKI asal desa yang sama dengan Sumiati. Berkali-kali bolak-balik menghabiskan umur bekerja ke Malaysia sejak masih muda. Terhitung sebanyak lima kali. Awal tahun 2008 merupakan kepergian terakhir ke Luar negeri. Ia pensiun untuk pulang dan menikah. Di kampung sekarang ia hidup rukun dengan istri sambil menjaga kios, buah keringat kerja di luar negeri. Untuk modal membuat kios berasal dari kiriman Ismail tiap tahun yang diterima keluarganya. Kios ini telah ada sejak tahun 2006, ketika masih bujang, kini telah diperbaharui dan dibuat lebih permanen. Omset bulannya mencapai Rp12 juta, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di kampung.

Ibu Parhiah, memberikan begitu banyak pesan dan kesan yang mendalam. Seorang ibu tua yang mampu menjual sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Mampu memaksa lidah orang elite kecanduan kue kerake buatannya. Para pembelinya sanggup datang di bawah

guyuran hujan yang lebat, masuk ke gang-gang kampung yang sempit datang ke rumah Parhiah di tengah pemukiman Desa Tanjung untuk suatu tujuan; mendapatkan kue kerake. Jika tidak ambil antrian maka dapat terancam tidak kebagian sebab kehabisan persediaan diborong pembeli yang lain. Salah satu dari beberapa nilai dan prinsip yang diajarkannya adalah tidak serakah. Untuk itu, jangan sungkan untuk memberikan insentif kepada mereka yang terlibat membantu usaha anda. Hal ini dibuktikan oleh Parhiah, kepada tukang ojek yang selama ini menjadi distributor kuenya (*delivery service*), beliau memberikan insentif berupa uang jika mampu menjual lebih dari target. Berikutnya adalah buatlah produk dengan nama dan bentuk yang berbeda, meskipun bahan dasarnya sama. Misal, bahan tepung dapat di-kreasikan menjadi makanan yang berbeda-beda namanya. Di samping itu, ia juga berpesan supaya menghayati kegiatan usaha itu dengan senang hati, seperti engkau menikmati hobimu, persis dengan perasaan riang gembira ketika main kartu domino atau remi. Tak peduli kalah atau menang, yang penting tetaplah nikmati. Apakah persis begitu, kejar saya. Tidak kurang, tidak lebih, pungkasnya.

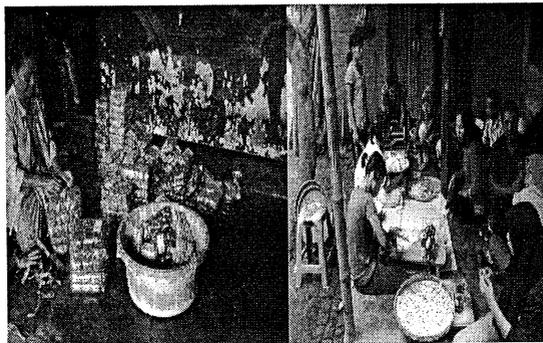
Uraian di atas adalah bagian strategi rumah tangga migran dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghidupi keluarga dan juga meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Upaya meningkatkan penghidupan dalam pengertian sederhana dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan setiap orang untuk memperoleh penghasilan, termasuk kapabilitas mereka, aset yang dapat dihitung seperti ketersediaan sumber daya, serta aset yang tak dapat dihitung seperti klaim dan akses. Sementara itu, konsep penghidupan berkelanjutan dimaknai sebagai "*kemampuan, aset (pasar, sumber daya, klaim kepemilikan, dan aset) serta aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk menunjang kehidupan*" (WCED 1987 dalam Chambers & Conway 1991: 9-12). Dengan kata lain,

penghidupan dapat dipahami sebagai ketahanan untuk menunjang pemulihan atau perbaikan dari goncangan atau tekanan; kemampuan memelihara atau meningkatkan aset; dan ketahanan menyediakan peluang penghidupan untuk menyokong manfaat penghidupan generasi mendatang dalam skala lokal dan dalam jangka pendek atau panjang” (dalam Mukbar 2010: 1).

Secara konsep, penghidupan dapat dianggap sebagai strategi mempertahankan kelangsungan hidup. Pakpahan dan Pasandaran (1990, dalam Agusanty *et. al.* t.t.:7 dalam Mukbar 2010: 1) menyebutkan bahwa masalah mempertahankan kelangsungan hidup berbeda-beda menurut derajatnya, mulai dari mempertahankan masalah hidup dan mati sampai dengan mempertahankan hidup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mampu bekerja secara normal sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Lapangan pekerjaan yang tersedia bagi rumah tangga merupakan sumber tersedianya pendapatan bagi rumahtangga yang bersangkutan.

Seberapa luas tersedianya lapangan pekerjaan dapat dimanfaatkan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki setiap anggota rumah tangga akan menentukan derajat tingkat pendapatan bagi rumahtangga tersebut. Dalam penelitian Agusanty (dalam Mukbar 2010: 1) menyebutkan strategi mencari nafkah dalam ekonomi rumahtangga dapat diidentifikasi dalam tiga hal: (1) intensifikasi atau ekstensifikasi usaha yang digelutinya, (2) pola nafkah ganda (keragaman nafkah), dan (3) migrasi temporer. Untuk strategi pertama (intesifikasi atau ekstensifikasi) banyak terbangun melalui jaringan integrasi dari pola-pola kemitraan usaha yang dilakukan. Jaringan relasi dan hubungan sosial merupakan pencerminan hubungan antar status-status dan peran-peran dalam masyarakat. Gambaran yang dituturkan di atas dari pengalaman keluarga buruh migran Lombok secara tidak langsung merupakan penjelasan dari sisi aktualisasi

mengenai strategi rumah tangga menjaga kelangsungan hidupnya agar tetap berjalan.



Gambar 4.1 Kegiatan usaha ketengan warga (pembuatan kerupuk)

G. Penutup

Remitansi baik yang dikirimkan maupun yang ditinggalkan pada saat pulang kampung memiliki berbagai tujuan penggunaan. Dari hasil penelitian, terdapat empat tujuan utama remitansi, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga di daerah asal, perayaan keluarga, investasi dan untuk kegiatan sosial. Secara proporsi, remitansi kebutuhan sehari-hari menempati urutan pertama diikuti oleh perayaan keluarga, remitansi untuk tujuan investasi, dan untuk kegiatan sosial. Berdasarkan hubungannya dengan migran, penerima remitansi terdiri atas istri, anak, orang tua/mertua, kakak/ adik/ kandung/ipar, paman ataupun kakek.

Beberapa hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut; Pertama, karakteristik rumah tangga pekerja migran sebagian besar mempunyai beban tanggungan yang cukup besar dan mempunyai tingkat pendapatan yang rendah (subsisten). Kedua, potensi aliran

remitansi yang masuk ke desa menunjukkan jumlah yang cukup besar, rata-rata jumlah yang diterima oleh rumah tangga migran berkisar antara Rp. 1.000.000–5.000.000, sekali pengiriman. Ketiga, pola pemanfaatan remitansi cenderung bersifat konsumtif, sedangkan pemanfaatan dalam bentuk investasi yang memberikan tambahan pendapatan porsinya masih relatif kecil. Keempat, dampak remitansi terhadap pembangunan daerah cenderung terjadi pada skala kecil yang terakumulasi dalam rumah tangga pekerja.

Hasil studi menunjukkan bahwa remitansi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan, taraf hidup, serta status sosial rumah tangga. Kelima, dampak dari remitansi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan peluang usaha dan alternatif pekerjaan serta peningkatan peluang kerja baru masih relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat diberdayakan baik oleh rumah tangga maupun pemerintah daerah. Aliran remitansi dapat memberikan peran yang nyata dalam pembentukan aset (akumulasi aset) dan menggerakkan pengembangan perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan potensi-potensi lokal dan mempertimbangkan *remittances* sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di desa asal migran. Pemanfaatan *remittances* dapat diarahkan dan dimaksimalkan baik oleh rumah tangga maupun dikelola oleh komunitas migran sebagai alternatif modal investasi dan pembiayaan pembangunan untuk investasi-investasi dinamis.

Daftar Pustaka

- Addy, D.N., B. Wijkstrom, B., dan C. Thouez. 2003. "Migrant Remittances-Country of Origin Experiences: Developmental Impact and Future Prospect." International Conference on Migrant Remittance, London, 9-10 October 2003.
- Bangura, Yusuf. 1994. "Economic Restructuring, Coping Strategies and Social Change: Implication for Institutional Development in Afrika". Dalam *Development and Change*, vol 25, October 1994, Oxford: Blacwell Pub. Hlm 785-827 dalam Setia, Resmi. 2005. "*Gali Tutup Lubang itu Biasa. Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*". Bandung: Akatiga.
- Billson. 1998. "J.M. Billson, No Owner Soil: The Concept of Marginality Revisited on its Sixtieth Birthday". *International Review of Modern Sociology*, 18: 183-204. Dalam Nabavi, S. Abdol Hossein. 2009. "Migrant, Marginality and Suburbanization, a Conceptual Framework". *European Journal of Social Sciences* (2).
- Brettell, Caroline. B. 2000. "Theorizing Migration in Anthropology. The Social Construction of Network, Identities, Communities and Globalscapes" dalam Brettell&Holified, 2000, "*Migration Theory: Talking Across Discipline*". NY & London: Routledge.
- Carling, J. 2004. "Policy Options for Increasing the Benefits of Remittances". (<http://www.gdrc.org>).
- Curson, Peter. 1981. "Population Geography". *A Journal Of Association Of Population Geographer Of India*, 3.
- Haris, Abdul. 2002. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta di Balik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasil Survei Nasional Pola remitansisi TKI di Nusa Tenggara Barat*. (www.bi.go.id/NR/rdonlyres/72CC7D6F-3C6C-47F7-9958-489C662FDDF1/14029/Boks1SurveiTKI.pdf).
- Laporan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Program Penempatan TKI Ke Luar Negeri Tahun 2008. 2008. Lombok: Disnakertrans

Provinsi NTB. Tidak diterbitkan.

- Mantra, Ida Bagoes. 1998. "Indonesian Labor Mobility to Malaysia (A Case Study: East Flores, West Lombok, And The Island Of Bawean)". Paper pada National Workshop on International Migration, The Population Studies Center, UGM, Yogyakarta. 9-11 Maret 1998.
- Mukbar, Deni. 2010. *Perdesaan, Migrasi Dan Perubahan Penghidupan1: Sebuah Kajian Literatur*. Working Paper. Bandung: Akatiga.
- Munir, Rozy. 1988. *Mobilitas TKI ke Sabah*. Jakarta: Puslit Pranata Pembangunan Lembaga Penelitian UI dan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI.
- Osaki, K. 2003. "Migrant Remittances in Thailand: Economic Necessity or Social Norm?" *Journal of Population Research*, 20 (2): 203—204.
- Raharto, Aswatini. 2002. "Indonesian Female Labour Migrants: Experiences Working Overseas (A case Study Among Returned Migrant In West Java)". Paper IUSSP Regional Population Conference on Southeast Asia's Population in Changing Asian Context. Bangkok, Thailand.
- 'Remittance' TKI NTB Capai Rp 800 Miliar. (<http://www.bnp2tki.go.id/content/view/828/231/>).
- Saifuddin, A. F. 1999. "Keluarga dan Rumah Tangga: Satuan Penelitian dalam Perubahan Masyarakat". *Jurnal Antropologi Indonesia*, 23 (60).
- Saifuddin, A. F. 2005. "Integrasi Sosial Golongan Miskin di Perkotaan: Kajian Kasus di Jakarta", *Jurnal Antropologi Indonesia*, 29 (3).
- Setia, Resmi. 2005. *Gali Tutup Lubang itu Biasa. Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*. Bandung: Akatiga.
- Snel dan Sterling. 2001. "Poverty, Migration, and Coping Strategies: an Introduction". dalam *Focaal-European Journal of Anthropology*, (38): 7-22.
- Spaan, Ernest. 1994. "Taikong and Calo's: The Role of Middlemen and Brokers in Javanese International Migration". *International*

Migration Review, 27(I): 93-113.

- Tirtosudarmo, Riwanto. 2008. "Buruh migran, Pemuda dan Gerakan Sosial Kritis di Perkotaan: Advokasi Buruh Migran di Mataram Lombok dan Transnasional Advocay Network". Makalah seminar hasil akhir penelitian PMB-LIPI. Tidak diterbitkan.
- World Bank Consultative Report. 2006. "T.F Committee on Payment Settlement Systems, General Principles for International Remittance Services". World Bank Publisher.
- Yuniarto, Paulus Rudolf. 2002. "Tantangan Pemberdayaan Kelompok Miskin: Studi kasus pada kelompok usaha dan buruh rumahan di Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya". Laporan survey penajakan. Bandung: Akatiga Tidak diterbitkan.

BAB V
RESPONS DAN PERAN LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN REMITASI SEBAGAI UPAYA
MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DI NUSA
TENGGARA BARAT

Gusnelly

A. Pendahuluan

Pengiriman TKI ke luar negeri selalu dikatakan sebagai sebuah solusi strategis yang bersifat sementara dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia termasuk di provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan ini barangkali dapat diterima jika saja terjadi penyusutan jumlah pengiriman TKI dan munculnya peluang-peluang kerja baru di daerah. Pada kenyataannya, pemerintah daerah masih tetap mendorong masyarakatnya untuk mencari kerja ke luar negeri daripada menganggur di tanah air. Peluang kerja dan kesempatan kerja masih saja sedikit, sementara tingkat pertumbuhan angkatan kerja terus bertambah.

Beberapa kelompok masyarakat sipil seperti LSM ADBMI di Lombok Timur atau Kelompok Solidaritas Perempuan (SP Mataram) menerima kebijakan pengiriman TKI ini secara kritis. Lembaga masyarakat ini mengkritisi setiap kebijakan, melakukan pengamatan dan mengawasi berjalannya program perlindungan terhadap TKI mulai dari proses perekrutan, penempatan, dan informasi yang bersifat edukatif. Sebagai organisasi yang kritis dengan menekankan pada implementasi dari kegiatan pengelolaan remitansi, ada pula organisasi masyarakat yang menyadari bahwa TKI dan keluarganya harus dibantu untuk mandiri sehingga tidak lagi pergi ke luar negeri. Menyadari bahwa peluang kerja yang sedikit menyebabkan

masyarakat cenderung bekerja ke luar negeri, penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan. Namun, ada juga LSM yang menunda membantu memberdayakan TKI melalui remitansi yang mereka dapatkan. Persoalan perlindungan masih menjadi target utama dan masih belum terselesaikan dengan baik. Tindakan pemerintah melakukan program perlindungan dianggap hanya sebagai *lips service* semata. Bagi semua lembaga swadaya masyarakat ini tugas pemerintah seharusnya adalah memikirkan langkah yang strategis terbaik bagi pengurangan jumlah pengiriman TKI. Jika mengelola uang kiriman untuk investasi ekonomi merupakan sebuah ide yang baik maka harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Selama ini remitansi hanya menjadi alat konsumtif bagi TKI dan keluarganya.

Ketidakmampuan keluarga migran memanfaatkan uang kiriman (remitan) untuk dijadikan investasi sampai hari ini masih terjadi. Minat mereka untuk melakukan kegiatan usaha di kampung sendiri selalu terkendala oleh persoalan ketidaksiapan sumber daya modal dan sumber daya manusia (SDM). Dampak dari remitansi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti peningkatan peluang usaha dan alternatif pekerjaan serta peningkatan peluang kerja baru masih relatif rendah. Pemerintah daerah harus lebih aktif memberikan informasi dan melakukan kegiatan pelatihan keterampilan sebagai salah cara untuk memberdayakan eks migran maupun keluarga migran. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan potensi-potensi lokal dan mempertimbangkan remitansi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di desa asal migran. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memikirkan keuntungan (benefit) dari aktivitas pengiriman TKI semata, tetapi berusaha mendatangkan benefit dari usaha-usaha baru yang dirintis oleh eks TKI. Artinya, pemerintah berhasil pula membangun perekonomian daerah asal.

Pemerintah daerah bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus bersinergi dengan lembaga keuangan di tingkat lokal dalam mengelola remitansi ini. Setidaknya, uang hasil kiriman dari mereka yang bekerja di luar negeri dapat dimanfaatkan oleh keluarganya secara produktif tidak melulu konsumtif. Penciptaan usaha kecil menengah (UKM) menjadi salah satu yang mungkin dapat dilakukan selama pemerintah bersama dengan segenap elemen masyarakat melakukan pembinaan jangka panjang, bertahap dan berkesinambungan.

Berangkat dari paparan di atas maka perlu untuk menginformasikan lebih dalam tentang pendapat dan pandangan dari lembaga swadaya masyarakat tentang program pengelolaan remitansi yang sudah dilakukan dalam kurun waktu belakangan ini. Oleh karena itu, tulisan dalam bab ini menguraikan beberapa peran dan respons dari beberapa LSM dalam mengelola uang remitansi TKI asal NTB. Reaksi yang beragam atas aktivitas LSM ini pun bermunculan termasuk dari pemerintah NTB.

B. Sekilas Tentang Remitansi versus Pembangunan

Seperti telah disebutkan pada Bab I dalam buku ini, remitansi merupakan aspek yang penting dalam kegiatan migrasi baik migrasi lokal maupun internasional. remitansi menurut Curson (1981) sebenarnya tidak hanya dilekatkan pada istilah pengiriman uang ataupun barang, namun di dalamnya mengandung implikasi sosial menyangkut gagasan/ide-ide mengenai nilai sosial budaya, norma, inovasi dan kini menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pembangunan sosial ekonomi suatu masyarakat. Konsep dari Curson ini dapat diartikan bahwa suatu remitansi mengandung makna yang cukup luas tidak hanya dilekatkan melulu pada kegiatan ekonomi

konsumsi namun sekaligus sebagai pembawa isu perubahan sosial dalam dimensi kemasyarakatan yang lebih luas.

Remitansi barangkali memang mampu menghidupi keluarga TKI dan juga membangun rumah permanen di kampung halamannya. Hal ini termasuk salah satu faktor pendorong utama bagi banyak orang untuk bekerja ke luar negeri. Gaji atau upah yang diperoleh oleh TKI yang bekerja diluar negeri memang lebih besar daripada upah kerja pada sektor yang sama di Indonesia. Misalnya, gaji dari bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan Malaysia berkisar antara Rp1 juta sampai Rp1,5 juta maka di Indonesia mereka yang bekerja di sektor yang sama hanya memperoleh gaji antara Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Fenomena perbedaan tingkat upah yang sangat mencolok ini pula yang mendorong Supadmi Badrowi, yaitu salah seorang TKI asal kota Semarang berangkat kerja ke Malaysia. Ketika pulang ke kampung halaman setelah bekerja selama 3 tahun, dia bisa mengumpulkan uang sejumlah Rp18 juta. Hanya sayangnya uang itu habis dipakai untuk berobat suaminya yang sakit dan untuk kebutuhan sehari-hari (Pasetia 2006: 16).

Kiriman uang para TKI asal NTB kepada keluarganya melalui tiga bank, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, dan BCA selama tahun 2008 mencapai Rp487,22 miliar, sedangkan sisanya dikirim melalui PT Pos Indonesia, Western Union, dan perusahaan jasa lain yang khusus menangani pengiriman uang serta yang dititip melalui teman TKI yang kembali ke tanah air. Perhitungan kasar rata-rata satu orang TKI mengirim uang Rp 20 juta per tahun maka jumlah remitansi dapat mencapai Rp1 triliun per tahun. Pemerintah diharapkan melakukan pembangunan yang menekankan pada pendekatan "*bottom up*" dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam arti penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Dengan

demikian, keputusan individu untuk bekerja ke luar negeri tidak hanya mendapatkan manfaat yang sesaat, akan tetapi benar-benar mampu menjadi solusi strategis mengatasi kesulitan ekonomi keluarga bahkan negaranya (Pasetia, 2006).

Ada beberapa contoh negara yang telah berhasil mengelola uang kiriman (remitan) tenaga kerjanya sehingga mampu merubah status dari negara pengirim tenaga kerja menjadi negara penerima migran. Pengelolaan uang kiriman (remitan) untuk investasi usaha mandiri dilakukan oleh para pekerja migran Italia, Turki, dan Cina. Negara Italia misalnya, merupakan salah satu pengirim tenaga kerja di masa lalu. Namun, status sebagai negara pengirim tenaga kerja berubah menjadi negara penerima tenaga kerja migran. Situasi ini berbalik karena para pekerja migran asal Italia (pada umumnya bekerja di negara-negara Eropa) memanfaatkan uang hasil kerja mereka untuk membangun usaha mandiri di negaranya. Era tahun 1990-an merupakan masa di mana para eks migran mulai membangun bisnis di negaranya sendiri.³⁷

Motivasi utama orang mencari kerja ke luar negeri tidak lepas dari masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, mengumpulkan uang untuk keluarga di tanah air, dan kemudian membangun usaha mandiri. Migran Turki merupakan salah satu contoh tenaga kerja asing yang sukses di tempat yang baru, pulang ke Turki dan memulai usaha baru di tanah airnya. Demikian pula halnya dengan orang Cina, perjalanan mereka bekerja ke luar negeri merupakan *sojourners* yang menjadi tradisi turun-temurun. Kepergian

37 Studi tentang keberhasilan para imigran asal Turki dan Italia telah dilakukan oleh beberapa tim peneliti Eropa PSDR-LIPI. Temuan lapangan membuktikan bahwa mereka yang semula menghadapi kesulitan ekonomi di negaranya, mampu menjadi *entrepreneurship* negara penerima dan bahkan sukses pula di negara asalnya. Orang Turki misalnya mampu melepaskan negaranya dari kemiskinan dan menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi generasi selanjutnya.

orang Cina ke luar negaranya adalah mencari uang, lalu membangun usaha mandiri agar tetap dapat kembali ke Cina. Mendatangi tanah leluhur, makam leluhur, dan tetap dengan tradisi cina adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari etnis Cina. Hal ini merupakan salah satu contoh immigran yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan negaranya (tanah air).

Mencari kerja ke luar negeri tidak hanya menjadi keinginan mereka yang disebut kelompok bawah semata, dikalangan menengah mencari kerja ke luar negeri juga mulai marak dilakukan. Misalnya, kelompok pekerja perawat di Belanda yang berasal dari Indonesia. Gaji besar, pengalaman kerja di luar negeri, dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik di Eropa menjadi salah bentuk motivasi yang mereka bangun. Ketika gaji terkumpul, keinginan untuk pulang, lalu memulai usaha lain, seperti membuka klinik kesehatan atau mendirikan sekolah kesehatan sendiri merupakan cita-cita yang didambakan (Gusnelly, 2010). Ketika kelas menengah mampu membuka pikiran untuk memanfaatkan uang hasil kerja untuk melakukan sesuatu yang produktif maka pemerintah akan sangat tertolong dan semestinya mendorong munculnya sikap-sikap positif seperti ini secara berkelanjutan.

C. Remitansi dan Pembangunan Daerah: Membangun Usaha Kecil Menengah di Tingkat Lokal

Pemanfaatan uang hasil kerja (remitansi) oleh TKI untuk hal yang produktif sayangnya masih sulit dilakukan di daerah-daerah Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Sebagai salah satu daerah kantong TKI dampak remitansi terhadap pembangunan daerah cenderung terjadi pada skala kecil yang terakumulasi dalam rumah tangga pekerja. Dampak dari remitansi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat seperti peningkatan peluang usaha dan

alternatif pekerjaan serta peningkatan peluang kerja baru masih relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan potensi yang besar tersebut belum sepenuhnya dapat diberdayakan baik oleh rumah tangga maupun pemerintah daerah. Aliran remitansi dapat memberikan peran yang nyata dalam pembentukan aset (*akumulasi aset*) dan menggerakkan pengembangan perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan potensi-potensi lokal dan mempertimbangkan remitansi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan di desa asal migran.

Beberapa hasil temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa, karakteristik rumah tangga pekerja migran sebagian besar mempunyai beban tanggungan yang cukup besar dan mempunyai tingkat pendapatan yang rendah (*subsisten*). Potensi aliran remitansi yang masuk menunjukkan jumlah yang cukup besar, sementara pola pemanfaatan remitansi cenderung bersifat konsumtif. Pemanfaatan dalam bentuk investasi yang memberikan tambahan pendapatan porsinya masih relatif rendah.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa uang remitansi belum dapat dipergunakan untuk menjadi sesuatu yang produktif oleh keluarga migran khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Kegiatan pelatihan dan pembinaan usaha kecil sudah pernah dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat menganggap bahwa pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) hanya sia-sia selama kran untuk mereka pergi kerja ke LN lebih mudah daripada punya usaha di tanah air. Ketika selesai pelatihan, diberikan bantuan modal usaha maka uang itu seringkali dipakai untuk modal berangkat ke LN. Bekerja di luar negeri tidak punya tanggung jawab moral untuk memajukan usaha, hanya bekerja dan dapat uang. Pikiran-pikiran seperti ini sering kali membuat program pembangunan yang akan dijalankan pemerintah mendapatkan kendala. Masyarakat Lombok,

misalnya, lebih memilih bekerja ke LN daripada di tanah air.³⁸ Selain kendala yang datang dari masyarakat, pemerintah juga kurang memberi dorongan. Para pejabat tidak saling berkoordinasi dalam banyak program yang telah mereka tetapkan, satu dengan yang lain saling ingin mengutamakan kepentingan lembaganya sehingga pembangunan utama untuk daerah terabaikan. Inilah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah NTB terutama di era otonomi daerah ini.

Tantangan lainnya yang juga menjadi kendala sulitnya UKM berkembang di daerah (terutama Lombok) adalah sistem rekapitalisasi perbankan yang hanya terjadi pada bank-bank besar, sementara untuk lembaga keuangan lokal (LKM) masih belum berjalan. Rakapitalisasi yang mensyaratkan harus ada dana rekapitalisasi yang berupa subsidi pemerintah atau dana masyarakat lainnya sebagai dana abadi penjaminan lokal (LPL). Hal ini akan memberikan kemudahan bagi UKM di daerah kabupaten, kecamatan atau desa dalam memperoleh pinjaman. Hal ini telah dilakukan oleh Bank Sumatera Selatan di Kabupaten Belitung yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Pemda memberikan subsidi untuk mengganti bunga pinjaman bagi UKM yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Pemerintah menjadi penjamin bagi UKM yang meminjam uang untuk modal usaha.

Meskipun beberapa tantangan di atas muncul dalam aktivitas pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB,

38 Perasaan bangga ketika berangkat kerja ke LN, kemudian mengirimkan uang kepada keluarga dan membangun rumah berdinding semen, beratap genteng dengan lantai keramik yang cantik di kampung halaman, itulah cita-cita utama mereka. Orientasi masyarakat yang begitu kuat pada pekerjaan di LN telah pula menjadi penyebab kurangnya minat mereka untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwiraswasta.

namun bukan berarti program pembangunan ekonomi kerakyatan sulit dijalankan dan tidak mendatangkan hasil. Pemerintah Daerah NTB telah memperhitungkan tingkat kegagalan kegiatan pemberdayaan mereka. Kegiatan lebih banyak dilakukan terhadap mereka yang sudah kembali, sudah punya usaha dan pemerintah yang membina agar usaha tersebut bertahan. Disakerstrans sejak tahun 2001 sampai 2004 sudah membina sebanyak 3.162 UMKM dan jumlah tenaga kerja sekitar 10.240 orang dengan omzet Rp278,6 miliar/tahun. Jumlah binaan terbanyak adalah industri tenun (600 UKM), perikanan (466 UKM), kerajinan bambu (443 UKM), dan usaha gerabah (*Economic Review Journal*, No. 199, 2005).

Upaya untuk menegakkan kemandirian perekonomian masyarakat terutama mantan TKI dapat juga dilakukan dengan sistem mobilisasi dana masyarakat (terutama TKI) serta meningkatkan partisipasi segenap masyarakat dalam proses pembangunan yang berlandaskan paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat secara menyeluruh (*community-based development*). Peran serta UKM ikut diperhitungkan dalam penggalangan dana ini, sehingga adanya dorongan dari pemerintah bersama dengan masyarakat meningkatkan daya saing lokal untuk meraih investasi.³⁹ Peningkatan daya saing usaha di daerah harus dicapai bersamaan dengan pembangunan ekonomi masyarakat miskin. Peran UKM dan koperasi sangat penting dalam proses pembangunan ini karena ternyata industri besar tidak dapat menjadi pemeran tunggal dalam memecahkan masalah pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan ketidakseimbangan struktur pembangunan ekonomi di desa.

Usaha kecil telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian nasional yang telah ikut mempercepat pemerataan

³⁹ Ide ini disampaikan oleh Dr. Ginanjar Kartasasmita dalam kegiatan temu anggota Gerakan Mahasiswa Pasundan, Bandung, 27 September 2001.

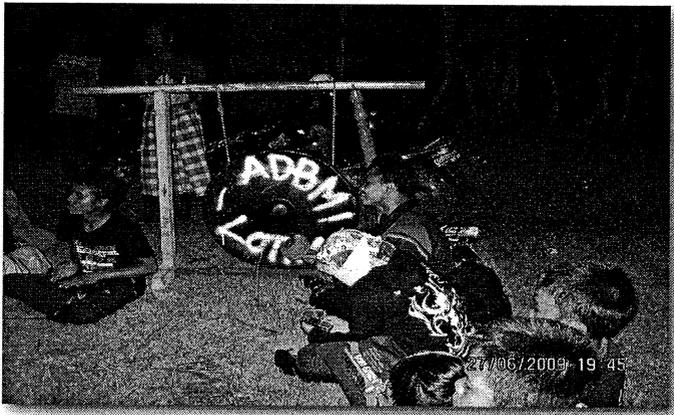
Aktivitas ADBMI dan sebagian kelompok masyarakat yang peduli terhadap TKI dan persoalan hidup yang mereka pikul juga mendorong mereka membuat lembaga *micro finance* dengan bentuk usaha kredit modal usaha. Kegiatan simpan pinjam ini juga ditujukan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. ADBMI menyebut kegiatan yang mereka lakukan dengan metode *lebur anyong saling sedok* atau saling bantu dan saling angkat.⁴¹ Modal awal mereka sebagai lembaga kecil (LSM) hanya sekitar Rp500 ribu dan sudah dijalani selama lima tahun lebih. Lembaga keuangan ADBMI memberikan bantuan modal berkisar Rp2 juta sampai dengan Rp5 juta dengan bunga 2% selama 1 tahun. Sampai saat ini ADBMI sudah memiliki modal usaha lebih dari Rp500 juta dengan jumlah anggota 250 orang.

Selain membuka lembaga keuangan kecil (*micro finance*), kegiatan advokasi terhadap TKI dan keluarganya tetap dilakukan. Melalui kesenian "*rudat*" yang sering kali ditampilkan di pelosok-pelosok desa di Lombok Timur.⁴² Para pemain *rudat* ini biasanya

41 Model simpan pinjam yang dikelola oleh LSM ADBMI ini murni atas aspirasi masyarakat dengan kelompok aktivis ADBMI sendiri. Mereka diminta untuk membantu mencari modal bagi mantan TKI yang akan beralih menjadi wiraswasta. Dengan dana yang kecil, dibuat pula usaha kecil dengan manajemen pemasaran dibantu oleh anggota aktivis. Pada akhirnya selain menjadi bapak angkat, LSM ADBMI sekaligus menjadi pendamping bagi UKM di Lombok Timur. Di beberapa desa mereka menempatkan pendamping dan sekaligus menjadi tempat tumpahan aspirasi warga. Wawancara dengan aktivis ADBMI di Lombok Timur pada tanggal 20 Juni 2009 di Labuan Lombok, NTB; wawancara dengan Roma Hidayat tanggal 18 Juni 2009.

42 Rudat merupakan kegiatan kesenian khas Lombok, yang berupa sandiwara dalam bentuk tarian dan musik. Kesenian rudat dianggap mampu menjadi jembatan bagi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau pihak lainnya. Selama beberapa tahun belakangan ini, ADBMI aktif melakukan rudat dalam upaya menyampaikan informasi tentang migran dan persoalannya kepada masyarakat di pelosok desa di Lombok Timur. Masyarakat desa biasanya lebih cepat menerima informasi melalui kesenian seperti ini tanpa merasa mereka sedang diceramahi atau di dikte. Setidaknya ADBMI mendapatkan tanggapan positif dalam melakukan aksi advokasi semacam ini. Hal ini pulalah yang membuat organisasi TIFA bergerak untuk

campuran antara aktivis ADBMI, masyarakat desa, dan mantan TKI. ADBMI tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dalam hal advokasi dan edukasi dengan organisasi independen lain, seperti TIFA, AUSAID. Keterlibatan unsur Instansi pemerintah dalam berbagai kegiatan ADBMI memang agak dihindari agar independensi lembaga sebagai wadah aspirasi murni dari masyarakat tidak terkooptasi oleh kepentingan pemerintah setempat. Hingga sekarang ADBMI tetap eksis dan menjadi lembaga yang independent tanpa kenal lelah memberdayakan para buruh migran di daerahnya.



Gambar 5.1 Pemain *rudat* sedang latihan

2. Kelompok Studi Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Koslata)

LSM yang cukup berhasil meyakinkan pentingnya keterlibatan pemda dalam pengelolaan remitansiasi adalah Kelompok Studi

bekerja sama dengan LSM ini untuk bersama-sama memberikan advokasi dan edukasi kepada warga Lombok Timur.

Lingkungan Hidup dan Pariwisata (Koslata). Koslata berhasil membina sejumlah kelompok usaha di Sumbawa. Menurut seorang aktivis Koslata, LSM ini tengah melakukan pembinaan kelompok usaha di sepuluh desa di Sumbawa.⁴³ Hal ini suatu perkerjaan yang luar biasa besar dan patut mendapat penghargaan dan perhatian serius dari pemda. Langkah yang ditempuh oleh LSM ini adalah upaya untuk membantu para buruh migran dan pemda setempat dalam pengelolaan remitansisi. Dalam kegiatan pengelolaan remitansisi TKI ini yang menjadi langkah awal adalah aspek pembinaan yang ditujukan kepada mantan TKI.⁴⁴ Diharapkan para TKI purna atau keluarganya dapat mengelola dana remitansisi ke dalam kelompok usaha bersama atau koperasi. Selanjutnya, jika usaha ini berhasil, para TKI atau buruh migran tidak perlu lagi kembali ke luar negeri karena usaha di dalam negeri sudah memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan pemberdayaan ini pada awalnya bekerja sama dengan organisasi TIFA di Jakarta dan mengandeng beberapa NGO lainnya di Mataram, seperti Lembaga Panca Karsa. Koslata sejak tiga tahun yang lalu sudah mulai merintis usaha pemberdayaan perekonomian keluarga TKI dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peranan masyarakat untuk membangun daerah. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan oleh Koslata dalam beberapa periode dengan tujuan akhir memberdayakan ekonomi

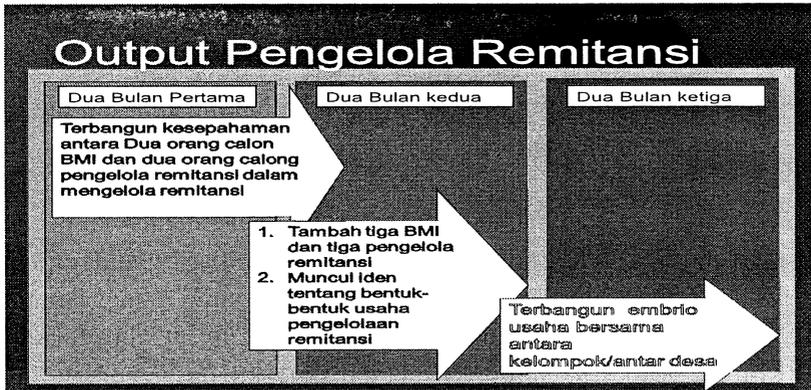
43 Wawancara dengan Sholeh, nara sumber LSM Koslata, Mataram, pada 5 Oktober 2010

44 Dalam Perda No. 11 tahun 2003 pembinaan tersebut bersifat umum, sedangkan pada Perda revisi pembinaan sudah lebih fokus diarahkan kepada mantan TKI. Dengan demikian, kebijakan Pemda Sumbawa ke depan akan mengarah kepada pembinaan mantan TKI. Hal ini sudah menjadi amanat dari peraturan daerah sehingga harus dilaksanakan oleh Pemda setempat dan Dinas terkait. Revisi terhadap Perda ini tentu saja menggembirakan para TKI atau mantan TKI karena kedepan kebijakan Pemda Sumbawa diharapkan akan lebih memberi perhatian kepada mereka.

keluarga TKI. Adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut.

- 1.) Tahun pertama, melakukan penyiapan sarana dan prasarana sosial buruh migran Indonesia. Dalam hal ini, yang berperan penting adalah para pendamping yang telah ditempatkan di 10 desa yang dipilih. Para pendamping bertugas memberi penjelasan kepada masyarakat soal penggunaan uang gaji (remitans) yang dikirim ke kampung. Para pendamping berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat pentingnya menabung. Hal ini dilakukan melalui forum-forum diskusi kelompok. Dalam diskusi ini, para pendamping melibatkan TKI, pemerhati, dan keluarga.
- 2.) Pada tahun kedua, dilakukan diseminasi pembelajaran pengelolaan remitansi dan peningkatan kapasitas aparatur negara. Koslata mengajak aparat pemerintah dari yang paling bawah sampai yang tertinggi untuk bersama-sama berperan aktif melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat mantan TKI dengan memanfaatkan uang remitansi mereka.
- 3.) Pada tahun ketiga, dilahirkan kebijakan publik yang membantu dan mendorong lebih optimalnya peran pemerintah/negara dalam mendorong dan meningkatkan pengelolaan remitansi buruh migran di NTB. Program pengembangan kelompok usaha yang berpijak pada remitansi ini akan mendapat dana stimulus dari pemda dan dinas terkait di Sumbawa.

Koslata berhasil melakukan pendekatan kepada pemda dan DPRD agar program tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan memasukkan program-program itu ke dalam program anggaran melalui RKKA Kabupaten Sumbawa. Dari beberapa tahap kegiatan tersebut maka hasil yang diharapkan adalah terciptanya kemandirian ekonomi keluarga buruh migran di NTB (lihat Gambar 5.2).



Sumber: Laporan Kegiatan Lembaga Koslata, 2010

Gambar 5.2 Tahapan Pencapaian Output Kegiatan Pengelolaan Remitansi

Kegiatan pemberdayaan ini dimulai dengan melakukan kegiatan sosialisasi dari rumah tangga yaitu berupa acara diskusi bersama calon TKI/mantan TKI beserta keluarga. Diskusi dilakukan selama tiga sampai empat kali, dengan beberapa keluarga di desa yang menjadi lumbung TKI. Tahap selajutnya, dilakukan diskusi desa dengan dihadiri oleh keluarga calon TKI/mantan TKI untuk bersama-sama aparat desa memikirkan bagaimana mengelola uang kiriman agar dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Diskusi desa ini dilakukan selama empat sampai lima kali sebelum calon TKI berangkat ke luar negeri. Tema diskusi desa diupayakan bervariasi agar pemahaman TKI dan keluarganya tentang pentingnya pengelolaan uang remitansi mencapai sasaran. Jika selama ini uang remitansi hanya bersifat konsumtif maka diharapkan akan menjadi sesuatu yang produktif.



Sumber: Laporan Lembaga Koslata, 2010

Gambar 5.3 Mekanisme Sosialisasi Pengelolaan Remitansi BMI

Kegiatan pemberdayaan ini membutuhkan beberapa pendamping di setiap desa. Desa yang dipilih ada 10 desa di Daerah Sumbawa Besar antara lain Desa Hijrah, Desa Langgang, dan Desa Leseng. Para pendamping dipilih orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat di desa tersebut. Adakalanya seorang pendamping di desa lain memiliki anak dampingan dari desa yang berbeda. Salah satu tugas penting dari pendamping adalah melakukan kontrol atas pemanfaatan uang kiriman oleh keluarga TKI. Pendamping juga membantu mengumpulkan uang untuk menjadi modal usaha jika TKI sudah kembali atau modal bagi keluarganya. Jumlah uang tabungan tersebut tidak ditetapkan jumlahnya, tergantung kemauan TKI itu sendiri. Tahap selanjutnya, para pendamping desa dan pendamping utama di tingkat kabupaten akan mengadakan koordinasi dengan dinas terkait dan lembaga perbankan. Pemerintah daerah diharapkan membuat program yang mendukung terlaksananya kegiatan

pemberdayaan tersebut. Lembaga perbankan akan dihibau untuk memberikan kemudahan kredit modal usaha bagi para TKI atau keluarga TKI. Dengan kata lain, lembaga perbankan diharapkan bersedia memberikan perlakuan khusus (berbeda) kepada TKI atau keluarga TKI dalam memanfaatkan kredit usaha.

Dalam mendapatkan kredit tersebut, LSM Koslata memperkenalkan konsep “keprung desa” yang dinyatakan juga sebagai sebuah sistem pengelolaan remitansi itu sendiri. Konsep ini pada dasarnya adalah suatu pemberdayaan ekonomi buruh migran dan keluarganya dengan mengelola kiriman remitansisi. Kelompok usaha yang dibentuk akan memilih jenis usaha berdasarkan potensi lokal. Ide yang muncul tidak akan muncul secara instan, akan tetapi melalui tahapan diskusi antara kelompok dan subkelompok informal. Para kader atau pendamping merupakan bagian dari kelompok usaha yang akan dibangun. Setiap kelompok usaha memiliki aturan main sendiri-sendiri yang berbeda antara satu kelompok dengan yang lainnya. Aturan main ini dalam bahasa lokal disebut dengan “awig-awig” yaitu pembagian hasil usaha, keanggotaan, hak dan kewajiban, dan pengembangan usaha. Keterlibatan aparat Desa dalam kelompok usaha buruh migran ini sebatas pada evaluasi proposal dari masing-masing kelompok. Aparat desa menentukan suatu proposal layak atau tidak untuk dibiayai oleh dana stimulus yang akan dikucurkan oleh Pemda Sumbawa Barat.

3. Solidaritas Perempuan Mataram (SP Mataram)

Apabila Koslata dan ADBMI melakukan hal yang bersifat pemberdayaan ekonomi secara riil maka kelompok Solidaritas Perempuan Mataram (SP Mataram) melakukan kegiatan yang berbeda, namun dalam tujuannya sama. SP Mataram melakukan

kegiatan pemberdayaan dengan cara membantu calon TKI untuk tertib administrasi ketika akan berangkat ke luar negeri. Praktik percaloan harus dihentikan mengingat banyaknya kasus kejahatan terhadap TKI terjadi karena praktek percaloan. Selain itu, SP Mataram juga memberdayakan perempuan dalam keluarga TKI untuk lebih bijak dalam memutuskan untuk bekerja ke luar negeri.

Kejahatan terhadap perempuan banyak terjadi terutama ketika mereka berada di luar negeri. Oleh karena itu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam SP Mataram lebih memilih mencerdaskan perempuan Mataram khususnya dan Lombok Barat pada umumnya melalui kegiatan advokasi. Perempuan diberikan informasi tentang dampak dari aktivitas migrasi yang dilakukan. Jika migrasi tetap menjadi pilihan dan keputusan dalam keluarga, lakukan semua proses secara tertib dan aman. Perlindungan bagi mereka ketika bekerja di luar negeri hanya diri sendiri yang dapat melakukannya. Sementara itu, perlindungan sebelum bekerja mungkin dapat dilakukan secara bersama-sama. Guna mendapatkan hasil yang optimal dalam kegiatan pembinaan perempuan ini, SP Mataram di tahun 2006 telah merintis kegiatan *feminist participatory action research (FPAR)*. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2006, dengan menggunakan *indept Interview* dan diskusi kelompok (FGD).

Kegiatan ini dilakukan bersama dengan perempuan mantan dan keluarga buruh migran di dua desa yang menjadi daerah kantong TKI dan juga mempertimbangkan adanya pihak yang dapat menjadi *contact person* bagi SP Mataram dalam kegiatan tersebut. Adapun desa yang dipilih adalah :

- 1.) Desa Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur, dan

2.) Kelurahan Rembiga, Kecamatan Mataram Kota Mataram.

Sebelum melakukan wawancara mendalam, peneliti dan partisipan mendiskusikan waktu wawancara, hal yang akan dibicarakan, dan metode yang akan digunakan. Oleh Karena pada pagi hari banyak perempuan yang sibuk seperti memasak, membersihkan rumah, dan berbagai pekerjaan domestik lainnya maka disepakati wawancara dilakukan pada sore hari dengan cara peneliti mendatangi rumah mereka. Hal yang dibicarakan adalah pengalaman mereka selama menjadi pekerja di luar negeri: bagaimana perempuan dan keluarga mengelola uang gajinya. Selain dengan mendatangi rumah partisipan satu per satu, wawancara juga dilakukan dengan membuat kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 3 – 5 orang berdasarkan kedekatan dari masing-masing partisipan. Tak jarang peneliti juga menjalin hubungan dekat dengan pihak keluarga, seperti suami, ibu/ayah, anak, dan anggota keluarga lainnya untuk menjalin keakraban.

Kegiatan diskusi kelompok (focus group discussion/FGD) dilakukan di Desa Suryawangi Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Barat. Dari hasil diskusi kemudian disepakati bahwa perkenalan dilakukan dengan menyampaikan: 1) nama lengkap; 2) mantan, keluarga BMP; 3) negara tujuan; 4) berapa lama bekerja menjadi BMP; dan 5) pendapatan (gaji) yang diperoleh. Dalam FGD ini peneliti juga menjelaskan tahapannya yaitu: 1) saling berbagi dan mendengarkan pengalaman terkait dengan penggunaan penghasilan selama bekerja di luar negeri; 2) siapa yang paling berperan dalam menentukan penggunaan penghasilan; 3) bagaimana BMP menyikapi mencari jalan keluar permasalahan bersama-sama berdasarkan pengalaman dan ide mereka; dan 4) melakukan tindakan bagi komunitas.

E. Analisis Peranan Pemda dan Kegiatan Pengelolaan Remitansi di NTB

Kesadaran untuk memberdayakan perekonomian keluarga TKI dan mantan TKI di NTB tidak muncul begitu saja, tidak lain juga terdorong oleh rasa peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Selama bertahun-tahun masyarakat tidak mampu membuat pilihan, akan bekerja sebagai apa di daerahnya, kecuali hanya ada satu pilihan yaitu menjadi TKI. Berbagai persoalan ketidakadilan, kekerasan, bahkan kehilangan nyawa tidak menyurutkan niat untuk mencari kerja ke luar negeri. Apa yang bisa dikerjakan di daerah? Inilah pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena memang tidak banyak peluang kerja yang tersedia. Beban pemerintah daerah semakin bertambah berat terutama berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kota dan kabupaten.⁴⁵

Pemerintah sendiri tidak bisa lepas tangan dalam pembangunan UKM di daerah. Setidaknya menurut Arsyad (1999: 121), ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan ekonomi di daerah. Terkait dengan aktivitas ekonomi di daerah agar lebih melokalisasi dampak multiplier suatu aktivitas ekonomi, salah satu jalan keluarnya adalah dengan memberdayakan pengusaha lokal sebagai pelaku ekonomi lokal yang diharapkan dapat meraup sebagian tetesan dari *output* ekonomi yang dihasilkan oleh pengusaha luar daerah. Tumbuhnya pengusaha

45 Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di kabupaten dan kota menjadi tugas yang harus dipikul oleh pemerintah daerah. Tugas lainnya mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

lokal sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dalam jangka panjang merupakan kekuatan inti dari perekonomian suatu daerah.

Kemandirian pemerintah dan kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan. Paradigma pemberdayaan masyarakat menjadi sangat populer di kalangan para perencana pembangunan di dunia ketiga khususnya para anggota lembaga swadaya masyarakat yang melihat bahwa paradigma pemberdayaan akan lebih mampu mencapai tujuan pembangunan, yaitu menghilangkan kemiskinan.

Respons kelompok LSM atas kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga TKI dan mantan TKI merupakan langkah awal yang baik jika pemerintah daerah ikut terlibat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memainkan peranannya dalam mendukung kegiatan LSM di daerah. Konsep-konsep pemberdayaan yang telah dimatangkan di tingkat desa akan mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya jika pemerintah tidak membantu mewujudkannya. Aktivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh LSM Koslata di Sumbawa, misalnya, terkendala oleh persoalan sistem perbankan. Meskipun beberapa aktivis mencoba menerobos dengan melakukan upaya kerja sama dengan pihak perbankan dalam rangka mempermudah akses mendapatkan dana bantuan, belum menemukan titik terang. Padahal sektor jasa keuangan dan perbankan mendapatkan keuntungan dari TKI mulai dari persiapan pemberangkatan, serta menyediakan *outlet* perbankan di negara tujuan untuk mempermudah akses pengiriman uang ke tanah air (Sihombing 2008).

Sistem rekapitalasi perbankan yang saat ini sedang berjalan harusnya lebih fokus pada penjaminan lokal (LPL) melalui deposito abadi dari dana penjaminnya. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi UKM di daerah kabupaten, kecamatan atau desa dalam memperoleh pinjaman.

Hal ini telah dilakukan oleh Bank Sumatera Selatan di Kabupaten Belitung yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Pemda memberikan subsidi untuk mengganti bunga pinjaman bagi UKM yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank. Pemerintah menjadi penjamin bagi UKM untuk meminjam uang untuk modal usaha.

Pada kenyataannya, masing-masing dinas terkait merasa tidak memiliki kepentingan dengan pemberdayaan UKM, sudah pasti juga akan menolak menjadi pihak penjamin. Pihak perbankan tidak akan memberikan kredit jika tidak ada agunan atau jaminan. Ada upaya untuk tetap mempertahankan tradisi mengirim tenaga kerja ke luar negeri, masih ada devisa yang mengalir ke daerah, dan akan bergulir dari generasi ke generasi. Berbagai macam motivasi yang dimiliki oleh pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI. Dalam konteks ini, yang selalu menjadi pertanyaan besar adalah siapa sajakah yang menikmati besarnya devisa dari pengiriman TKI? Pemerintah, masyarakat ataukah perusahaan jasa PJTKI? Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab.

Oleh karena itu, pihak LSM lebih memilih bergerak sendiri dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di daerah. Meskipun pada kenyataannya ada pula kepentingan kelompok yang terselip di dalamnya, namun kemandirian ekonomi masyarakat TKI yang miskin secara perlahan dan bertahap dapat mereka wujudkan. Membangun kesadaran untuk dapat memiliki usaha mandiri dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sudah dimulai oleh kelompok kecil ini.

Model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga masyarakat di NTB juga banyak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, misalnya perkumpulan untuk peningkatan usaha kecil (PUPUK) atau The Association for the Advancement of Small Business atau lebih dikenal dengan nama LSM PUPUK. LSM PUPUK merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap pembangunan dan pengembangan usaha kecil dan perkoperasian, pertanian, wanita dalam pembangunan, gender, lingkungan hidup, sektor informal, serta hutan kemasyarakatan dan peternakan sebagai bidang penunjangnya.⁴⁶

F. Penutup

Pemerintah daerah menyadari akan kegagalannya dalam menciptakan lapangan kerja terutama di daerah perdesaaan. Pembangunan industri yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja belum mampu diwujudkan oleh pemerintah NTB. Kesejahteraan dan perekonomian masyarakat juga belum menjadi kenyataan. Keberhasilan negara-negara yang sedang berkembang maupun negara maju tidak terlepas dari kebijakan pembangunan sektor industri. Strategi pembangunan sektor industri menjadi pijakan sebuah negara untuk mengembangkan tingkat perekonomian

⁴⁶ LSM PUPUK lahir melalui sebuah proyek: Peningkatan Industri Kecil, PIK-KADIN Jawa Barat, yang dimulai tahun 1979. Proyek ini merupakan kerja sama dengan sebuah lembaga donor dari Jerman, yaitu Friedrich-Naumann-Stiftung (FNSt), pada tahun 1988 program PIK-KADIN Jawa Barat dilepas dari KADIN Jawa Barat dan dilembagakan menjadi PUPUK, dengan badan hukum perkumpulan. Lembaga ini menjadi anggota organisasi, seperti Akumindo, FK-BAIK, ISBC, PDF. Wilayah kerjanya meliputi Jawa, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, dan NTB. Lihat dalam <http://www.kreasik.com/pupuk.htm> akses tanggal 2 Januari 2011

negaranya. Iklim kebijakan pada sektor industri yang kondusif baik secara langsung maupun tidak langsung mampu menciptakan efek ganda seperti adanya akumulasi modal, nilai tambah, dan yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran.

Secara signifikan hal ini akan menimbulkan dampak yang secara sinergis mampu untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembangunan sektor industri ini salah satunya adalah dengan mengembangkan UKM, mengingat UKM merupakan sektor riil yang berpijak pada ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, disadari maupun tidak pertumbuhannya mampu meningkatkan efek dominan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah mendorong beberapa LSM di Provinsi NTB menjadi aktif dan berupaya untuk membangun tumbuhnya iklim dunia usaha berupa UKM di daerahnya. Kerja sama antara lembaga perbankan besar dan lembaga keuangan mikro perlu dilakukan. Mereka dapat dijadikan mitra atau pihak penjamin bagi keluarga TKI yang membutuhkan dana untuk modal usaha.

Persoalan mendasar yang mengurung dan menjadi kendala bagi pengembangan UKM oleh LSM di NTB saat ini adalah terkait dengan sistem nilai budaya yang sudah mengakar pada diri rakyat NTB khususnya Lombok secara turun temurun. Sistem nilai budaya ini banyak mendeterminasi perilaku rakyat di NTB, termasuk di dalamnya cara pandang tentang bekerja ke luar negeri, cara pandang tentang beban tanggung jawab jika punya usaha sendiri, pandangan tentang arti sebuah keuntungan, cara pengelolaan keuangan, dan strategi menghadapi risiko yang belum dimiliki karena kemampuan SDM yang terbatas. Oleh karena itu program yang dilakukan oleh beberapa LSM seperti Koslata, ADBMI, dan SP Mataram sudah tepat, yaitu dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi rakyat

yang dimulai dengan program rekayasa sosial-budaya (*socio-cultural engineering*) untuk merubah *inner life* dan mengkondisikan suatu tatanan masyarakat yang konsumtif menjadi produktif. Melakukan diskusi desa, pendekatan personal dalam rangka membangun sarana dan prasarana sosial adalah suatu model pendekatan lain yang disebut pendekatan kultural (*cultural approach*).

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2008. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007*. Mataram, NTB: BPS Provinsi NTB.
- Curson, Peter. 1981. "Population Geography". *A Journal Of Association Of Population Geographer Of India*, 3.
- Connell, J. 1983. "Migration, Employment and Development in the South Pacific". South Pacific Commission, Noumea, Tonga. *Economic Review Journal*, 199 (2005).
- Gusnelly, dkk. 2009. *Pengelolaan remitansisi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi remitansisi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- Haris, Abdul dan Nyoman Adika. 2002. *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional: Dari Perbudakan ke Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: LESFI.
- Haris, Abdul. 2002. *Memburu Rigit, Membagi Kemiskinan: Fakta dibalik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hugo, Graeme J. 1978. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hubeis. 2009. *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Laporan Bank BNI 1946: *Kajian Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat tahun 2009*.
- Mitsuda, Hiyayoshi. 2005 *Sustainable Lombok: The Rich Nature and Rich People in the 21 st Century*, Mataram, Mataram University Press.
- Pergulatan dari Kancuh: *Kisah Advokasi Buruh Migran Nusa Tenggara, Mataram*. Koslata. Tidak diterbitkan.
- Sulistiyono. 2008 *Memulai dari Kampung: Panduan Perlindungan TKI*.

Mataram.

- Pasetia, Utama. 2006. "Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia Melalui Kota Semarang, Bengkulu, Astra Internasional".
- Sihombing dan Mochamad Safaruddin. 2008. "Mari Kita Garap Para TKI!: Produk dan Layanan Terhadap Pasar TKI dan Remitansi dalam Perspektif Potensi Bisnis dan Sosial.
- Tirtosudharmo, 2007, *Dimensi Politik Migrasi Internasional: Indonesia dan Negara Tetangganya*, dalam Tirtosudarmo, 2007, "Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto" Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Buku Obor.
- Zimmermann, F Klaus dan Constant Amelia. 2005. "Immigrant Performance and Selective Immigration Policy: A European Perspective". *National Institute Economic Review*, No 194 October 2005.
- World Bank. 2008. "Koridor remitansi Malaysia-Indonesia: Menjadikan Pengiriman Formal Pilihan Terbaik bagi Buruh Migran Perempuan dan Buruh Migran Tidak Berdokumen". Ringkasan Laporan. Jakarta, Indonesia: Perwakilan Bank Dunia Jakarta.
- , 2008. "UU UMKM Harus Berpihak Kepada Pelaku Ekonomi Kecil". (<http://www.indonesiaontime.com/politik/2>, diakses 10 Juni 2009).

BAB VI
EVALUASI TERKAIT DENGAN REMITANSI DAN
PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA MIGRAN NUSA
TENGGARA BARAT

Gusnelly

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang remitansi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan topik utama pada bab ini. Informasi yang disampaikan di bagian ini menjadi sebuah bentuk evaluasi temuan dari studi ini selama dua tahun (2009 dan 2010). Berbagai persoalan yang terkait dengan pengelolaan remitansi pada akhirnya menemukan sebuah kesimpulan bahwa pemerintah daerah harus lebih optimal lagi membangun ekonomi kerakyatan di NTB. Keberangkatan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, salah satunya karena sebuah keterpaksaan. Terpaksa mencari kerja ke negara lain karena tidak adanya peluang kerja di daerah. Sementara itu, biaya hidup makin tinggi, uang makin sulit diperoleh karena tidak ada pekerjaan.

Gaji yang cukup besar ikut pula menjadi faktor pendorong berangkat kerja ke luar negeri. Sebagian besar uang gaji dikirim kepada keluarga di kampung halaman. Uang kiriman atau remitansi yang berasal dari para tenaga kerja Indonesia (buruh migran) belum dikelola menjadi sesuatu yang sifatnya produktif atau bermanfaat bagi pembangunan perekonomian daerah secara riil. Padahal uang kiriman yang disebut remitansi ini jumlahnya cukup besar bahkan merupakan devisa negara terbesar kedua di sektor nonmigas. Secara kasat mata pemanfaatan remitansi ini baru berupa pemakaian secara konsumtif, sekedar memperlihatkan bahwa bekerja ke luar negeri mampu membangun rumah bagus, membeli perabotan baru,

dan makan sehari-hari. Ketika masa kerja berakhir, kemiskinan akan kembali mendera masyarakat, terjerat utang, dan tidak jarang muncul rasa putus asa. Salah satu upaya yang dilakukan biasanya menciptakan generasi baru dalam keluarga yang akan berangkat kerja ke luar negeri.

Pemerintah pun makin mempermudah jalan menuju ke sana. Pemerintah yang memutuskan apakah seseorang boleh pergi bekerja ke negara lain. Demikian pula halnya dengan negara penerima, apakah akan menerima atau menolak calon migran tersebut? Dalam mencapai kata sepakat sering kali kedua negara mengabaikan kepentingan ekonomi, bahkan kepentingan politik yang lebih menonjol (Tirtosudarmo 2007: 225-227).

Meskipun berbagai persoalan terkait dengan TKI di negara penerima mulai marak belakangan ini, namun minat untuk migrasi, bekerja ke negeri orang masih tetap berlangsung. Euforia remitansi ikut mengemuka sebagai sebuah isu yang menghangat belakangan ini. Isu tentang remitansi yang mulai banyak dibicarakan oleh banyak pemerhati migrasi disebabkan karena kontribusi uang kiriman tersebut penting bagi kesejahteraan, terutama di daerah-daerah kantong yang miskin. Studi yang dilakukan oleh Kapur (2003) sebagaimana yang dikutip oleh Hein de Haas dalam tulisan yang berjudul "*Remittances, Migration and Sosial Development*" dipaparkan bahwa kontribusi remitansi terhadap stabilitas perekonomian dan pendapatan keluarga migran signifikan hubungannya.

Dengan kata lain, migrasi bagi negara-negara berkembang secara tidak langsung membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Di beberapa negara pengirim migran seperti Meksiko, Maroko, dan Filipina, kontribusi dari remitansi terhadap GDP cenderung tinggi. Di Maroko bagian Utara, migrasi dan remitansi memiliki peran besar

dalam peningkatan mobilitas sosial ekonomi masyarakat (Hein de Haas 2007).

Pada periode 2001–2006 diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah TKI ke luar negeri, terutama yang berasal dari Lombok Timur dan Lombok Tengah. Artinya remitansi yang dihasilkan pun cukup besar dan akan memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya remitansi itu belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB di daerah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Dari kasus tersebut perlu dicermati bahwa strategi pembangunan dengan menjadikan pengiriman TKI ke luar negeri belum memberikan hasil maksimal. Seharusnya, strategi tersebut dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebutuhan keluarga migran akan barang-barang elektronik, alat rumah tangga semestinya pun memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi secara optimal. Kenaikan produksi barang dan jasa tersebut akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk atau berupa kenaikan pendapatan (PSDR-2009).

B. Persoalan Terkait dengan Perekonomian Daerah

Selanjutnya, dalam pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang karakteristik perekonomiannya lebih didominasi oleh keberadaan komoditas pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan, menyisakan sederet persoalan yang saling terkait antara sektor bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga sektor tersebut masing-masing tumbuh melambat di tahun 2008. Kineja

sektor pertanian diperkirakan sedikit melambat akibat pergeseran musim dan kurang baiknya sistem irigasi pertanian di NTB. Misalnya, daerah Lombok Tengah tercatat luas lahan tanam sebanyak 19 ribu hektar, sementara debit air yang ada hanya mampu mengairi 12 ribu hektar lahan pertanian, sisanya terancam gagal panen. Kondisi ini dari tahun ke tahun terus berlangsung bahkan kapasitas air yang tersedia pun mengalami penyusutan sehingga dapat dibayangkan jika setiap tahun terjadi kegagalan panen yang terus bertambah luasnya. Masyarakat Lombok, terutama Lombok Timur tidak berani mengambil resiko lebih besar atas kondisi alam yang tidak sehat itu. Pilihannya adalah bekerja di lahan pertanian lain, tetapi di Malaysia.

Pembangunan ekonomi suatu kawasan disadari atau tidak telah memberikan keunikan dan kemanfaatan tersendiri baik secara langsung maupun tidak bagi masyarakat sekitarnya. Setelah berbagai persoalan terkait dengan TKI di Malaysia dan Arab Saudi mendatangkan banyak masalah, lapangan kerja tidak tersedia dengan memadai di daerah, dan lahan pertanian yang mulai menyusut, pada akhirnya menyisakan banyak potensi daerah yang belum tergarap secara profesional. Kenyataan ini baru disadari baik oleh pemerintah setempat maupun pemerintah pusat setelah melihat kenyataan kualitas pertumbuhan ekonomi di NTB belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Di lain sisi, penyaluran tenaga kerja asal NTB ke luar negeri masih terus mengalami peningkatan meskipun berada dalam tekanan krisis ekonomi global. Sementara itu, realisasi anggaran belanja pemerintah daerah NTB masih di bawah target.

Mencermati perkembangan yang terjadi di masyarakat Lombok, pengiriman TKI ke Malaysia yang berasal dari NTB masih memperlihatkan jumlah yang besar. Data yang ada belum mencatat mereka yang berangkat secara ilegal, dan diperkirakan jumlah mereka

juga signifikan. Negara tujuan utama TKI terfokus pada Malaysia dengan peminat sekitar 57,10 % tahun 2008 naik menjadi 60% di awal tahun 2009. Mereka yang berangkat ke Arab Saudi sekitar 42,40% di tahun 2008 dan berkurang menjadi 39% di awal tahun 2009. Mereka yang bekerja di sektor perkebunan sebanyak 54,62 % dan sekitar 42,56 % bekerja di sektor domestik. Dengan demikian, remitansi yang masuk ke lembaga perbankan pun tetap berjalan.

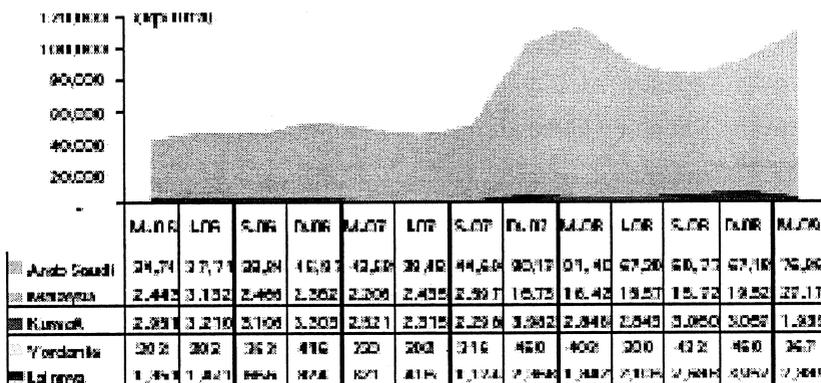
Berdasarkan data perbankan periode Januari-Juni 2008, jumlah uang kiriman TKI di NTB mencapai Rp237 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya 220 miliar (Laporan Bank Indonesia 2008). Data lain yang dikeluarkan oleh bank bank di Indonesia cabang Mataram mencatat bahwa di tahun 2008 (Januari-Desember) jumlah remitansi Rp533, 1 miliar rupiah dan pada bulan Maret 2009 (triwulan I) telah mencapai Rp104 miliar.

Jumlah yang terdata di lembaga perbankan ini belum ditambah dengan uang yang dikirimkan oleh TKI lewat saudara, kerabat, atau teman. Jumlah kiriman melalui lembaga nonperbankan tersebut diduga lebih besar daripada yang terdata di lembaga perbankan atau lembaga keuangan.

Hal ini dapat terjadi karena akses yang jauh dari kantor cabang perbankan yang ada di daerahnya. Selain itu, tingkat kepercayaan yang masih tinggi terhadap saudara masih tetap mereka jaga sehingga TKI lebih memilih menitipkan uang kepada mereka yang akan pulang ke kampung halaman.

Tabel 6.1 Penerimaan Remitansi TKI NTB berdasarkan negara tujuan

Penerimaan Remitansi TKI NTB



Sumber: Laporan Bank Indonesia 2008

Sebagai satu kesatuan rangkaian sebab akibat yang saling berkaitan antara remitansi dan pembangunan daerah maka pemerintah diharapkan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan yang partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam arti penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat maupun birokrasi. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah NTB oleh karena masyarakat sendiri tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan ekonomi dan sosial maka untuk memberdayakan mereka perlu dilakukan pemberdayaan awal, yaitu berbentuk *self empowerment*.

Pemberdayaan oleh pemda dalam konteks pembangunan ekonomi daerah Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan advokasi pembangunan yang bersifat

partisipatif dalam bentuk “*bottom up*” sehingga aspirasi masyarakat ikut terakumulasi dalam manajemen pembangunan (Suyana, 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh The Foundation for Development Cooperation (2007) tentang potensi pemanfaatan remitansi di beberapa negara termasuk Indonesia memberikan kesimpulan bahwa remitansi dapat digunakan sebagai modal pendirian lembaga keuangan mikro. Remi dapat secara langsung berdampak pada berkembangnya UMKM dengan memanfaatkan remitansi sebagai sumber modal UMKM melalui lembaga keuangan mikro yang telah dibentuk.

C. Pengelolaan Remitansi untuk Membangun Ekonomi Kerakyatan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa remitansi merupakan salah satu sumber modal yang potensial untuk pembangunan, tidak hanya pembangunan nasional akan tetapi juga di tingkat lokal. Jumlah remitansi yang dikirim oleh tenaga kerja migran cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagian besar remitansi tersebut berasal dari Malaysia dan Saudi Arabia di mana karena pada umumnya TKI dari Kabupaten Lombok bermigrasi ke negara tersebut. Kedua negara memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja tak terdidik yang sesuai dengan tingkat pendidikan TKI yang berasal dari Kabupaten Lombok.

Tabel 6.2 Data remitansi TKI di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2001–2009

Tahun	Penempatan TKI di LN	Remitan (miliar)
2005	42.067	400.31
2006	43.936	435.51
2007	42.134	683.97
2008	32.832	533.12
2009 (Maret)	12.818	104.10
2010 (Mei)	39.661	229.66

Sumber: Bank Indonesia Mataram, Mei 2009

Selama ini pembinaan terhadap keluarga ataupun mantan TKI terkait pengelolaan remitansi yang mereka kirimkan telah gagal dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB. Program pemberdayaan TKI atau mantan TKI dan keluarganya yang seyogyanya bertujuan memperbaiki perekonomian belum dilakukan secara terpusat oleh BNP2TKI. Sejauh ini program pemberdayaan masih sebatas pada program yang bertujuan untuk perlindungan buruh migran Indonesia dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan akses terhadap pengelolaan informasi dan layanan keuangan bagi keluarga. Dengan kata lain, lembaga terkait hanya membantu mempermudah akses TKI mengirimkan uang ke keluarganya di daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memanfaatkan situasi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakatnya.

Tantangan bagi pemerintah untuk membangun dunia usaha adalah bagaimana membenahi krisis moral (*moral hazard*) yang telah melanda, baik kalangan pemerintah, ditingkat pusat maupun di daerah. Menghentikan program pengiriman tenaga kerja oleh pemerintah daerah merupakan hal sulit untuk dilakukan. Program ini

mendapat dukungan kuat secara legal dari pemerintah pusat sehingga upaya membangun perekonomian keluarga migran dilakukan dengan setengah hati. Program penempatan TKI ini telah merupakan lahan bisnis bagi beberapa pihak yang terlibat di dalamnya.

Jika upaya pembangunan ekonomi kerakyatan melalui upaya pemberdayaan serta pengembangan UMKM dilakukan oleh pemerintah maka tantangan lain telah pula menunggu. Ada beberapa aspek yang menjadi kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan UMKM.

- 1.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kemampuan manajemen, organisasi, dan teknologi. Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar.
- 2.) Akses yang lebih meluas terhadap permodalan, informasi, teknologi, dan pasar, serta faktor masukan produksi lainnya.
- 3.) Iklim usaha yang sehat yang mendukung tumbuhnya inovasi dan kewirausahaan, praktik bisnis berstandar internasional, serta persaingan yang sehat.
- 4.) Tantangan pembangunan investasi. Oleh karena itu, langkah yang harus dipilih, yaitu meningkatkan ketersediaan dana investasi terutama yang bersumber dari masyarakat.

Banyak kalangan menganggap bahwa sektor usaha kecil cukup signifikan dalam menyokong perekonomian di daerah. Usaha kecil dan mikro merupakan jentik-jentik usaha yang selama ini berada di posisi paling akhir pembangunan. Dalam upaya memberdayakan ekonomi rakyat dengan membangun usaha kecil maka peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan karena peran mereka mampu mendorong tumbuhnya

iklim usaha mandiri melalui kegiatan pembangunan sumber daya manusia yang berpendidikan mampu menguasai teknologi. Selain itu perlu juga dilakukan upaya pemanfaatan sumber daya ekonomi sumber daya lahan, dan sumberdaya sosial bagi mereka yang melakukannya. Langkah yang harus dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas infrastruktur kelembagaan yang ada di daerah misalnya perbankan agar memberikan peluang berusaha yang lebih besar bagi pengusaha untuk menginvestasikan modalnya di daerah perdesaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kegiatan usaha kecil dan mikro dapat menjadi salah satu sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat sehingga mengurangi minat mencari kerja ke luar negeri.

D. Penutup

Potensi sumber daya alam dan manusia sangat mendukung untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok sebagai pusat perdagangan internasional. Jika dibandingkan Pulau Sumbawa, Pulau Lombok memang lebih berkembang pesat terutama karena majunya pertanian tembakau di daerah ini. Selain itu, kemungkinan majunya industri pariwisata dapat mendorong tumbuhnya industri-industri skala kecil. Pariwisata di Pulau Lombok tidak kalah menarik dari pariwisata di Bali sehingga pulau ini menjadi pilihan kedua para wisatawan setelah Bali. Lokasi kedua pulau ini berdekatan, budayanya pun hampir sama hanya tinggal pengemasan atau komodifikasinya yang perlu dilakukan. Tujuan komodifikasi adalah untuk mengemas budaya dan pariwisata menjadi paket yang unik untuk dinikmati oleh wisatawan.

Pengembangan industri kerakyatan dapat ikut ambil bagian dalam paket komodifikasi wisata dan budaya tersebut. Pemerintah tinggal membantu masyarakat untuk ambil bagian dalam industri

tersebut. Iklim investasi untuk membangun ekonomi kerakyatan dapat dimulai dengan menggunakan uang remitansi sebagai modal yang memang berasal dari masyarakat. Pemerintah harus pula memerhatikan arti penting modal sosial yang ada dalam masyarakat terutama dalam menciptakan kerangka kerja sama dengan pihak investor dan sebagainya.

Kendala yang dihadapi saat ini untuk membangun ekonomi kerakyatan di NTB pada umumnya disebabkan karena pemerintah daerah belum mampu menjadi pihak yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Orang Lombok atau orang Sasak memiliki tingkat kepercayaan yang lebih kuat kepada *tuan guru*. Tokoh *tuan guru* merupakan panutan bagi masyarakat bahkan dalam mengambil putusan mencari kerja ke luar negeri mereka pun dilibatkan. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi pemerintah dengan *tuan guru* perlu dilakukan. Hal ini akan lebih mudah dilakukan karena, Gubernur NTB saat ini sendiri adalah seorang *tuan guru* yang cukup memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat Sasak (Lombok) dan NTB umumnya. Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam persoalan TKI perlu juga lebih mengoptimalkan rumusan atau model pengelolaan remitansi agar bermanfaat bagi perekonomian masyarakat khususnya dan daerah pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Ananta dan Chotib. 2002. "Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Internasional terhadap Sendi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Asia Tenggara". dalam Tukiran, dkk (ed), *Mobilitas Penduduk Indonesia; Tinjauan Lintas Disiplin*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- BPS Prov NTB. 2008. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007. BPS Prov NTB. NTB.
- Disnaker Prov NTB. 2009. "Data Kesempatan TKI Tahun 2001 s/d 2008". Disnaker Prov NTB. NTB.
- Gusnelly, dkk. 2009. *Pengelolaan remitansiasi Buruh Migran Indonesia: Studi Alokasi remitansiasi dan Dampaknya dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: LIPI Press.
- Hein de Haas. 2007. *Remittances, Migration and Sosial Development: A Conceptual Review of the Literature*. Switzerland: UNRISD Publication.
- Haas, deHein. 2005. "Migration, Remittance and Regional Development in Southern Morocco". *Geoforum*. 37 (2006) 565–580.
- Keban. 2002. "International Migration, The Strategy for National Development and Globalization". dalam Tukiran, dkk (ed), *Mobilitas Penduduk Indonesia; Tinjauan Lintas Disiplin*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Laporan Bank BNI 1946: Kajian Ekonomi Regional Nusa Tenggara Barat tahun 2009.
- Mitsuda, Hiyayoshi. 2005 *Sustainable Lombok: The Rich Nature and Rich People in the 21 st Century*. Mataram: Mataram University Press.
- Pergulatan dari Kancuh: Kisah Advokasi Buruh Migran Nusa Tenggara,

- Mataram. Koslata. Tidak diterbitkan.
- Mantra, dkk. 1999. *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia Studi Kasus: Flores Timur, Lombok Tengah dan Pulau Bawean*. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sulistiyono. 2008. *Memulai dari Kampung: Panduan Perlindungan TKI*. Mataram.
- Tirtosudharmo. 2007. "Dimensi Politik Migrasi Internasional: Indonesia dan Negara Tetangganya", dalam Tirtosudarmo, 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Buku Obor.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2008. "*Buruh migran, Pemuda dan Gerakan Sosial Kritis di Perkotaan: Advokasi Buruh Migran di Mataram Lombok dan Transnasional Advocay Network*". Makalah seminar hasil akhir penelitian PMB-LIPI. Tidak diterbitkan.

